

**DAMPAK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA UAP (PLTU) BANTEN 2 LABUAN PADA
KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA
CIGONDANG KECAMATAN LABUAN-BANTEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

MELINDA PAULA TUMBOL

6661110006

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG - OKTOBER 2015**

PERSYARATAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Melinda Paula Tumbol

NIM : 6661110006

Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 16 Februari 1993

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesajaraan saya bisa dicabut.

Serang, Oktober 2015

Penulis



Melinda Paula Tumbol

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **Melinda Paula Tumbol**
NIM : **6661110006**
Judul Skripsi : **Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten**

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal 02 Bulan Oktober Tahun 2015 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, Oktober 2015

Mengesahkan

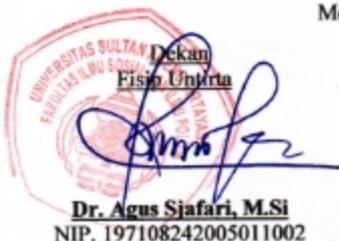
Ketua Penguji
Listyaningsih, M.Si
NIP. 197603292003122001

Penguji:
Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Penguji:
Anis Fuad, M.Si
NIP. 198009082006041002



Mengetahui



Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002



Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara
Rahmawati, M.Si
NIP. 197905252005012001

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : MELINDA PAULA TUMBOL
NIM : 6661110006
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA UAP (PLTU) BANTEN 2 LABUAN PADA
KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DI
DESA CIGONDANG KECAMATAN LABUAN-
BANTEN

Serang, Oktober 2015

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Suwaib Amirudin, M.Si
NIP. 197405012005011005

Pembimbing II



Anis Fuad, M.Si
NIP. 198009082006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

ABSTRAK

Melinda Paula Tumbol. NIM. 6661110006. Skripsi. Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang-Banten. Pembimbing I: Dr Suwaib Amirudin., M.Si dan Pembimbing II: Anis Fuad., S.Sos., M.Si

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan adalah sistem interkoneksi Jawa-Bali sejak Juli 2009. Keberadaan PLTU Banten 2 Labuan di Desa Cigondang Kecamatan Labuan menyebabkan terjadinya dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan PLTU Banten 2 Labuan berdampak kepada kehidupan sosial yaitu debu yang dihasilkan oleh aktivitas PLTU Banten 2 Labuan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar seperti gangguan pernafasan dan membuat mata perih. Desa Cigondang memiliki pola perpindahan penduduk yang menetap. Selain itu perusahaan telah memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat melalui program CSR (*corporate social responsibilty*) dalam rangka membantu masyarakat secara umum. Dari dampak ekonomi yaitu pendapatan nelayan menurun akibat telah tercemarnya pesisir pantai di Kecamatan Labuan, selain itu terdapat keuntungan bagi pedagang yang berjualan di area sekitar PLTU Banten 2 Labuan, memberikan keuntungan bagi masyarakat yang membuka usaha rumah sewa untuk karyawan PLTU Banten 2 Labuan yang berasal dari luar Kecamatan Labuan. PLTU Banten 2 Labuan sudah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal walaupun belum terserap secara maksimal tenaga kerja dari Desa Cigondang.

Kata Kunci: Dampak, Pembangunan, PLTU, Sosial dan Ekonomi

ABSTRACT

MELINDA PAULA TUMBOL, SRN. 6661110006. A PAPER. *The Impact of PLTU Banten 2 Labuan in socio-economic life of the people in Cigondang village, Labuan – Banten. 1st Advisor Dr. Suwaib Amirudin., M.Si and 2nd Advistor Anis Fuad., S.Sos., M.Si*

PLTU Banten 2 Labuan is a Jawa-Bali interconnection system since July 2009. The existence of the PLTU caused the social and economic impacts to the surrounding community. the purpose of this study is to determine the construction of PLTU on the socio-economic life of the people in Cigondang village. The results showed PLTU Banten 2 Labuan give a affect the social life of the dust that is generated by the PLTU activity damage the health of surrounding communities such as respiratory problems and sore eyes. Cigondang village has a sedentary pattern of population movement, other than that the company has a direct contribution to society through it is CSR programe (Coorporate Social Responsibility) in order to help the society in general. From the impact of economic that is the income of fisherman has declined due to the contamination of coastal areas in the district of Labuan. In addition there is an advantages for the traders who sell in the area arround the PLTU Banten 2 Labuan, provide benefits for people who open a rental house for the employees of PLTU Banten 2 Labuan that coming from the outside of district Labuan. The PLTU Banten 2 Labuan already provides employment for the local people, although not maximally absorbed labor from the village Cigondang.

Keywords:Impacts, Development, PLTU, Socio and Economic.

*Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka
yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka
yang terpanggil sesuai dengan rencana
Allah (Roma 8:28)*

Namun hal-hal pahit harus kau cicipi
lebih dulu agar kau tau apa rasanya
manis.

***Ketika kita tahu cara bagaimana
menikmati proses kehidupan, maka kita
juga tahu bagaimana caranya untuk
bersyukur (MPT)***

*Ku Persembahkan Skripsi ini
kepada Orang-orang
tersayangku, Mamah, Papah,
Kedua Kakakku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa , karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya telah memberikan peneliti kesehatan jasmani dan rohani sehingga peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten**“.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Peneliti menyadari bahwa sejak awal selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Sholeh Hidayat, M.Pd Rektor UNTIRTA beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus sebagai dosen penguji sidang skripsi peneliti.

3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UNTIRTA, Ibu Mia Dwianna W, S.Sos., M.IKom., Wakil Dekan Bidang Keuangan FISIP UNTIRTA dan Bapak Ismanto, S.Sos., M.M., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP UNTIRTA.
4. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Ibu Ipah Emma, S.Sos., M.Si., Sekertaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UNTIRTA.
6. Bapak Dr. Suwaib Amirudin, M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada peneliti dengan semangat, selalu mengingatkan peneliti untuk segera mengerjakan penelitian ini agar segera lulus dan memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Anis Fuad, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada peneliti dengan semangat, selalu mengingatkan peneliti untuk segera mengerjakan penelitian ini agar segera lulus dan memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Staf HRD dan pegawai PLTU Banten 2 Labuan yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bimbingan dan kerjasamanya dalam pengambilan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Masyarakat Desa Cigondang dan sekitarnya.
10. Ayahanda Adolf Samuel Tumbol dan Ibunda Yuslina yang senantiasa tidak pernah lelah mendokan dan memberikan semangat yang tiada henti kepada putri kecilnya agar selalu semangat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Serta selalu menjadi inspirasi dan semangat peneliti dalam proses mengerjakan skripsi.
11. Kakak tersayang Franco Maurice Tumbol dan Michael Eric Tumbol yang senantiasa menjadi kakak yang luar biasa, selalu memberikan support dan doanya.
12. Kekasih terkasih Sandi Junior Sihotang yang telah merangkap menjadi teman, sahabat, kakak, sekaligus pacar yang senantiasa selalu memberikan motivasi, semangat serta dukungan doa bagi peneliti.
13. Sahabat-sahabat terkasih Risdianti Sinaga, Fauziah Nur Utami, Rizki Parhani, Revi Selvia Septiani, Veronica Puspaningtyas, Syifa Fauziah, Dini Nurfadillah, Ratu Dian Nurul Hikmah, Mba Trami Vidya Veliyanti, Teh Azizah Nurul Fadillah, Desi Wulandari, Putri Rahadiani, Khusul Khotimah, Nengsih, Aulia Rahim, Rahmat Iqbal, Ridwan Hapipi, Muhamad Masari, Ka Aulia Shofan Hidayat, teman-teman kelas A Administrasi Negara 2011, teman-teman KKM 79, terimakasih telah menemani dalam susah, senang, sedih, galau dan mau berproses bersama sampai akhirnya skripsi ini selesai.

14. Penghuni Blok F9 Inge Yulistia Dewi, Veronica Torro Datu, Aziya Fitri, Danti Dwi Sundari. Terimakasih sudah mau menjadi sahabat yang luar biasa selama proses penelitian, semoga kita masih dipertemukan dilain kesempatan dan dengan membawa kesuksesannya masing-masing.

15. Kakak Rohani peneliti Marentina Sitorus yang telah memberikan semangat dan dukungan doa untuk peneliti.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat bagi pembaca dan permohonan maaf peneliti utarakan jika dalam pembuatan skripsi ini terdapat beberapa kesalahan yang tidak terhitung. Terimakasih.

Serang, Oktober 2015

Peneliti

Melinda Paula Tumbol

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

ABSTRACT

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 12

1.3 Batasan Masalah 12

1.4 Rumusan Masalah 13

1.5 Tujuan Penelitian 13

1.6 Manfaat Penelitian 14

1.7 Sistematika Penulisan 15

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori 17

2.1.1 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 17

2.1.1.1 Kekurangan dan Kelebihan PLTU 18

2.1.2 Pembangunan	19
2.1.3 Indikator Keberhasilan Pembangunan	24
2.1.4 Analisis Dampak Pembangunan	28
2.1.5 Perencanaan Pembangunan Pesisir	30
2.1.6 Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	31
2.1.7 Prinsip Analisis Dampak	37
2.1.8 Isu-Isu Strategi Dalam Analisis Dampak	38
2.1.9 Komponen Pokok Lingkungan Sosial	39
2.1.10 Indikator Kesejahteraan Rakyat	43
2.1.11 Indikator Kualitas Lingkungan Sosial	43
2.1.12 Pengertian Dampak Sosial Ekonomi	44
2.1.13 Konsep Pembangunan Sosial Ekonomi.....	45
2.1.14 Penetapan Komponen Sosial Ekonomi	47
2.1.15 Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	48
2.2 Penelitian Terdahulu.....	51
2.3 Kerangka Berfikir	54
2.4 Asumsi Dasar	57

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	58
3.2 Fokus Penelitian	60
3.3 Lokasi Penelitian	60
3.4 Fenomena yang Diamati	61
3.4.1 Definisi Konsep	61

3.4.2 Definisi Operasional	61
3.5 Instrumen Penelitian	62
3.6 Informan Penelitian	62
3.7 teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	64
3.7.1 Teknik Pengolahan Data	64
3.7.2 Analisis Data	74
3.8 Jadwal Penelitian	77

BAB VI HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	79
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Labuan	79
4.1.2 Gambaran Umum Desa Cigondang	85
4.1.3 Gambaran Umum PLTU Banten 2 Labuan	86
4.2 Deskripsi Data.....	88
4.2.1 Data Informan Penelitian	89
4.2.2 Analisis Data Penelitian	91
4.2.2.1 Pola Perkembangan Penduduk	92
4.2.2.2 Pola Perpindahan Penduduk	100
4.2.2.3 Pola Perkembangan Ekonomi	105
4.2.2.4 Penyerapan Tenaga Kerja	109
4.2.2.5 Berkembangnya Struktur Ekonomi	114
4.2.2.6 Peningkatan Pendapatan Masyarakat	116
4.2.2.7 Perubahan Lapangan Pekerjaan	121
4.2.2.8 Kesehatan Masyarakat	124
4.2.2.9 Bentuk Komponen Krisis	129

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	132
4.3.1 Pola Perkembangan Penduduk	132
4.3.2 Pola Perpindahan Penduduk.....	134
4.3.3 Pola Perkembangan Ekonomi	136
4.3.4 Penyerapan Tenaga Kerja	137
4.3.5 Berkembangnya Struktur Ekonomi	139
4.3.6 Peningkatan Pendapatan Masyarakat	140
4.3.7 Perubahan Lapangan Pekerjaan	143
4.3.8 Kesehatan Masyarakat	144
4.3.9 Bentuk Komponen Krisis	146

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	148
5.2 Saran	150

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Tenaga Kerja PLTU Banten 2 Labuan	64
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	64
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara	69
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	78
Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kecamatan Labuan	81
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk.....	82
Tabel 4.3 Jumlah Sekolah di Kecamatan Labuan	83
Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Labuan	84
Tabel 4.5 Jumlah Sumber Daya Manusia Desa Cigondang	85
Tabel 4.6 Batas Wilayah	86
Tabel 4.7 Daftar Spesifikasi Fungsi dan Peran Informan Penelitian	90
Tabel 4.8 Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2013	93
Tabel 4.9 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Cigondang	96
Tabel 4.10 Profesi Perekonomian Masyarakat Desa Cigondang	105
Tabel 4.11 Rekapitulasi Tenaga Kerja PLTU Banten 2 Labuan	110

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	56
Gambar 3.1 Siklus Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	75
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PLTU Banten 2 Labuan	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki. Usaha yang dilakukan untuk maju dan berubah menjadi lebih baik itulah sebuah pembangunan, namun usaha itu haruslah terencana dan dilakukan secara sadar, karena segala sesuatu yang terencana mulai dari bagaimana bentuk yang diinginkan hingga bagaimana nantinya menghadapi masalah yang datang. Pembangunan selain memberikan banyak manfaat tidak jarang sering menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dikarenakan di dalam proses perencanaan kurang memperhatikan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Pembangunan harus dapat menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Hal ini senantiasa menjadikan suatu acuan pada pemerintah dibanyak negara yang mendambakan tingkat kehidupan agar lebih baik, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dapat pula dikatakan bahwa pembangunan dalam pengertian tersebut harus dapat menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Sebagai usaha direncanakan pembangunan tidak akan terlepas adanya intervensi aktif yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Strategi pembangunan sebagai sektor unggul mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, namun kurang mempunyai efek pada kesejahteraan masyarakat pedesaan. Artinya tidak seperti yang diharapkan oleh para perencana pembangunan. Masyarakat pedesaan menemukan kesulitan bila ingin bekerja pada industri karena keterampilan mereka rendah. Strategi itu dirasa gagal dalam menyebarkan dan merembeskan efek untuk memecahkan masalah peluang kerja, dan mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi. Tidak hanya pada aspek ekonomi saja yang mempengaruhi kehidupan masyarakat namun berdampak juga pada kehidupan sosial masyarakat sekitarnya.

Keadaan masyarakat akan mengalami suatu gerak perubahan yang proses perubahan tersebut biasanya menimbulkan masalah yang sering disebut sebagai masalah sosial. Kesenjangan sosial merupakan permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan suatu daerah. Kondisi masyarakat miskin dan masyarakat kaya kota, disebabkan karena tidak adilnya akses bagi pemanfaatan sumber daya yang ada di kota sehingga terpinggirkan kelompok terpencil dan miskin. Selain itu struktur sosial akan mengalami perubahan yang disebabkan banyaknya masyarakat pendatang. Masyarakat setempat akan mulai termotivasi untuk menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan berbagai kebudayaan berbeda yang dibawa oleh para pendatang yang berasal dari daerah lain.

Indonesia memiliki 35 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang tersebar di Pulau Jawa yaitu 10 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan di luar Pulau Jawa dan 25 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dala, hal ini pembangunan PLTU bertujuan untuk mempercepat ketersediaan listrik di Indonesia.

Provinsi Banten adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki tiga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Banten (Suralaya), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 (Labuan) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 Banten (Teluk Naga). Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan 2 yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. PLTU Banten 2 Labuan diresmikan pada tanggal 28 Januari 2010 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan unit 1 mulai masuk ke dalam sistem interkoneksi Jawa-Bali sejak Juli 2009, sedangkan unit 2 yang berkapasitas sama mulai masuk ke sistem interkoneksi sejak Maret 2010. Lokasi PLTU Banten 2 Labuan di Kecamatan Labuan dipilih setelah menyisihkan ke delapan calon lokasi PLTU lainnya di Kabupaten Pandeglang, yaitu Tanjung Bangkuang, Cilurah, Tanjung Ketapang 1 Caringin, Tanjung Lampe, Ciseuket Barat, Tanjung Ketapang 2 dan Tanjung Kuntianak.

Untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, sebelum dilaksanakannya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Banten (Labuan), PT. PLN (Persero) wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL), agar dapat dikaji dampak penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif, sehingga dengan segera dampak negatif dapat diperkecil sedangkan dampak positifnya dapat dikembangkan.

Seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030 yang terdapat dalam pasal 10 ayat 4, bahwa pemerintah mempunyai strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan bahaya yang diakibatkannya serta yang akan menyebabkan kerugian sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan, harus dilakukan secara insentif dan ada pengelolaan secara khusus terhadap limbah tersebut agar bisa dihilangkan atau dikurangi sifat bahayanya. Selain itu, perlu diusahakan metode pengelolaan yang ramah lingkungan serta pengawasan yang benar dan cermat oleh berbagai pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, oleh karena itu keterlibatan masyarakat yang terkena dampak menjadi penting dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Pembangunan PLTU merupakan upaya untuk menghadapi ancaman krisis kelistrikan di Indonesia, selain itu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan

merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Kecamatan Labuan, terutama empat Desa penyanggah yaitu Desa Sukamaju, Desa Margasana, Desa Margagiri dan termasuk Desa Cigondang, khususnya dari masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan sebagian yang berprofesi sebagai petani. Pembangunan PLTU selain memberikan dampak positif, pasti memiliki dampak negatif baik pada struktur sosial, budaya, ekonomi dan kualitas lingkungan di sekitar PLTU.

Peraturan mengenai permasalahan sosial ekonomi tercakup dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam Undang-undang ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan dan menjamin khususnya imbalan yang memberikan semua pekerja upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan apapun, kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi yang tepat tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan. Selain itu mengakui setiap orang menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik, mental dan hak atas pendidikan.

Pada hakekatnya setiap kali berlangsung suatu proses pembangunan terjadi hubungan antara agen pembangunan (*provider*) dengan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan sebagai penerima (*recipient*). Agen pembangunan dituntut

untuk menyesuaikan program dan kebijakannya dengan kebutuhan masyarakat sasaran (*target*).

Keikutsertaan dalam pembangunan sebenarnya tidak hanya terbatas pada tokoh masyarakat saja, akan tetapi juga seluruh individu dalam masyarakat sasaran harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan, terutama melalui usaha peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi. Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan PLTU Banten 2 Labuan bahwa bantuan untuk pendidikan belum dirasakan oleh masyarakat sekitar, bantuan untuk kesehatan ditahun 2014 hanya satu kali yaitu adanya pengobatan gratis dan sunatan masal serta ditahun 2015 pada bulan Februari bantuan kesehatan yang sama diberikan kepada masyarakat yaitu pengobatan gratis dan sunatan masal. Pengobatan gratis dan sunatan masal hanya diadakan satu tahun sekali serta pihak PLTU bekerjasama dengan dokter disalah satu klinik di Labuan, namun pada kenyataannya masyarakat sekitar belum merasakan bantuan pengobatan gratis tersebut. Ada pun bantuan-bantuan lainnya pada tahun 2015 yaitu pemberian mesin produksi kerupuk oleh pihak PLTU kepada masyarakat desa Cigondang dan gilingan tepung ikan untuk pembuatan pur.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada September 2014, pembangunan PLTU Banten 2 Labuan memberikan beberapa dampak positif maupun negatif khususnya pada aspek lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak positif yang terjadi diantaranya dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Tetapi untuk masyarakat lokal dari Desa Cigondang tidak terserap secara maksimal karena didominasi oleh para pendatang yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu dari masyarakat Labuan terutama di Desa Cigondang, berikut rekapitulasi tenaga kerja PLTU Banten 2 Labuan :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Tenaga Kerja PLTU Banten 2 Labuan

No	Uraian	Domisili Labuan (Lingkup Kecamatan Labuan)	Domisili sekitar Labuan (Lingkup Kabupaten Pandeglang)	Domisili Luar Labuan (Lingkup diluar Kabupaten Pandeglang)
1	PT. Indonesia Power (IP)	1	2	67
2	PT. Cogindo Daya Bersama	30	30	127
3	Koperasi Kekal	55	42	13
4	<i>Security</i>	39	20	0
5	<i>Cleaning Service</i>	246	0	0
	<i>Jumlah</i>	371	94	207

Sumber : Data Rekapitulasi Tenaga Kerja PLTU Banten 2 Labuan

Analisis dari tabel rekapitulasi tenaga kerja PLTU Banten 2 Labuan, dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja yang berasal dari Kecamatan Labuan yang bekerja di PT. Indonesia Power (IP) hanya 1 orang sedangkan dibagian buruh

kasar seperti *cleaning service* sebanyak 246 orang. Karyawan yang bekerja di PT. Indonesia Power (PT) yang berasal dari Kabupaten Pandeglang sebanyak 2 orang dan karyawan yang berasal dari Kabupaten Pandeglang yang dipekerjakan dibagian PT. Indonesia Power (IP) sebanyak 67 orang sedangkan yang bekerja dibagian buruh kasar tidak ada. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat sekitar, karena yang dipekerjakan di PT. Indonesia Power yang berasal dari Kecamatan Labuan hanya 1 orang sedangkan yang berasal dari luar Kabupaten Pandeglang sebanyak 67 orang.

Setelah pembangunan PLTU dibangun diatas tanah pertanian milik masyarakat sekitar dan limbah cair yang dihasilkan oleh PLTU mencemari pesisir pantai di sepanjang Kecamatan Labuan-Banten, masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan dan petani merasa dirugikan, ada beberapa dari mereka yang harus kehilangan pekerjaannya karena tidak memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha baru.

Pendapatan masyarakat di daerah sekitar PLTU Banten 2 Labuan semakin menurun sehingga berdampak kepada kehidupan masyarakat sekitarnya. Para nelayan biasanya mengeluarkan modal untuk melaut sebanyak Rp. 200.000,- dan biasanya mendapatkan hasil sebanyak Rp. 400.000,- namun setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan pendapatan nelayan menurun menjadi Rp. 300.000,- karena para nelayan kini kesulitan untuk mencari ikan dipesisir pantai Desa Cigondang yang sudah tercemar. Pendapatan penangkapan ikan nelayan tradisional Desa Cigondang dan sekitarnya menurun setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan, sesuai data yang terdapat pada TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 3 yang terdapat di

pasar Labuan, pada Tahun 2014 penjualan sebesar Rp. 201.936,58 sedangkan pada tahun 2013 penjualan sebesar Rp. 333.003, terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp. 131.066,42. Hal ini telah membawa dampak pada perubahan sosial dan ekonomi di Desa Cigondang. Sehingga mendorong masyarakat untuk beralih profesi seperti berdagang dan beberapa nelayan mencari ikan dengan cara membuat bubu untuk menangkap siput, karena masyarakat nelayan tidak mempunyai banyak modal dan kebanyakan dari nelayan tersebut bekerja dengan memakai perahu curagan nelayan yang memiliki modal yang cukup besar. Sebagian petani pun mengeluhkan hasil pertaniannya terkadang kering karena musim kemarau dan karena dampak dari suhu suhu panas yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan. (Sumber: Hasil wawancara masyarakat yang terkena dampak langsung dari adanya pembangunan PLTU Banten 2 Labuan).

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu yang pertama, tidak terserap secara maksimal tenaga kerja lokal karena menurut hasil observasi awal dari masyarakat sekitar yaitu untuk melamar kerja di PLTU Banten 2 Labuan sangat sulit dan ada beberapa masyarakat yang membayar agar bisa bekerja di PLTU Banten 2 Labuan. Adapun masyarakat lokal yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan kebanyakan ditempatkan di *cleaning service*, *security* dan buruh kasar yang digaji harian yaitu sebesar Rp. 60.000,- yang terkadang dibayar harian, terkadang pula mingguan dan bulanan. Sistem gaji tersebut dipotong oleh CV atau PT, karena yang menggaji para pekerja buruh yaitu CV dan PT. CV dan PT adalah kepala bagian dari pekerja buruh tersebut. Masyarakat labuan khususnya Desa Cigondang tidak diberi kesempatan untuk

bekerja sebagai karyawan tetap. Karyawan tetap di *recruit* dari luar Kecamatan Labuan. Padahal dari daerah Kecamatan Labuan sendiri terutama di Desa Cigondang mempunyai banyak sumber daya manusia yang berkompetisi. (Sumber: Hasil wawancara LSM dan pekerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan).

Masalah yang kedua yaitu penangkapan ikan yang sulit sehingga pendapatan nelayan menjadi berkurang, karena terumbu karang yang merupakan tempat tinggal ikan telah rusak akibat limbah panas PLTU Banten 2 Labuan yang dibuang ke laut. Terumbu karang adalah makhluk yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Mempersempit ruang kerja petani, karena lahan pertanian sebagian sudah dijual kepada pihak PLTU Banten 2 Labuan untuk proyek pembangunan PLTU Banten 2 Labuan. Masyarakat pun mengeluhkan bantuan dana CSR (*corporate Social Responsibility*) tidak merata dan tidak tepat sasaran, terutama nelayan-nelayan kecil belum pernah merasakan bantuan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut, yang diberikan bantuan dana CSR yaitu nelayan-nelayan besar yang mencari ikan diluar Labuan seperti di Lampung dan Jawa. Kesimpulan dari permasalahan diatas yaitu PLTU belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan pendapatan masyarakat Desa Cigondang. (Sumber: Hasil wawancara masyarakat, nelayan dan petani di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU Banten 2 Labuan)).

Masalah yang ketiga yaitu limbah cair yang dihasilkan oleh PLTU berakibat kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, dikarenakan biota laut yang semakin langka yang berpengaruh kepada kehidupan nelayan-nelayan kecil.

Nelayan-nelayan kecil menjadi sulit untuk menangkap ikan, karena di pesisir pantai Labuan sudah dicemari oleh air limbah panas yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan. Karena sebelum adanya PLTU Banten 2 Labuan, nelayan-nelayan kecil dengan mudahnya mencari ikan di pesisir pantai Labuan, namun ketika mulai berdirinya PLTU Banten 2 Labuan nelayan-nelayan kecil kesulitan mencari ikan sehingga masyarakat sekitar yang memiliki modal yang cukup, ada yang beralih profesi sebagai pedagang kecil dan membuka rumah sewa untuk dikontrakan kepada karyawan PLTU yang berasal dari luar Kecamatan Labuan, jika yang tidak memiliki dana yang cukup akan tetap menjadi nelayan yang bekerja dengan menggunakan perahu curagan dan petani bekerja dilahan pertanian milik masyarakat sekitar. (Sumber: Hasil wawancara nelayan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU Banten 2 Labuan)).

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti deskripsikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengaplikasikan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Pihak PLTU Banten 2 Labuan belum mampu menyerap tenaga kerja dari Kecamatan Labuan terutama Desa Cigondang secara maksimal.
2. Pihak PLTU Banten 2 Labuan dianggap belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Cigondang serta ketidakmerataan bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak negatif pembangunan PLTU Banten 2 Labuan.
3. Pembangunan PLTU Banten 2 Labuan mengakibatkan tercemarnya pesisir pantai Kecamatan Labuan dan nelayan mengalami kemerosotan hasil tangkapan ikan yang berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

1.3 Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga peneliti membatasi penelitian ini hanya pada :

“Bagaimana Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten.
2. Bagaimana Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten.

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian apapun itu tentu memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut. Hal ini sangat perlu untuk acuan bagi setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan, karena tujuan adalah tolok ukur dan menjadi target dari kegiatan penelitian tersebut. Dari masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

“Bagaimana Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten”.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat yang diharapkan secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang dampak yang timbul oleh keberadaan PLTU terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pimpinan PLTU Banten 2 Labuan agar kelak permasalahan-permasalahan yang terjadi yang dikarenakan dampak yang dimunculkan tidak terulang lagi atau bahkan bertambah banyak.

Adapun beberapa manfaat lainnya dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

- a. Masalah pengetahuan penulis dalam bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun aplikasi
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik pada objek yang sama
- c. Agar penulis lebih memahami betapa pentingnya posisi pembuat kebijakan public bagi kenyamanan hidup masyarakat

2. Bagi Instansi

Menstimulus bagi peneliti-peneliti lain yang akan atau sedang meneliti objek penelitian diharapkan kelak semakin banyaknya peneliti-

peneliti handal yang dilahirkan oleh program studi Administrasi Negara Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

3. Bagi peneliti yang akan datang
 - a. Sebagai bahan referensi tugas bagi mahasiswa lainnya.
 - b. Bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa diharapkan nantinya dapat memupuk jiwa idealisme dalam membuat kebijakan public sebaik mungkin, kelak setelah menjadi pejabat yang berwenang
 - c. Bagi peneliti, sebagai tugas akhir matakuliah Skripsi Administrasi Negara Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai; Judul Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pendekatan Masalah dan Sistematika Penulisan.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR

Pada bab ini dijelaskan mengenai; Deskripsi Teori, Deskripsi Kebijakan, Kerangka Berfikir Penelitian dan Asumsi Dasar Penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai; Metode Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai; Deskripsi Obyek Penelitian, Deskripsi Data, Informan Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif pada instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Memuat tentang hal-hal yang perlu dilampirkan untuk menunjang penyusunan penelitian, seperti lampiran tabel-tabel, instrumen penelitian, riwayat hidup peneliti, dan lain-lain.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Setelah masalah penelitian tersebut dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian (kualitatif) adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat konsep atau asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan efektivitas dan pengawasan. Pada bagian kerangka teori ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah sebelumnya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut perlu membedah kembali tentang konsep AMDAL, indikator kualitas lingkungan hidup dan pembangunan.

2.1.1 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 Tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk pembangunan Pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara yang dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Suatu sistem pembangkit tenaga listrik yang mengkonversikan energi kimia listrik dengan menggunakan uap air sebagai fluida kerjanya, yaitu dengan memanfaatkan energi kinetik uap untuk menggerakkan poros sudu-sudu turbin. Sudu-sudu turbin menggerakkan poros turbin, untuk selanjutnya poros turbin menggerakkan

generator. Dari generator inilah kemudian dibangkitkan energi listrik. PLTU adalah singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Pembangkit ini memiliki alat pembakaran yang dinamakan dengan Boiler sehingga dihasilkan uap panas kering (steam) yang akan digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin. Sudu-sudu turbin yang berputar akan memutar poros turbin yang terhubung langsung dengan poros generator, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik (poros turbin yang berputar) menjadi energi listrik yang nantinya akan disalurkan ke gardu induk melalui transformator. PLTU pada umumnya menggunakan bahan bakar minyak dan batubara. PLTU yang menggunakan minyak sebagai bahan bakarnya memiliki gas buang yang relatif bersih dibandingkan dengan PLTU yang menggunakan batubara. PLTU batubara lebih cocok dipakai pada wilayah yang memiliki kandungan batubara yang banyak seperti daerah sumatera.

2.1.1.1 Kekurangan dan Kelebihan PLTU

- a. Kelebihan:
 1. Efisiensi tinggi dengan metode Waste Heat Utilization.
 2. Hasil pembangkitan steam dapat digunakan untuk proses produksi Mill.
 3. Biaya bahan bakar lebih murah.
 4. Biaya pemeliharaan lebih murah.

b. Kekurangan:

1. Membutuhkan penanganan air umpam yang akan masuk ke dalam boiler.
2. Menghasilkan limbah batu-bara yang memerlukan penanganan khusus.
3. Menghasilkan polutan-polutan yang lebih tinggi.
4. Membutuhkan area yang lebih luas.
5. Kurang responsif terhadap fluktuasi.

2.1.2 Pembangunan

Sjafari (2007:4) secara Etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata “Bangun”, yang mengandung empat arti, yaitu :

Pertama, bangun dalam arti sadar atau *siuman* seperti pada bait lagu “Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.” Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga bangun dalam arti bentuk. Keempat, bangun dalam arti kata membuat, mendirikan atau membina. Sehingga dari sudut etimologiik, konsep pembangunan meliputi empat arti tersebut.

Dan menurut tinjauan Ensiklopedik, dari sudut ini, pembangunan diartikan sebagai pertumbuhan (*growth*), rekontruksi (*reconstruction*). Dari pengertian pembangunan tersebut, setiap pembangunan setidaknya mengandung tiga hal, yaitu :

1. Pembangunan yaitu proses kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dengan memperoleh dukungan/partisipasi seluruh masyarakat.
2. Pembangunan adalah proses penerapan atau penggunaan teknologo yang terpilih.
3. Pembangunan adalah proses pemecahan masalah yang dihadapi pemerintah atau pun masyarakat.

Pembangunan biasanya di definisikan sebagai “rangkaiian usaha mewujudkan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)”.

Apabila didefinisi sederhana diatas disimak secara cermat akan muncul kepermukaan paling sedikit tujuh ide pokok menurut Siagian (2001:47) :

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disuatu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*), banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara *sporadi* atau *incidental*, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda ini dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain suatu

negara atau bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada.

5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daro pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat, tetap fleksibel. Walaupun demikian perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak indentik dengan “cara hidup gaya barat” setiap bangsa modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh negara bangsa yang bersangkutan.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per definisi* bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengejewantahkan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.
7. Semua hal yang telah tersinggung diatas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin menatap keberadaanya sehongga menjadi bangsa ataupun daerah yang sejajar dengan negara dan daerah yang mampu menciptakan situasi yang membuat dirinya semakin tinggi dan duduk sama rendah dengan negara dan daerah lain.

Menurut Mardikanto (1993:1-4) istilah pembangunan dapat diartikan sebagai :

1. Proses yang diupayakan secara sadar dan terencana.
2. Proses perubahan yang mencakup banyak aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
3. Proses pertumbuhan ekonomi.
4. Proses atau upaya yang dilaksanakan untuk memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan seluruh warga masyarakat.

5. Pemanfaatan teknologi baru atau inovasi yang terpilih.

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh (Rahardjo:192) pembangunan juga sebagai :

1. Proses yang menunjukkan adanya suatu kegiatan guna mencapai kondisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi yang mendahuluinya.
2. Usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan perubahan sosial melalui modernisasi. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan sosial yang utuh, bukan yang parsial.

Dengan kata lain, pembangunan adalah proses perubahan yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki.

Menurut Goulet (Mardikanto:2), ada 3 inti nilai-nilai yang terkandung dalam pengertian pembangunan, yaitu:

1. Tercapainya swasembada dalam hal kebutuhan dasar.
2. Peningkatan harga diri dalam arti peningkatan percaya diri, dan tidak dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan mereka.
3. Diperolehnya kebebasan memilih alternative untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan.

Dari pengertian pembangunan tersebut, setiap kegiatan pembangunan setidaknya mengandung 3 hal, yaitu:

1. Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dengan memperoleh dukungan atau partisipasi seluruh masyarakat.
2. Pembangunan adalah proses penerapan atau penggunaan teknologi yang terpilih.
3. Pembangunan adalah proses pemecahan masalah yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat.

Dalam konteks yang luas tersebut, pembangunan mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Beberapa pengertian tersebut ialah (Afifudin 2012:42):

1. Pembangunan adalah Perubahan

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Karena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi kehidupan yang lainnya. Manusia bukan hanya makhluk ekonomi, akan tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik.

2. Pembangunan adalah Pertumbuhan

Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya tidak ada satupun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan.

3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan

Satu kondisi ideal yang merupakan salah satu sasaran pembangunan ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

4. Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apapun tujuannya, apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil.

5. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa

Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari negara-negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh yang absolut”, yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti keadilan sosial, kemakmuran yang merata, perlakuan sama di mata hukum, kesejahteraan material, mental dan spritual, kebahagiaan untuk semua, ketentraman dan keamanan. Kenyataan bahwa titik jenuh yang absolut tidak akan pernah tercapai, berarti bahwa selama satu negara bangsa ada, selama itu pulalah ia harus melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Pada hakikatnya pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik.

2.1.3 Indikator Keberhasilan Pembangunan

Kuncoro (2004:16) berdasarkan survey literatur, beberapa sasaran fundamental pembangunan yang berusaha dicapai oleh banyak daerah adalah :

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah

2. Meningkatkan pendapatan perkapita
3. Mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan

Indikator keberhasilan dalam pembangunan, menurut Tikson (2005:32), merupakan penggunaan indikator dan pengukur keberhasilan (*variable*) yang memiliki nilai tersendiri sesuai keadaan masyarakat, dan dapat berbeda-beda di setiap negara didunia. Di negara-negara yang tergolong tertinggal/miskin ukuran kemajuan dan ukuran pembangunan mungkin masih berkutat pada kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti harga makanan pokok, dan layanan kesehatan yang dapat dikatakan minim. Sebaliknya, di negara-negara yang telah mampu memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser pada faktor-faktor sekunder dan tersier.

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita, struktur perekonomian, urbanisasi dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu dengan Indeks Kualitas Hidup (IKH) dan Indeks Pembangunan Manusia (*human Development Indeks*).

Berikut menurut Tikson (2005:28) terdapatnya enam indikator dalam penentu keberhasilan pembangunan, diantaranya :

1. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita, baik dalam ukuran GNP maupun dalam PDB merupakan salah satu indikator mikro-ekonomi yang lebih lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro-ekonomi indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia

yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tampaknya pendapatan perkapita telah menjadi indikator makro-ekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional selama ini telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara selatan dan negara ketiga di Dunia. Seolah olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan perkapita (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan perkapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan perkapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dari perluasan tenaga kerja. Di lain pihan, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan perkapita akan terus menurun.

3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi pendudukan yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi. Ini berarti kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara berkembang proporsi terbesar berada di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

4. Angka tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat di himpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5. Indeks Kualitas Hidup (IKH)

IKH atau *physical Quality of Life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makro-ekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial, indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini angka rata-rata harapan hidup dan angka kematian bayi akan dapat menggambarkan gizi bayi dan ibu, derajat kesehatan dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan.

Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggota keluarganya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari adanya pembangunan. Disamping pendapatan perkapita, sebagai ukuran kuantitas manusia.

6. Indeks Pembangunan Manusia (*human Development Indeks*)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa faktor yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut UNDP pembangunan hendaknya ditunjukkan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang memiliki tujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dikembangkan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini ada tiga komponen yang paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang, sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen : (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP dan SMU, (3) pendapatan perkapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*, perkembangan manusia berkaitan erat dengan

peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *knowledge*, *attitude*, dan *skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungan.

2.1.4 Analisis Dampak Pembangunan

Dalam pembangunan, analisis dampak sangat dibutuhkan di berbagai lapisan pembangunan baik pembangunan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, pemerintah hingga lembaga-lembaga masyarakat di berbagai aspek kehidupan dalam perencanaan, implementasi hingga evaluasi pembangunan. Pembangunan terbagi dalam pembangunan aspek fisik dan pembangunan aspek non fisik. Pembangunan aspek fisik meliputi perangkat keras yang mencakup pemukiman-perumahan, pembangunan wilayah perkotaan-pedesaan, sarana-prasarana transportasi (darat, laut, udara), kesehatan (pengadaan rumah sakit-puskesmas), pendidikan, kawasan industri, serta berbagai kelengkapan lainnya. Aspek non fisik mencakup pembangunan mental, pembentukan karakter dan moral, pembangunan kecerdasan hidup, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan.

Seperti yang dipaparkan diatas bahwa analisis dampak dilakukan dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan, maka dapat dijelaskan bahwa pembangunan dilakukan maka dapat dikatakan perencanaan pembangunan, seperti adanya studi kelayakan pembangunan, dan saat implementasi artinya analisis dapat terlihat saat pembangunan itu dilaksanakan, dan evaluasi pembangunan dilakukan setelah selesainya pembangunan tersebut dilaksanakan. Analisis dampak pembangunan dianjurkan dan lebih diutamakan dilakukan sebelum dilaksanakannya

pembangunan, dan dapat dikatakan bahwa analisis pembangunan berorientasi pada pencegahan dampak negatif daripada penanggulangan. Namun jika analisis dampak pembangunan dilaksanakan sesudah pembangunan dapat dimaksudkan agar dapat diketahui dampak pembangunan secara positif dan negatif, dan dapat menindaklanjuti dampak positifnya dan mencari solusi pencegahan dampak negatif dengan tepatnya.

Analisis dampak pembangunan mengadaptasi pada analisis kebijakan yang dikemukakan Dunn (1991:51-54), yaitu sebagai berikut:

1) Model analisis *prospektif*

Merupakan bentuk analisis pembangunan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi pembangunan sebelum suatu pembangunan tersebut diterapkan. Model ini bersifat prediktif, sering melibatkan teknik-teknik peramalan untuk memprediksi kemungkinan yang akan muncul akibat dari adanya pembangunan.

2) Model *restrospektif*

Merupakan bentuk analisis pembangunan yang dilakukan terhadap akibat-akibat pembangunan setelah pembangunan tersebut dilaksanakan. Model ini disebut evaluatif, karena banyak menggunakan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan.

3) Model *interaktif*

Merupakan bentuk perpaduan analisis dampak pembangunan dari kedua model tersebut diatas. Model ini disebut analisis komperhensif atau *holistic*, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi pembangunan yang mungkin muncul, baik sebelum maupun sesudah suatu pembangunan di implementasikan.

2.1.5 Perencanaan Pembangunan Pesisir

Perencanaan pembangunan pesisir secara terpadu harus memperhatikan tiga prinsip pembangunan berkelanjutan untuk pengelolaan wilayah pesisir yang dapat diuraikan sebagai berikut (Anom, 2012:173):

1. Instrumen ekonomi lingkungan telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang memasukkan parameter lingkungan untuk melihat analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*). Misalnya pembangunan pabrik di wilayah pesisir harus memperhitungkan tingkat pencemarannya terhadap laut, perlunya pengelolaan limbah ikan di Tempat Pelelangan Ikan, dan lain-lain.
2. Isu lingkungan seperti konservasi keanekaragaman hayati menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan.
3. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan kualitas lingkungan hidup manusia pada saat sekarang dan masa yang akan datang termasuk didalamnya adalah sarana pendidikan bagi

masyarakat pesisir, penyediaan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai dan mitigasi bencana.

2.1.6 Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis mengenai dampak lingkungan atau *Environmental Impact Analysis* (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negative dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh *National Environmental Policy Act* di Amerika Serikat. Menurut UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP no 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dibuat jika seseorang ingin mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 tahun 1999 yang terdiri dari :

- a. Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan hasil pelingkupan.
- b. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan.
- c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/kegiatan.
- d. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha/kegiatan.

Sehubungan dengan prosedur atau tata laksana AMDAL, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 telah menetapkan mekanisme yang harus ditempuh sebagai berikut :

1. Pemrakarsa menyusun Kerangka Acuan (KA) bagi pembuatan dokumen AMDAL. Kemudian disampaikan kepada Komisi AMDAL. Kerangka Acuan tersebut diproses selama 75 hari kerja sejak diterimanya oleh komisi AMDAL. Jika lewat waktu yang ditentukan ternyata Komisi AMDAL tidak memberikan tanggapan, maka dokumen Kerangka Acuan tersebut menjadi sah untuk digunakan sebagai penyusunan ANDAL.
2. Pemrakarsa menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), kemudian

disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dengan menyerahkan dokumen tersebut kepada Komisi penilai AMDAL untuk dinilai.

3. Hasil penilaian dari Komisi AMDAL disampaikan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu 75 hari. Apabila dalam jangka waktu yang telah disediakan ternyata belum diputus oleh instansi yang bertanggung jawab, maka dokumen tersebut tidak layak lingkungan.
4. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ternyata instansi yang bertanggung jawab mengeluarkan keputusan penolakan karena dinilai belum memenuhi pedoman teknis AMDAL , maka kepada pemrakarsa diberi kesempatan untuk memperbaikinya.
5. Hasil perbaikan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa diajukan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dalam memberi keputusan sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.

Apabila dari dokumen AMDAL dapat disimpulkan bahwa dampak negative tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi atau biaya penanggulangan dampak negative lebih besar dibandingkan dampak positifnya.

Pasal 16 UULH menyatakan sebagai berikut :

Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Dari ketentuan pasal 16 UULH dapat disimpulkan dua hal yaitu :

1. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan, dan instrumen pengambilan keputusan.
2. Tidak semua rencana kegiatan itu wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hanyalah yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan kriteria mengenai :

1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. Luas wilayah penyebaran dampak.
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
5. Sifat kumulatif dampak.
6. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui.
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya.
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlingungan cagar budaya.
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jenis jasad renik.

Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi penilai AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian

Lingkungan Hidup, di tingkat Provinsi berkedudukan di Bapedalda atau instansi pengelola lingkungan hidup Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup dan atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat yang berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konversi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri.

Prosedur AMDAL terdiri dari :

- a. Proses penapisan (*screening*) wajib AMDAL
- b. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat
- c. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (*scoping*)
- d. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib

AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Proses penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan). Proses penilaian KA-ANDAL setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusunan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

2.1.7 Prinsip Analisis Dampak

Gibson dalam Brucemitchell (2003) yang dikutip Kiki (2012:26) menyarankan bahwa analisis dampak dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut secara bersama-sama.

1. Prinsip pendekatan terpadu. Pembangunan harus dilihat dampaknya pada skala local, nasional dan internasional. Implikasi penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran harus terkendali sehingga tetap memiliki daya dukung yang kokoh terhadap kehidupan manusia. Mengkaji pula implikasi sosial budaya, ekonomi dan moral jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
2. Semua bentuk pembangunan harus ramah lingkungan. Baik pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat maupun swasta. Prinsip ini berarti bahwa kebijakan, program dan proyek pembangunan harus melalui analisis dampak.
3. Analisis dampak harus menekankan pada identifikasi kemungkinan terbaik. Artinya tujuan dan keunggulan relatif dan alternatif pembangunan yang dipilih harus dikaji secara kritis dan mendalam.
4. Analisis dampak harus berdasarkan hukum, spesifik dan wajib dapat diterapkan. Artinya analisis dampak harus dapat membawa perubahan positif.

5. Proses analisis dan pengambilan keputusan yang terkait harus terbuka. Partisipatif dan adil. Prinsip ini merefleksikan konsep persamaan, pemberdayaan dan keadilan yang merupakan hakekat pembangunan.
6. Harus ada petunjuk pelaksanaan. Kondisi dan syarat penerimaan harus dapat dijalankan, kepastian juga harus ada untuk memantau efek dan penataan terhadap peraturan pelaksanaan. Artinya harus tetap komitmen.
7. Analisis dampak juga harus menekankan prinsip efisiensi.
8. Berbagai cara harus disusun secara simetris untuk menghubungkan analisis dampak dengan pengambilan keputusan yang lebih tinggi.

2.1.8 Isu-Isu Strategi Dalam Analisis Dampak

1. Memprediksi Akibat

Keterbatasan kita memahami sistem ekologi dan sistem sosial, kita sering mendapatkan kesulitan untuk mengantisipasi atau memperkirakan akibat dari suatu pembangunan. Informasi dasar yang hilang atau data yang tidak lengkap, mengakibatkan pemahaman kurang lengkap.

2. Akibat Tidak Teratur

Seperti halnya dalam analisis untung-rugi, analisis dampak menghadapi persoalan dalam menilai komponen sosial yang tidak siap atau tidak mudah diukur secara kuantitatif atau diukur dengan uang, keragaman hayati, keterpaduan ekologi, kesehatan masyarakat dan keterpaduan budaya adalah tidak dapat diukur dengan uang.

3. Akibat Kumulatif

Biasanya (prosedur) analisis dampak dilakukan untuk pembangunan yang dianggap besar, yang ditentukan oleh sejumlah variabel seperti biaya capital atau jumlah tenaga atau pegawai yang dilibatkan. Untuk

pembangunan yang dianggap kecil dilakukan analisis dampak secara kumulatif. Bahayanya jumlah akhir atau banyak kegiatan berskala kecil-kecil tersebut lebih besar dibanding atau jenis kegiatan. Ini disebut akhir kumulatif.

4. Kompensasi

Walau analisis dampak dilakukan secara sistematis dan berhati-hati tidak semua dampak dapat dihilangkan. Ketika masyarakat memutuskan pembangunan berbagai fasilitas yang diperlukan masyarakat luas tetapi menyebabkan gangguan-gangguan ini memerlukan kompensasi. Prinsip keadilan dalam pembangunan menyarankan bahwa masyarakat luas harus mau memberikan kompensasi terhadap sekelompok masyarakat tersebut. Kompensasi sangat beragam seperti pembayaran bulanan atau tahunan bagi masyarakat yang terkena dampak negatif (terkena gusuran, timbunan batu), pembelian rumah dan tanah ganti rugi serta biaya pemindahannya.

2.1.9 Komponen Pokok Lingkungan Sosial

Terkait dengan kesinambungan lingkungan sosial menurut Jonny Purba (2005:20), Maka setidaknya terdapat enam komponen atau ruang lingkup lingkungan sosial yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Pengelompokan Sosial (*Social Grouping*)

Derasnya mobilitas manusia sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi atau komunikasi. Dewasa ini banyak

sekali kesatuan-kesatuan sosial yang terbentuk atas dasar kebersamaan lingkungan pemukiman. Lingkungan pemukiman menjadi faktor utama terbentuknya persatuan dan kesatuan sosial. Jika dimasa lampau kesatuan-kesatuan sosial yang berlandaskan ikatan lingkungan pemukiman itu relatif kecil, dewasa ini kesatuan-kesatuan sosial itu semakin luas, tidak terkait itu batas kesatuan geografis, kebudayaan, politik maupun kekerabatan.

Betapa kuat kebersamaan lingkungan pemukiman sebagai sarana negatif itu tercermin dalam penanaman kesatuan-kesatuan sosial dengan nama lokasi permukiman yang bersangkutan seperti RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), dusun atau kampung, desa atau kelurahan, kecamatan, local atau daerah, nasional atau bahkan regional maupun global. Kuatnya ikatan kesatuan lingkungan permukiman itu dapat dimengerti karena fungsi sosialnya sabagai tempat berlindung, sebagai sumber pencaharian hidup, sebagai sarana integrasi sosial, sebagai arena sosialisasi atau pengembangan keturunan dan wahana aktualisasi atau pengembangan kreativitas.

2. Penataan Sosial (*Social Alignment*)

Penataan sosial sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban hidup dalam masyarakat yang mempersatukan lebih dari satu orang. Penataan tersebut dapat berupa aturan-aturan sebagai pedoman bersama dalam menggalang kerjasama dan pergaulan sehari-hari antar anggotanya. Setiap orang harus jelas kedudukannya dan peran-peran

yang harus dilakukan dan mengetahui apa yang harus diberikan dan apa yang harus diharapkan dari pihak lainnya. Setiap anggota dapat memperkirakan sikap dan tindakan anggota lainnya serta cara menanggapi secara efektif sehingga mewujudkan hubungan sosial yang selaras, serasi dan seimbang.

3. Media Sosial (*Social Media*)

Untuk menggalang kerjasama yang mempersatukan sejumlah orang diperlukan media yang baik yang berupa simbol-simbol maupun kepentingan-kepentingan yang tidak mungkin dikerjakan sendiri-sendiri secara terpisah. Kepentingan bersama itu pada umumnya berkisar pada upaya memenuhi kebutuhan biologis, sosial maupun kejiwaan. Pada banyak masyarakat, kebutuhan rasa aman dengan mempertahankan kesatuan wilayah permukiman yang berfungsi sebagai tempat berlindung, sumber makan atau pencaharian hidup dan tempat mengembangkan keturunan menjadi media sosial yang sangat kuat.

4. Pengendalian Sosial (*Social Control*)

Untuk menjamin ketertiban masyarakat, terlebih dalam masyarakat yang manjemuk dan mengalami perkembangan yang pesat kearah masyarakat industri dewasa ini, pengendalian dan pengawasan sosial menjadi amat penting artinya. Setiap kesatuan sosial mengembangkan pola-pola dan mekanisme pengendalian yang sampai batas tertentu sangat efektif.

Berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan, besarnya setiap kesatuan sosial atau masyarakat telah mengembangkan pranata ataupun kelembagaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam mengolah sumber daya alam dan mengolah lingkungannya. Pengendalian sosial setempat juga sangat penting artinya sebagai penghambat pengalihan penguasaan atas sumber daya alam setempat ataupun pengalihan fungsi lahan yang semula dipertahankan untuk memelihara keseimbangan lingkungan setempat.

5. Kebutuhan Sosial (*Social Needs*)

Lingkungan sosial itu berbentuk didorong oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kehidupan yang mendasar senantiasa menimbulkan kebutuhan sampingan yang biasanya lebih kompleks, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial disini mencakup kebutuhan untuk hidup bersama secara harmonis, pembentukan komuniti, kelompok sosial, ketertiban dan sebagainya.

Keberlanjutan seluruh komponen lingkungan sosial tersebut tidak bisa terlepas dari hubungannya dengan lingkungan dalam dan buatan. Komponen tersebut pula erat kaitannya dengan lingkungan mustahil komponen-komponen lingkungan itu dapat disinambungkan. Ada lima fungsi sosial lingkungan yaitu : sebagai sumber makan atau minum (pencaharian hidup), sebagai wahana aktualisasi diri dan pengembangan kreativitas (kebudayaan), sebagai sarana pengembangan kesetiakawanan sosial dan sebagai tempat berlindung.

2.1.10 Indikator Kesejahteraan Rakyat

Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada pula berbagai komponen tingkat kesejahteraan lain yang sering digunakan. Pada salah satu publikasi PBB pada tahun 1961 yang berjudul *International and Measurement of Levels of Living : An Interim Guide* dikemukakan ada sembilan komponen kesejahteraan, antara lain : (1) Kesehatan, (2) Konsumsi, (3) Makanan dan gizi, (4) Pendidikan, (5) Kesempatan kerja, (6) Perumahan, (7) Jaminan sosial, (8) Sandang, (9) Rekreasi, (10) Kebebasan.

2.1.11 Indikator Kualitas Lingkungan Sosial

Standar kriteria atau mutu keserasian lingkungan sosial seringkali ditentukan oleh kondisi sosial, budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Menurut Jonny Purba (2005:28) dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, indikator lingkungan sosial ditentukan berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab dan dilakukan secara integral, holistik dan adil dengan ciri-ciri :

1. Segenap pihak diikutsertakan dan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab. Hal ini didasarkan pada prinsip partisipatif dan bertanggung jawab.
2. Hasilnya dapat di nikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini ditandai dengan tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat yang layak, tempat

tinggal dan pemukiman yang sehat dan aman, adanya kesempatan bekerja dan berusaha, pertumbuhan dan distribusi penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung sosial, tingkat pendidikan penduduk yang memadai dan kesehatan yang prima.

3. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial yang dikembangkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan adanya perlindungan hukum atas hak intelektual warga maupun kelompok masyarakat, misalnya melalui peran serta perlindungan terhadap hak-hak adat masyarakat local (misalnya melalui peraturan daerah yang mengakomodasi perlindungan atas hak-hak masyarakat local).

2.1.12 Pengertian Dampak Sosial Ekonomi

Untuk mengetahui dampak positif dan negatif maka diperlukan pengertian yang sama tentang apa yang dimaksud dampak. Menurut Soekartawi (1995:140). Dampak (*impact*) adalah akibat dari suatu kegiatan misalnya kegiatan pembangunan. Dampak kegiatan pembangunan ini muncul karena adanya pihak yang diuntungkan (*gainers*) dan pihak yang dirugikan (*loser*) maka penilaian dampak sosial ekonomi juga perlu mengacu pada mereka yang diuntungkan dan dirugikan ini (dari kegiatan pembangunan) karena dampak dari suatu pembangunan itu adalah sebagai akibat faktor eksternalitas, maka penilaian eksternalitas ini juga sangat penting.

Dapat disimpulkan bahwa dampak sosial ekonomi adalah akibat dibidang sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari suatu kegiatan yang menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dan diuntungkan.

2.1.13 Konsep Pembangunan Sosial Ekonomi

Konsep ini memperkenalkan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Suharto (2010:23) mengartikan Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Todaro dalam Suharto (2010:18) disebutkan bahwa sedikitnya pembangunan baru memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar.
2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa.
3. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa

Perubahan sosial merupakan suatu hal yang dinamis. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sosial diperlukan strategi. Dilihat dari strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Midgley dalam Adi (2003:49) mengemukakan ada tiga strategi besar, yaitu:

1. Pembangunan Sosial melalui Individu (*social development by individuals*), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah pada pendekatan individualis atau perusahaan (*individualist or enterprise approach*).
2. Pembangunan Sosial melalui Komunitas (*social development by communities*), dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*).
3. Pembangunan Sosial melalui Pemerintah (*social development by goverment*). Dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*goverment agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*).

Konsep pembangunan sosial ekonomi dirujuk sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi. Kesejahteraan sosial dan ekonomi adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat.

2.1.14 Penetapan Komponen Sosial Ekonomi

Penetapan komponen-komponen sosial-ekonomi relatif lebih sulit dibanding penetapan komponen fisik-kimia dan biologi karena sifat manusia yang sangat dinamis dan setiap komponen mempunyai hubungan yang erat dan interaksi.

Suratmo (2004:116) mengemukakan beberapa komponen yang selalu dianggap penting untuk diketahui, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pola perkembangan penduduk (jumlah, umur, perbandingan kelamin dan sebagainya) pola perkembangan penduduk pada masa-masa yang lalu sampai sekarang perlu diketahui.
2. Pola perpindahan. Pola perpindahan ini erat hubungannya dengan perkembangan penduduk, pola perpindahan yang perlu diketahui adalah perpindahan ke luar dan masuk ke dalam suatu daerah secara umum, serta pola perpindahan musiman dan tetap.
3. Pola perkembangan ekonomi. Pola perkembangan ekonomi masyarakat ini erat hubungannya pula dengan pola perkembangan penduduk, perpindahan, keadaan sumberdaya alam yang tersedia dan sumber pekerjaan yang tersedia.
4. Penyerapan tenaga kerja. Masalah pengangguran merupakan masalah umum khususnya di Negara berkembang. Negara majupun saat ini tengah mengalami masalah tersebut. Banyaknya pembangunan dapat menyerap tenaga kerja sekitar dan makin besar dampak positifnya, sekalipun harus mengadakan pendidikan khusus. Dampak penyerapan tenaga kerja tidak selalu berupa dampak langsung tetapi juga dampak tidak langsung, artinya timbulnya sumber-sumber pekerjaan yang baru dan ini merupakan komponen berikutnya yang penting.
5. Berkembangnya struktur ekonomi. Struktur ekonomi disini dimaksudkan dengan timbulnya aktifitas perekonomian lain akibat adanya pembangunan tersebut, sehingga merupakan sumber-sumber pekerjaan baru yang sering dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari yang terserap oleh pembangunan. Misalnya hotel, rumah sewa, restoran, warung, transportasi umum, toko-toko dan lain sebagainya.

6. Peningkatan pendapatan masyarakat. Keadaan umum untuk masyarakat di Negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan baik secara langsung atau tidak langsung dari pembangunan akan memberikan dampak yang berarti. Sering ada proyek yang melayani sendiri kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dari pegawainya dan membuat kompleks perumahan dan fasilitas lain sendiri. Kebijakan ini sebenarnya mengurangi dampak positif dari perekonomian masyarakat dan secara tidak sadar membuat tembok pemisah yang tidak terlihat dengan masyarakat setempat, sering juga disebut sebagai masyarakat modern yang bersaing. Hal ini akan memberikan dampak negatif pada interaksi karyawan pada proyek masyarakat setempat.
7. Perubahan lapangan pekerjaan. Dengan timbulnya lapangan pekerjaan baru baik yang langsung atau tidak langsung karena perkembangan struktur ekonomi perlu diperhatikan karena tidak selalu perubahan itu menguntungkan bagi masyarakat secara umum. Misalnya enggan pemuda-pemudi untuk bekerja sebagai petani, mereka lebih memilih bekerja sebagai buruh atau pemberi jasa walaupun penghasilan dan pengeluarannya lebih buruk.
8. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat dan erat pula kaitannya dengan kebiasaan kehidupannya. Misalnya kebiasaan mandi, cuci, dan keperluan sehari-hari untuk makan dan minum yang masih menggunakan air sungai. Maka pencemaran air dari proyek akan langsung mengenai kesehatan masyarakat, begitu halnya dengan pencemaran udara dan kebisingan.
9. Bentuk komponen lain yaitu sumberdaya alam yang sangat langka dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya air, disuatu tempat dimana air sangat sedikit sekali sehingga masyarakat sangat menggantungkan hidupnya pada air tersebut akan merupakan dampak besar bagi masyarakat.

2.1.15 Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Untuk memenuhi kontak sosialnya terhadap masyarakat, perusahaan dihadapkan kepada beberapa tanggung jawab sosial secara simultan. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan

(*stakeholder*). Yang dimaksud pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan kebijakan maupun operasi perusahaan.

Menurut Magnan & Ferrel (2004) dalam Susanto (2007:4) *CSR (Corporate Social Responsibility)* sebagai *a business acts in socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stakeholder interest*. Definisi ini menekankan pada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholders* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.

Carrol (1979) dalam Solihin (2008:21) menjelaskan komponen-komponen tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam empat kategori, yaitu *economic responsibilities, ethical responsibilities, legal responsibilities, dan discretionary responsibilities*. Adapun pengertian dari masing-masing kategori tanggung jawab sosial tersebut sebagai berikut:

- a. *Economic responsibilities*, tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri atas berisi aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.
- b. *Ethical responsibilities*, masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku di mana hukum dan peraturan tersebut pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif. Sebagai contoh, ketaatan perusahaan dalam membayar pajak, menaati undang-undang tenaga kerja dan sebagainya merupakan tanggung jawab hukum perusahaan.

- c. *Legal responsibilities*, masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Menurut Epstein (1989) dalam Solihin (2008:21-22), etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perseorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk menilai sebuah isu dimana penelitian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui pilihan tersebut, individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak, serta memiliki kegunaan atau tidak.
- d. *Discretionary responsibilities*, masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat *filantropis*.

Melalui tanggung jawab sosial yang dijalankan, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki di berbagai bidang, kompetensi yang meningkat ini pada gilirannya diharapkan akan mampu dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan berkorelasi, dalam melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan” ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan bahasan didalam penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk kerangka dasar berpikir dalam melakukan kajian. Dalam hal ini peneliti mengambil dua penelitian sebelumnya sebagai pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Penelitian (skripsi) FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan oleh Shigie Shabetila 2013, dengan judul Analisis Dampak Industrialisasi Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, pada penelitian tersebut peneliti menggunakan sistematika permasalahan dan dampak Industrialisasi yang ditimbulkan yang terjadi di Dea Nagara: Dampak Positif (1) Pendapatan Masyarakat di Desa Nagara, (2) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, (3) Menambah pendapatan asli daerah, (4) Perubahan pola pikir dan mata pencaharian masyarakat, (5) Menambah ilmu pengetahuan, Dampak Positif (1) Pencemaran limbah, (2) Berkurangnya lahan pertanian, (3) Cara hidup masyarakat berubah, (4) Terjadinya arus urbanisasi, (5) Adanya Sifat Konsumerisme. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk lebih

mengetahui Dampak Industrialisasi Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Dampak Industrialisasi Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang adalah mampu menyerap tenaga kerja dari Desa Nagara dan telah terjadi penurunan tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 15,99%, memunculkan para pelaku bisnis dan menengah serta pemanfaatan limbah industri yang menjadi nilai jual, secara tidak langsung telah mengundang para pendatang untuk berkerumun di satu wilayah sehingga terjadi kepadatan penduduk yang akhirnya sering mengakibatkan kemacetan, belum dapat memberukan kontribusi yang signifikan dalam hal penyerapan tenaga kerja di Desa Nagara, hal ini disebabkan SDM yang masih rendahm adanya pencalonan tenaga kerja oleh elit kekuasaan dan adanya diskriminasi dalam perkrutan tenaga kerja, jumlah pengangguran di Desa Nagara masih tergolong cukup banyak karena pengangguran di Desa Nagara tidak terserap oleh industri sebanyak 41,16%, laju industrialisasi di Kecamatan Kibin banyak menimbulkan kerusakan pada struktur bangunan pertanian.

2. Penelitian (skripsi) FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan oleh Vera Mariana 2013, dengan judul Dampak Sosial Ekonomi Penambangan Pasir Laut di Pesisir Pantura Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, pada penelitian tersebut peneliti menggunakan Komponen Sosial Ekonomi menurut Suratmo (2004:116):

(1) Pola Perkembangan Penduduk, (2) Pola Perpindahan, (3) Pola Perkembangan, (4) Penyerapan Tenaga Kerja, (5) Berkembang Struktur Ekonomi, (6) Peningkatan Pendapatan Masyarakat, (7) Perubahan Lapangan Pekerjaan, (8) Kesehatan Masyarakat, (9) Bentuk Komponen Kritis Lainnya (Keberadaan Sumber Daya Alam). Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui dampak-sosial ekonomi penambangan pasir laut di Pesisir Pantai Utara Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial ekonomi penambangan pasir laut di Pesisir Pantai Utara Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yaitu dampak negatif yang terjadi pada komponen kritis sekaligus dibutuhkan masyarakat ialah rumpon ikan dan biota laut yang tenang untuk ikan yang dibutuhkan masyarakat untuk mencukupi kehidupan masyarakat.

Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang di dalamnya mengkaji tentang Bagaimana Dampak Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu diatas adalah tujuan penelitian, dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak yang dihasilkan oleh industri pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Adapun

perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu diatas adalah lokasi tempat penelitian.

2.3 Kerangka Berfikir

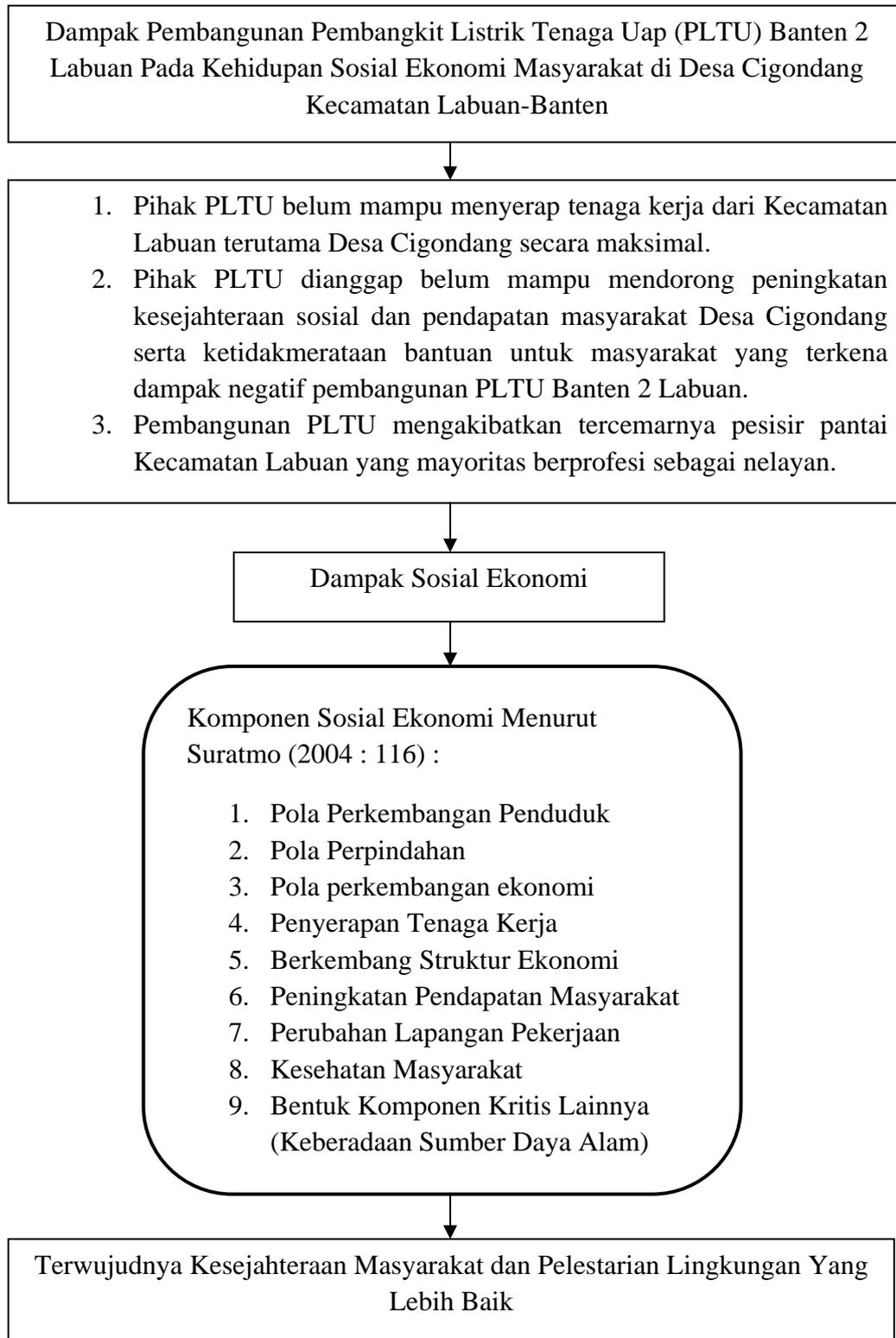
Kerangka berfikir adalah pemahaman yang paling menadasar yang mendukung pemahaman selanjutnya. Suatu tolak ukur yang mudah adalah apakah kita telah memahami pemahaman yang paling mendasar tersebut , atau pertanyaan sebelum itu apakah kita mengetahui pemahaman yang mendasari pemahaman-pemahaman selanjutnya. Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2005:65).

Alur pemikiran penelitian ini terdiri dari permasalahan yang muncul dalam latar belakang masalah yang dirangkum dalam latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah penelitian yang dianalisis dengan penggunaan teori yang relevan dengan penelitian inim untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan penelitian ini. Kerangka berfikir menggambarkan konsep pemelitian mengenai “Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten”, yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian ini, peneliti menggunakan teori komponen sosial ekonomi menurut Suratmo yang teridir dari sembilan indikator, yang diantaranya Pola Perkembangan Penduduk, Pola Perpindahan, Pola Perkembangan Penduduk, Penyerapan Tenaga Kerja, Berkembangnya Struktur Ekonomi, Peningkatan

Pendapatan Masyarakat, Perubahan Lapangan Pekerjaan, Kesehatan Masyarakat, Bentuk Komponen Kritis Lainnya (Keberadaan Sumber Daya Alam). Berikut adalah alur kerangka berfikir penelitian mengenai “Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten”

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



2.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan kajian pustaka dan kajian teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian tentang Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang-Banten belum berjalan secara optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Metodologi berhubungan dengan cara (metode). Metodologi adalah pengetahuan tentang cara-cara (*science of methods*). Menurut Arikunto (2002:136) metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam arti umum dan awam, metodologi biasa digunakan dalam konteks apa saja, misalnya berpikir, metodologi pendidikan, atau metodologi pengajaran. Menurut Irawan (2005:42) metodologi adalah “totalitas cara” untuk meneliti dan menemukan kebenaran. Disebut totalitas cara, sebab metodologi tidak hanya mengacu pada metode penelitian, tetapi juga paradigma, pola pikir, metode pengumpulan dan analisis data, sampai dengan metode penafsiran temuan penelitian itu sendiri.

Dalam penelitian sosial, masalah penelitian, tema, topik, dan judul penelitian berbeda secara kuantitatif maupun kualitatif. Baik substansial maupun materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi dipermukaan. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tidak terbatas. Dalam penelitian Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan

Kabupaten Pandeglang-Banten, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara yang berkaitan dengan Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang-Banten kepada sumber yang terkait dengan penelitian. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan *metodologi kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2006:6) mensintesisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten. Fokus dalam penelitian ini adalah pada Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten, yang ruang lingkupnya adalah bagian kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian menjelaskan tempat (*locus*) penelitian, serta alasan memilih lokasi penelitian tersebut. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan fokus penelitian yang dipilih. Pemilihan lokasi ini, diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru atau sesuai dengan fenomena sosial atau peristiwa dalam penelitian. Jadi mengemukakan lokasi penelitian adalah menyebutkan tempat penelitian misalnya desa, komunitas atau lembaga tertentu dan menjelaskan alasan dipilihnya lokasi tersebut.

Penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penentuan lokasi penelitian ini dengan alasan bahwa mayoritas penduduknya ialah nelayan dan petani, peneliti memilih meneliti pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat karena masyarakat

belum merasakan kesejahteraan dan peluang pekerjaan dirasa belum terserap secara maksimal oleh masyarakat lokal.

3.4 Fenomena yang Diamati

Dalam penelitian ini, fenomena yang diamati adalah dampak pembangunan PLTU Banten 2 Labuan yang berpengaruh kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan.

3.4.1 Definisi Konsep

Dampak (*impact*) adalah akibat dari suatu kegiatan misalnya kegiatan pembangunan. Dampak kegiatan pembangunan ini muncul karena adanya pihak yang diuntungkan (*gainers*) dan pihak yang dirugikan (*loser*) maka penilaian dampak sosial ekonomi juga perlu mengacu pada mereka yang diuntungkan dan dirugikan ini (dari kegiatan pembangunan) karena dampak dari suatu pembangunan itu adalah sebagai akibat faktor eksternalitas. Dapat disimpulkan bahwa dampak sosial ekonomi adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan yang menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dan diuntungkan.

3.4.2 Definisi Operasional

Komponen Sosial Ekonomi Menurut Suratmo (2004 : 116) :

1. Pola Perkembangan Penduduk
2. Pola Perpindahan
3. Pola Perkembangan Ekonomi
4. Penyerapan Tenaga Kerja

5. Berkembang Struktur Ekonomi
6. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
7. Perubahan Lapangan Pekerjaan
8. Kesehatan Masyarakat
9. Bentuk Komponen Kritis Lainnya (Keberadaan Sumber Daya Alam)

3.5 Instrumen Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada kondisi dan konteks masalah yang dikaji, yaitu Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan 2 Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten. Dalam hal ini peneliti merupakan instrumen penelitian yang akan berinteraksi secara langsung dengan responden penelitian, bahkan untuk penggalan data yang menuntut partisipasi peneliti secara terbatas, keterlibatan peneliti menjadi suatu keharusan. Untuk itu teknik penelitian yang digunakan untuk menggali data adalah wawancara , observasi dan studi dokumentasi.

3.6 Informan Penelitian

Husaini,dkk (2003:84) menyatakan bahwa dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak dikenal adanya populasi, melainkan yang dikenal hanya sampel yang terdiri dari responden yang ditentukan secara *purposive* sesuai dengan tujuan penelitian, dimana yang menjadi responden hanya sumber yang dapat

memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat.

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini yaitu mengenai Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan 2 Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten, pemilihan informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu wawancara secara terstruktur kepada informan. Penentuan informannya berdasarkan peran dan fungsi informan tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

Tabel 3.1

Daftar Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Kode Informan	Keterangan
I	Masyarakat: a. Masyarakat Nelayan b. Masyarakat Petani c. Tokoh Masyarakat Desa Cigondang	I ₁₋₁ – I ₁₋₂ I ₁₋₃ – I ₁₋₄ I ₅	<i>Key Informan</i> <i>Key Informan</i> <i>Key Informan</i>
II	Instansi: a. Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pandeglang b. Amu CSR, Humas dan Keamanan PT. Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan c. Sekertaris Desa Cigondang d. LSM	I ₂₋₁ I ₂₋₂ I ₂₋₃ I ₂₋₄	<i>Secondary Informan</i> <i>Key Informan</i> <i>Key Informan</i> <i>Secondary Informan</i>

Sumber : Peneliti 2015

3.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Pengolahan Data

Teknik penelitian yang digunakan untuk menggali data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data terbagi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:

A. Pengamatan/Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan-pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian.

Selain itu, observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Konsep yang dikemukakan oleh Faisal dalam sugiyono (2007:64) yang mengklasifikasikan observasi, yaitu:

- a. Observasi berpartisipasi (*participant observation*)
- b. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*), dan
- c. Observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observation*).

Maka, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terang-terangan, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal

sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan juga peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data penelitian. Sehingga diperlukan data yang akurat lengkap, tajam dan terpercaya.

B. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008:180). Sedangkan menurut Bugin dalam Satori dan Komariah (2001:88) wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode utama (pengamatan).

Selain itu pengertian lain dari wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun

bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang akan dikembangkan oleh sipeneliti sebagai pengecekan anggota.

Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan data yang didasarkan percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian, wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai penelitian. Adapun yang digunakan adalah wawancara terstruktur yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan kriteria informan dan pedoman wawancara yang disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
- b. Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
- c. Menentukan strategi dan taktik berwawancara.
- d. Mempersiapkan pencatat data wawancara.

Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur,

selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat (Nazir, 1985:234-242).

Pada penelitian ini, peneliti telah menyusun pedoman wawancara yang isinya mengenai hal-hal yang nantinya akan dipertanyakan kepada para informan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Adapun secara garis besar, pedoman wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

Variabel	Dimensi	Deskripsi	Informan
Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan	Komponen Sosial-Ekonomi Menurut Suratmo (2004:116)	1. Pola Perkembangan Penduduk	I ₂₋₃ , I ₂₋₄
		2. Pola Perpindahan	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₂₋₄
		3. Pola Perkembangan Ekonomi	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅
		4. Penyerapan Tenaga Kerja	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅
		5. Berkembang Strktur Ekonomi	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅
		6. Peningkatan Pendapatan Masyarakat	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅
		7. Perubahan Lapangan Pekerjaan	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅
		8. Kesehatan Masyarakat	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅
		9. Bentuk Komponen Kritis Lainnya (Keberadaan Sumber Daya Alam)	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅

Sumber : Peneliti 2015

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi *literatur* atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang diteliti.

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan *text books* maupun jurnal ilmiah.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
2. *Recorder*: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan.
3. *Handphone camera*: untuk memotret/mengambil gambar semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian.

Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer ini diambil melalui wawancara (*interview*). Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

(1) Uji Keabsahan Data

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: 1) Mendemostrasikan nilai yang benar, 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. (Moleong, 2006:320) isu dasar dari hubungan keabsahan data pada dasarnya adalah sederhana. Bagaimana peneliti membujuk agar pesertanya (termasuk dirinya) bahwa temuan-temuan penelitian dapat dipercaya. Untuk menguji keabsahan data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota (*member check*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan pengecekan anggota (*member check*).

A. Triangulasi

Moleong (2006 :330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (Prastowo, 2011 :269) membedakan teknik ini menjadi 5 macam yaitu :

1. Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi teknik yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
3. Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
4. Triangulasi penyidik, suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.
5. Triangulasi teori, suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian.

Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

B. Member Check

Selain itu peneliti pun melakukan *membercheck*, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Selain itu, *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Setelah *membercheck* dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan *membercheck* dalam Moelong (2005: 276).

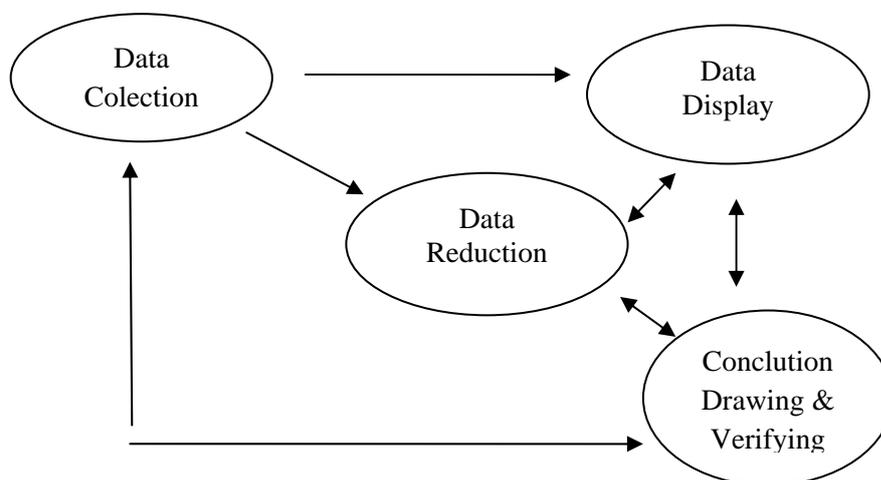
3.7.2 Analisis Data

Proses analisa data dilakukan secara terus menerus sejak awal data dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis data dan interpretasi. Mengingat ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka analisis dilakukan sejak data pertama sampai penelitian berakhir.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Dalam menganalisis selama dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses datanya mencakup *data dollection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing atau verification* (penarikan kesimpulan). Berikut gambar proses tersebut:

Gambar 3.1

Siklus Teknis Analisis Data Menurut Miles dan Huberman



Sumber : Miles dan Huberman, 2009:16

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

2. Data Reduction (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011: 242). Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data dengan demikian merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Prastowo, 2011:243). Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang terlihat aneh, asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya yang semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam suatu bentuk yang padu (Prastowo, 2011:244). Kemudian penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. *Conclusion Drawing /verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu,

dalam penjelasan Sugiyono (Prastowo, 2011:250) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang terpercaya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan (Sugiyono, 2005:148). Berikut ini merupakan jadwal penelitian Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan 2 Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang :

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu 2014-2015											
		Okt 2014	Nov 2014	Des 2014	Jan 2015	Feb 2015	Mar 2015	Apr 2015	Mei 2015	Jun 2015	Juli 2015	Agust 2015	Sept 2015
1	Pengajuan Judul	■											
2	Perizinan dan obersvasi awal		■	■									
3	Penyusunan proposal Skripsi		■	■	■	■	■	■					
4	Seminar proposal skripsi								■				
5	Proses pencarian data dilapangan								■	■			
6	Pengolahan data								■	■			
7	Penyusunan laporan hasil penelitian									■	■	■	■
8	Sidang laporan skripsi									■	■	■	■
9	Revisi laporan skripsi									■	■	■	■

Sumber: Peneliti 2015

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kecamatan Labuan, gambaran umum Desa Cigondang, gambaran umum Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan. Hal tersebut dipaparkan dibawah ini:

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Labuan

Kecamatan Labuan secara administrasi terdiri dari 9 desa, 70 rukun waga (RW) dan 224 rukun tetangga (RT), Desa Sukamaju merupakan desa terkecil dengan luas 0,6 km², sedangkan desa Banyubiru merupakan desa terbesar dengan luas 6,1 km².

Wilayah kecamatan Labuan secara geografis terletak antara 06°13' – 06°24' Lintang Selatan dan 105°49' – 105°54' Bujur Timur dengan luas daerah 15.65 km². Kecamatan Labuan berjarak 41,1 km dari Kabupaten Pandeglang dan memiliki batas administrasi, sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Carita
- Selatan : Kecamatan Pagelaran
- Barat : Selat Sunda
- Timur : Kecamatan Cikedal

Bentuk tofografi wilayah Kecamatan Labuan pada umumnya merupakan sebagian daratan seperti Desa Rancateureup, Kalanganyar, Labuan, Banyumekar, Banyubiru serta pesisir pantai seperti desa Cigondang, Sukamaju, Teluk dan Caringin dengan ketinggian rata-rata dibawah 50m dari permukaan laut (dpl), sehingga sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan disamping jenis pekerjaan lainnya.

1. Iklim

Kondisi iklim di Kecamatan Labuan diklasifikasikan ke dalam iklim type A yaitu 0,3% dan type B yaitu 14,3%-33,3%. Curah hujan rata-rata tahunan adalah sebesar 1.814 mm, sedangkan hari hujan rata-rata tahunan sebesar 101 hari. Musim hujan pada umumnya jatuh pada bulan Januari, Februari, Maret, November dan Desember dengan curah hujan rata-rata 374 mm/bulan. Musim kemarau jatuh pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober dengan curah hujan rata-rata 209mm/bulan.

2. Topografi

Bentuk topografi wilayah Kecamatan Labuan umumnya merupakan daerah dataran Desa Cigondang, Sukamaju, Labuan, Kalanganyar, Teluk, Caringin, Banyubiru, Banyumekar, Rancateureup dengan ketinggian rata-rata dibawah 50m dari permukaan laut (dpl).

3. Wilayah Administrasi

Kecamatan Labuan terdiri dari 9 Desa dengan jumlah Dusun 37, Rukun Warga (RW) 72 dan Rukun Tetangga (RT) 228. Luas wilayah Desa di Kecamatan Labuan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1

Wilayah Administrasi Kecamatan Labuan

No	Desa	Luas (Km ²)	Presentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Cigondang	0,98	6,26
2	Sukamaju	1,84	11,76
3	Rancateureup	1,80	11,50
4	Kalanganyar	0,99	6,33
5	Labuan	0,97	6,20
6	Teluk	0,97	6,20
7	Banyumekar	2,35	15,02
8	Banyubiru	2,55	16,29
9	Caringin	3,20	20,45
	Jumlah	15,65	100,00

Sumber: Renstra Kecamatan Labuan 2011-2016

4. Penduduk

Penduduk Kecamatan Labuan yaitu berjumlah 54.447 jiwa, yaitu terdiri dari :

1. Laki-laki : 28.295 Jiwa

2. Perempuan : 26.152 Jiwa

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

No	Desa	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Cigondang	4.527	3.980
2	Sukamaju	1.605	1.565
3	Rancateureup	1.388	1.269
4	Kalanganyar	3.737	3.385
5	Labuan	5.863	5.675
6	Teluk	5.826	5.342
7	Banyumekar	927	821
8	Banyubiru	1.054	1.014
9	Caringin	3.368	3.101

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang 2012

5. Visi dan Misi Kecamatan

A. Mewujudkan Kecamatan Labuan Sebagai Daerah Pertanian dan Wisata Unggulan pada Tahun 2016.

B. Misi

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Komoditas Unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD.
2. Mewujudkan Pembangunan di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

3. Pembangunan Aparatur Pemerintah di Kecamatan Labuan sehingga dapat bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat.
 4. Melestarikan Budaya Gotong Royong sebagai wujud partisipasi masyarakat terhadap Program Pembangunan.
6. Keadaan Pendidikan, Kesehatan

Statistik pendidikan Labuan terdiri dari 30 Sekolah Dasar sederajat, 6 Sekolah Menengah Pertama sederajat, 9 Sekolah Menengah Atas sederajat. Untuk lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Jumlah Sekolah di Kecamatan Labuan

Sekolah	Jumlah
SD Sederajat	30
SMP Sederajat	6
SMA Sederajat	9

Sumber: data Kecamatan Labuan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan mendasar manusia. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan sangatlah penting. Di kecamatan Labuan berbagai kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu telah tersedia. Data lengkapnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Labuan

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Puskesmas	1
Puskesmas Pembantu	2
Puskesmas Keliling	1
Posyandu Lintas Desa	1
Posyandu	66

Sumber: data Kecamatan Labuan

7. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Tugas Pokok :

1. Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Kecamatan.

Fungsi Kecamatan :

1. Penyusunan perencanaan
2. Perumusan kebijakan teknis
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Kecamatan
6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.1.2 Gambaran Umum Desa Cigondang

Desa Cigondang merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Keberadaan Desa Cigondang merupakan Desa yang strategis dalam pembudidayaan pertanian dan perikanan, sehingga Desa Cigondang mengandalkan sektor pertanian dan perikanan tangkap sebagai sumber pendapatan masyarakat secara turun-temurun. Dalam daftar isian potensi Desa dan Kelurahan, Desa Cigondang memiliki 2.115 Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5

Jumlah Sumber Daya Manusia Desa Cigondang

Sumber Daya Manusia	Jumlah
Laki-laki	4.498 orang
Perempuan	3.998 orang
Jumlah Total	8.496 orang

Sumber: Data Profil Desa dan Kelurahan 2013

Mata pencaharian pokok masyarakat Desa Cigondang sebagian besar adalah buruh tani dan nelayan dengan jumlah 225 orang, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 16 orang, Montir 5 orang, POLRI 3 orang, Pensiun PNS/TNI/POLRI 27 orang, pengacara 1 orang, dukun kampung terlatih 2 orang, dosen swasta 3 orang dan karyawan perusahaan pemerintah 3 orang. Adapun batas wilayah Desa Cigondang sebagai berikut:

Tabel 4.6
Batas wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Labuan	Labuan
Sebelah Selatan	Selat Sunda	Labuan
Sebelah Timur	Sukamaju	Labuan
Sebelah Barat	Selat Sunda	Labuan

Sumber: Data Profil Desa dan Kelurahan 2013

4.1.3 Gambaran Umum PLTU Banten 2 Labuan

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 dengan kapasitas 300MW (Mega Watt) diresmikan pada tanggal 28 Januari 2010. PLTU Banten dengan total kapasitas 2 x 300 Mega Watt (MW) berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. PLTU Banten 2 Labuan dioperasikan oleh Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten 2 Labuan yang di kelola oleh PT. Indonesia Power setelah diserahkan terimakan oleh Chengda sebagai pengembang pembangkit tersebut. PLTU Banten 2 Labuan ini merupakan bagian dari proyek percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW yang dilaksanakan oleh PLN berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 tanggal 05 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama proyek percepatan PLTU 10.000 MW.

A. Visi dan Misi PLTU Banten 2 Labuan

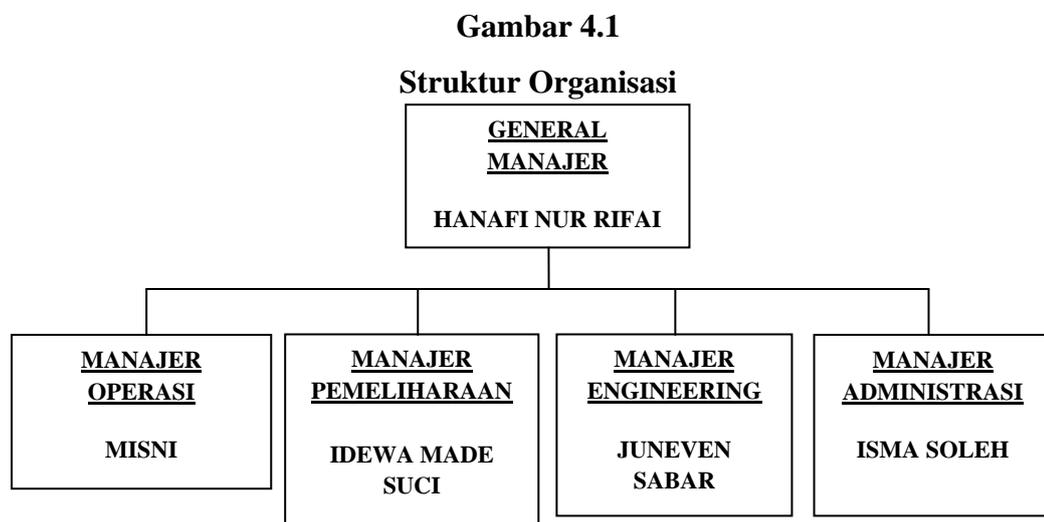
1. Visi

Terdepan dalam penyediaan energi listrik berbagai jenis pembangkit dengan kinerja *excellent* melalui proses prima oleh SDM Profesional yang menjamin terwujudnya *longrun sustainable company*

2. Misi

Menyelenggarakan bisnis di bidang Pengangkitan Tenaga Listrik dan Jasa yang berkaitan dan bersahabat dengan Lingkungan (ISO 14001:2004), K3 (SMK3 PP. 50 Tahun 2012, OHSAS 18001 : 2007), ISO 28000 : 2007, Sistem Manajemen Pengamanan (PERKAPOLRI No.24/2007), PAS 55 2011 serta *Malcolm Baldrige*.

B. Struktur Organisasi PLTU Banten 2 Labuan :



Sumber: *Company Profile* PLTU Banten 2 Labuan

4.2 Deskripsi Data

Data yang akan disajikan dibawah ini merupakan data yang sudah melalui proses reduksi. Deskripsi data menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Komponen Sosial Ekonomi Suratmo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan dokumentasi.

Berdasarkan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep *Miles* dan *Huberman*, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya : reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*conclusions drawung/verifying*).

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu , yaitu:

- a) Kode Q1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
- b) Kode I1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan Informan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (*data display*). Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matrik, hubungan antara kategori, *network*, *flowchart* dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks narasi. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan

(*verification*) setelah data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut data dijadikan jawaban atas masalah penelitian.

Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis pada Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang-Banten. Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dianggap sesuai dengan permasalahan dan kerangka berfikir yang telah diuraikan sebelumnya.

4.2.1 Data Informan Penelitian

Data informan penelitian menjelaskan deskripsi informan yang menjadi sumber data utama dalam penelitian mengenai Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang-Banten. Deskripsi informan penelitian meliputi nama informan, usia, dan pekerjaan atau jabatan dari informan penelitian tersebut. Sesuai dengan pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informan penelitian yang tepat dan kredibel. Berikut ini daftar deskripsi informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

Tabel 4.7
Daftar Spesifikasi Fungsi dan Peran Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Usia	Pekerjaan/Jabatan	Kode Informan
1.	Sopian	42	Nelayan Desa Cigondang Kecamatan Labuan	I ₁₋₁
2.	Sumah	62	Nelayan Desa Cigondang Kecamatan Labuan	I ₁₋₂
3.	Juhariah	65	Petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan	I ₁₋₃
4.	Jali	67	Petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan	I ₁₋₄
5.	Edi Arumsyah	56	Tokoh masyarakat Desa Cigondang	I ₂₋₁
6.	Asep Bungamin	35	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Lab Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang	I ₂₋₂
7.	Lilis Nurlailah	26	Amu CSR, Humas dan Keamanan Indonesia Power (PLTU Banten 2 Labuan).	I ₂₋₃
8.	Muhaemin	56	Sekertaris Desa Cigondang Kecamatan Labuan	I ₂₋₄
9.	TB. Aripudin	43	LSM Desa Cigondang Kecamatan Labuan	I ₂₋₅

Sumber: Peneliti, 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui deskripsi dari masing-masing informan dalam penelitian mengenai “Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten”. Informan di atas merupakan informan peneliti anggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan mengenai dampak sosial ekonomi di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten. Hal ini ditujukan untuk dapat mencapai hasil penelitian yang sesuai dan kredibel dalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan.

4.2.2 Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian merupakan pemaparan hasil penelitian yang didapatkan dengan melakukan wawancara dengan 9 (sembilan) informan penelitian yang dianggap dapat mewakili dan memberikan data terhadap Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten. Adapun dalam menganalisis data hasil penelitian lapangan dengan menggunakan teori komponen sosial ekonomi Suratmo (2004:116) untuk mengukur indikator sosial-ekonomi masyarakat dapat diukur oleh setidaknya 9 indikator, yang diantaranya

1. Pola perkembangan penduduk (jumlah, umur, perbandingan kelamin dan sebagainya) pola perkembangan penduduk pada masa-masa yang lalu sampai sekarang perlu diketahui.
2. Pola perpindahan. Pola perpindahan ini erat hubungannya dengan perkembangan penduduk, pola perpindahan yang perlu diketahui adalah perpindahan ke luar dan masuk ke dalam suatu daerah secara umum, serta pola perpindahan musiman dan tetap.
3. Pola perkembangan ekonomi. Pola perkembangan ekonomi masyarakat ini erat hubungannya pula dengan pola perkembangan penduduk, perpindahan, keadaan sumberdaya alam yang tersedia dan sumber pekerjaan yang tersedia.
4. Penyerapan tenaga kerja. Masalah pengangguran merupakan masalah umum khususnya di Negara berkembang. Negara maju pun saat ini tengah mengalami masalah tersebut. Banyaknya pembangunan dapat menyerap tenaga kerja sekitar dan makin besar dampak positifnya, sekalipun harus mengadakan pendidikan khusus. Dampak penyerapan tenaga kerja tidak selalu berupa dampak langsung tetapi juga dampak tidak langsung, artinya timbulnya sumber-sumber pekerjaan yang baru dan ini merupakan komponen berikutnya yang penting.
5. Berkembangnya struktur ekonomi. Struktur ekonomi disini dimaksudkan dengan timbulnya aktifitas perekonomian lain akibat adanya pembangunan tersebut, sehingga merupakan sumber-sumber pekerjaan

baru yang sering dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari yang terserap oleh pembangunan. Misalnya hotel, rumah sewa, restoran, warung, transportasi umum, toko-toko dan lain sebagainya.

6. Peningkatan pendapatan masyarakat. Keadaan umum untuk masyarakat di Negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan baik secara langsung atau tidak langsung dari pembangunan akan memberikan dampak yang berarti. Sering ada proyek yang melayani sendiri kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dari pegawainya dan membuat kompleks perumahan dan fasilitas lain sendiri. Kebijakan ini sebenarnya mengurangi dampak positif dari perekonomian masyarakat dan secara tidak sadar membuat tembok pemisah yang tidak terlihat dengan masyarakat setempat, sering juga disebut sebagai masyarakat modern yang bersaing. Hal ini akan memberikan dampak negatif pada interaksi karyawan pada proyek masyarakat setempat.
7. Perubahan lapangan pekerjaan. Dengan timbulnya lapangan pekerjaan baru baik yang langsung atau tidak langsung karena perkembangan struktur ekonomi perlu diperhatikan karena tidak selalu perubahan itu menguntungkan bagi masyarakat secara umum. Misalnya enggan pemuda-pemudi untuk bekerja sebagai petani, mereka lebih memilih bekerja sebagai buruh atau pemberi jasa walaupun penghasilan dan pengeluarannya lebih buruk.
8. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat dan erat pula kaitannya dengan kebiasaan kehidupannya. Misalnya kebiasaan mandi, cuci, dan keperluan sehari-hari untuk makan dan minum yang masih menggunakan air sungai. Maka pencemaran air dari proyek akan langsung mengenai kesehatan masyarakat, begitu halnya dengan pencemaran udara dan kebisingan.
9. Bentuk komponen lain yaitu sumberdaya alam yang sangat langka dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya air, disuatu tempat dimana air sangat sedikit sekali sehingga masyarakat sangat menggantungkan hidupnya pada air tersebut akan merupakan dampak besar bagi masyarakat.

4.2.2.1 Pola Perkembangan Penduduk

Berdasarkan data kecamatan Labuan dalam angka 2012 pada tahun 2011, Desa Cigondang memiliki jumlah penduduk sebesar 8.507 jiwa yaitu laki-laki sebanyak 4.527 jiwa dan perempuan sebanyak 3.980 jiwa, selanjutnya pada tahun 2012 sebesar 8.016 jiwa dengan penduduk laki-laki

sebesar 4.235 jiwa dan perempuan sebesar 3.781 jiwa. Menurut jumlah penduduk menurut daftar isian tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan pada tahun 2013 Desa Cigondang memiliki jumlah penduduk sebesar 8.382 jiwa dari total 4.435 jiwa laki-laki dan 3.947 jiwa perempuan. Berikut merupakan kelompok umur penduduk Desa Cigondang pada tahun 2013 yaitu:

Tabel 4.8
Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2013

No	Kelompok Umur	Komposisi Penduduk	
		Laki-laki	Perempuan
1	0-4	450	429
2	5-9	461	430
3	10-14	422	397
4	15-19	322	295
5	20-24	315	274
6	25-29	262	234
7	30-34	299	271
8	35-39	235	252
9	40-44	281	264
10	45-49	271	243
11	50-54	314	281
12	55-59	289	240
13	60-64	253	164
14	65-69	159	105
15	70 ke atas	102	68
Jumlah		4.435	3.947

Sumber: Data Profil Desa dan Kelurahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa usia terbanyak adalah kelompok usia 5-9 tahun diikuti oleh kelompok usia produktif masyarakat Desa Cigondang yang memiliki perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

Perbandingan jenis kelamin (*sex ratio*) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki-laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100 \\
 &= \frac{4.435}{3.947} \times 100 \\
 &= 112,3638
 \end{aligned}$$

Maka setiap 100 orang penduduk perempuan Desa Cigondang terdapat 112,4 penduduk laki-laki. Dengan kata lain masyarakat Desa Cigondang memiliki perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yakni 100 : 112, yang diantaranya masih tetap terbanyak penduduk laki-laki. Serta memiliki angka ketergantungan (*dependency ratio*) sebagai ukuran sebuah wilayah desa dapat dikatakan maju, berkembang dan tidak adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{P_{0-14} + P_{70}}{P_{15-69}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.589 + 170}{5.623} \times 100\% \\
 &= \frac{2.759}{5.623} \\
 &= 0,49066 \\
 &= 49,066\%
 \end{aligned}$$

Dimana maka setiap 100 orang penduduk produktif menanggung beban sebesar 49 orang tidak produktif.

Dapat disimpulkan angka beban tanggungan usia produktif memiliki nilai cukup besar dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk, baik keluarga maupun sanak saudara. Serta memiliki kepadatan penduduk menurut aritmatika sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah penduduk (jiwa)}}{\text{Luas wilayah}} \\ &= \frac{8,382 \text{ jiwa}}{0,98 \text{ km}^2} \\ &= 8,553,061 \end{aligned}$$

Maka kepadatan penduduk Desa Cigondang per kilometer persegi adalah 8.553 jiwa.

Perkembangan penduduk dapat juga dilihat dari tingkat pendidikan yang telah disandang masyarakat Desa Cigondang, seperti yang terpapar dalam tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.9
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Cigondang

No	Pendidikan	Jumlah
1	Buta Aksara	687
2	Tidak Tamat SD	554
3	Tamat SD/Sederajat	1.848
4	SLTP/Sederajat	1.671
5	Tidak Tamat SLTP	901
6	SLTA/Sederajat	987
7	Diploma I	204
8	Diploma II	175
9	Diploma III	115
10	Strata I	17
11	Strata II	-
12	Strata III	-
Total		7.150

Sumber: Data Profil Desa dan Kelurahan

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang buta aksara sebanyak 687 orang, masyarakat yang tidak tamat SD/ sederajat sebanyak 554 orang dan yang tidak tamat SLTP/ sederajat sebanyak 901 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Cigondang belum bisa dikatakan sejahtera, karena kesejahteraan masyarakat dapat tercermin pada tingkat keberhasilan pendidikan masyarakat, seperti yang diucapkan oleh I₂₋₃ selaku sekretaris Desa Cigondang, bahwa:

“Perkembangan masyarakat desa Cigondang sekarang dapat dikatakan masyarakat yang berkembang, karena sebagian masyarakat yang berpindah ke Desa Cigondang mayoritas berprofesi sebagai pedagang, namun banyak masyarakat Desa Cigondang yang yang tidak lulus SD

dan berprofesi sebagai nelayan”. (Wawancara dengan I₂₋₃, pada tanggal 09 Juli 2015, di Kantor Desa Cigondang, pukul: 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan I₂₋₃ dapat diketahui bahwa, masyarakat Desa Cigondang termasuk masyarakat yang sudah berkembang jika dilihat dari profesi masyarakat yang berpindah ke Desa Cigondang sebagian besar bekerja sebagai pedagang kecil. Namun hal berbeda dapat dilihat pada tabel 4.9 bahwa masyarakat yang tidak lulus SD/ sederajat sebanyak 554 orang, masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikannya karena keinginan untuk bekerja sebagai nelayan lebih tinggi jika dibandingkan dengan keinginan untuk melanjutkan pendidikannya seperti anak-anak yang lainnya, hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomi yang dialami oleh para nelayan di Desa Cigondang. Berdasarkan hasil wawancara dengan I₂₋₃ bahwa masyarakat Desa Cigondang yang tidak lulus SD sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Masyarakat Desa Cigondang yang bekerja sebagai nelayan memang sudah bekerja secara turun temurun, karena tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup jika ingin bekerja di perusahaan. Hal berbeda disampaikan oleh I₁₋₁ Selaku masyarakat nelayan Desa Cigondang, bahwa :

“Untuk perkembangan penduduk saya kurang tau, tetapi jika perbedaan dengan yang dulu dan yang sekarang lebih baik yang dulu,. Rata-rata nelayan disini lulusan SD dan ada juga yang tidak tamat SD karena tidak punya biaya”. (Wawancara dengan I₁₋₁ pada tanggal 23 Juli 2015, di pesisir pantai Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 10.50 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan I₁₋₁ bahwa, masyarakat merasakan perkembangan penduduk jauh lebih baik dahulu jika dibandingkan dengan yang sekarang, karena masyarakat sekitar mengeluhkan bahwa tempat mencari ikan sekarang sudah dibangun peroyek PLTU Banten 2 Labuan dan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan tradisional harus mencari ikan ke tempat yang jauh dan tidak terjangkau dengan potensi ikan lebih banyak lagi agar hasil tangkapan ikan para nelayan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan kebutuhan untuk pendidikan anak-anaknya, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan di Desa Cigondang sebagian besar pendidikan terakhirnya adalah SD/ sederajat dan ada beberapa yang tidak tamat SD, karena tidak mempunyai biaya untuk pendidikan. Tidak ada perubahan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Cigondang dan sekitarnya dalam hal perkembangan penduduk dari sebelum adanya PLTU Banten 2 Labuan dengan sesudah adanya PLTU Banten 2 Labuan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I₁₋₃ selaku masyarakat Petani Desa Cigondang, yaitu bahwa:

“Ya penduduk mah banyak, saya mah ga tau ya masyarakat disini mah perkembangannya saya rasa sih belum berkembang neng karena banyak masyarakat yang disini kehidupannya masih kaya gitu aja, apalagi para nelayan sekarang cari ikan juga harus ke tempat yang jauh”. (Wawancara dengan I₁₋₃ pada tanggal 23 Juli 2015, di saung petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 11.41 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₃ bahwa masyarakat Desa Cigondang belum ada perkembangan, karena masih banyak masyarakat terutama yang bekerja sebagai nelayan harus mencari ikan ke tempat yang lebih jauh dengan potensi ikan yang lebih banyak, karena pesisir pantai Desa

Cigondang dan sekitarnya sudah tercemar oleh limbah panas yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan. Pernyataan diatas diperkuat oleh I₁₋₅ selaku tokoh masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan :

“Tidak, belum bisa dikatakan berkembang, nelayan kecil mati total, karena pada waktu pembangunan PLTU ada perjanjian dengan nelayan udang kecil namun ternyata sampai saat ini belum ada realisasinya.” (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₅ dan perhitungan perbandingan jenis kelamin, angka ketergantungan, dan angka kepadatan penduduk di atas, dapat diketahui bahwa Desa Cigondang memiliki kepadatan penduduk di atas rata-rata yakni 8.553 perkilo meter persegi, memiliki ketergantungan pada penduduk usia produktif sebanyak 49,066% yang menunjukkan bahwa Desa Cigondang belum bisa dikatakan Desa yang berkembang. Bisa dilihat pada tabel 4.10 bahwa masyarakat yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 210 orang. Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan saat ini merasa kesulitan untuk mencari ikan akibat dari pembangunan PLTU Banten 2 Labuan. selanjutnya I₁₋₅ menjelaskan juga bahwa :

“Jangkauan untuk mencari ikan yang biasanya sekian mill menggunakan motor 2 PK ternyata sekarang tidak bisa harus mencapai 5 PK sampai 10 PK. Akhirnya usaha nelayan pun tidak berjalan lagi, kalau tidak ada realisasinya mau mencukupi kebutuhan hidupnya bagaimana? PLTU mengadakan bantuan tapi tidak tepat sasaran. Jadi yang mendapatkan bantuan tersebut bukan nelayan kecil tetapi pemberian tersebut diberikan kepada nelayan pendatang, saya dengar dua perahu namun sampai sekarang rusak. Kalau tidak ada perubahan, kalau saya dengar tahun 2015 katanya mau mulai pembangunan proyek perluasan PLTU lagi di lahan pertanian tapi sampai sekarang belum.” (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal

Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Kini nelayan kecil jika ingin mencari ikan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli bahan bakar bagi perahu para nelayan. Saat ini nelayan kecil membutuhkan perahu dan mesin berkapasitas besar yang dapat digunakan untuk mencari ikan ke tempat yang jauh dan tidak terjangkau dengan potensi ikan yang lebih banyak, karena ikan di pesisir pantai Desa Cigondang sudah semakin langka. Adapun bantuan yang diberikan PLTU Banten 2 Labuan kepada masyarakat Desa Cigondang dan sekitarnya yaitu pemberian 2 kapal yang berkapasitas besar, namun kapal tersebut diberikan kepada nelayan yang menggunakan kapal yang berkapasitas besar bukan diberikan kepada nelayan yang menggunakan kapal yang berkapasitas kecil. Jadi pemberian bantuan kapal tersebut belum tepat sasaran. Desa Cigondang merupakan salah satu Desa yang memiliki ketergantungan pada sumber daya yang tersedia untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan guna untuk keberlangsungan hidup. Dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Cigondang merupakan penduduk yang belum berkembang.

4.2.2.2 Pola Perpindahan Penduduk

Pola ini erat hubungannya dengan perkembangan penduduk, pola perpindahan yang perlu diketahui adalah pola perpindahan keluar dan masuk dalam suatu daerah secara umum serta pola perpindahan musiman dan tetap, dan angka dominasi perpindahan penduduk pada wilayah tertentu untuk menunjang kehidupan ekonomi dan diakibatkan oleh adanya sebab akibat sosial ekonomi. Sesuai data daftar isian potensi Desa dan Kelurahan pada

tahun 2012 bahwa jumlah penduduk Desa Cigondang sebanyak 8.016 jiwa dengan jumlah laki laki sebanyak 4.235 jiwa dan perempuan sebanyak 3.781 jiwa dan mengalami peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2013 yaitu sebanyak 8.382 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 4.435 jiwa dan perempuan sebanyak 3.947 jiwa. Dengan kata lain bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk karena banyak masyarakat yang berpindah ke dalam Desa Cigondang untuk menetap dengan membuka usaha baru dan ada tinggal dalam waktu sementara seperti nelayan yang berasal dari luar Kecamatan Labuan dan karyawan PLTU yang berdomisili dari luar Kecamatan Labuan.

Perpindahan penduduk Desa Cigondang pada umumnya memiliki pola perpindahan tetap. Seperti yang dikatakan oleh I₂₋₃ selaku sekretaris Desa Cigondang: “Sebagian besar penduduk yang berpindah ke Desa Cigondang ialah sebagai penduduk tetap”. (Wawancara dengan I₂₋₃, pada tanggal 09 Juli 2015, di Kantor Desa Cigondang, pukul: 10.30 WIB). Berdasarkan hasil wawancara dengan I₂₋₃ bahwa, penduduk yang berpindah ke dalam Desa Cigondang adalah menetap. Sebagian besar masyarakat yang berpindah ke Desa Cigondang hanya ingin mencari peluang usaha baru seperti berdagang dan bekerja sebagai tukang becak. Namun jika tidak mendapatkan peluang usaha baru, maka masyarakat tersebut berpindah lagi ke tempat lain yang memiliki peluang usaha yang tinggi. Pernyataan diatas dibenarkan oleh I₁₋₁ selaku masyarakat nelayan Desa Cigondang Kecamatan Labuan :

“Jika masalah kewarganegaraan itu keluar masuk, yang dari sini banyak yang keluar dan yang dari luar banyak yang kesini, dan masyarakat Desa Cigondang memiliki pola perpindahan yang tetap, masyarakat yang pindah ke Desa Cigondang biasanya permanen”. (Wawancara

dengan I₁₋₁ pada tanggal 23 Juli 2015, di pesisir pantai Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 10.50 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₁ bahwa, banyak masyarakat yang berpindah keluar dan ke dalam Desa Cigondang, biasanya masyarakat yang pindah ke dalam Desa Cigondang adalah menetap. Hal senada diungkapkan oleh I₁₋₂ selaku masyarakat nelayan Desa Cigondang Kecamatan Labuan : “Pola perpindahannya yaitu menetap dan banyak masyarakat yang pindah ke dalam Desa Cigondang”. (Wawancara dengan I₁₋₂ pada tanggal 23 Juli 2015, di pesisir pantai Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 11.08 WIB). Hasil wawancara dengan I₁₋₂ yaitu bahwa, banyak masyarakat dari luar Desa Cigondang yang berpindah ke dalam Desa Cigondang dan sebagian besar yang berpindah ke dalam Desa Cigondang adalah menetap. Pernyataan diatas dibenarkan oleh I₁₋₃ selaku masyarakat petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan :

“Kalau masyarakat disini saya rasa bertambah, banyak masyarakat yang menjual tanahnya dan berpindah ke daerah sini, kebanyakan masyarakat yang berpindah ke daerah Desa Cigondang mengontrak rumah dan bertempat tinggal di atas tanah wakaf, dan banyak masyarakat yang pindah ke daerah sini adalah menetap”.(Wawancara dengan I₁₋₃ pada tanggal 23 Juli 2015, di saung petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 11.41 WIB).

Dari wawancara dengan masyarakat I₁₋₃ bahwa, masyarakat Desa Cigondang semakin bertambah, kebanyakan masyarakat yang berpindah ke Desa Cigondang adalah menetap dan biasanya masyarakat yang berpindah keluar Desa Cigondang hanya sementara dan kembali lagi ke Desa Cigondang. Ada beberapa dari masyarakat yang pindah karena tanah yang mereka miliki telah dijual dan masyarakat yang tidak memiliki tanah lebih

banyak mengontrak di Desa Cigondang diatas tanah wakaf. Masyarakat yang menjual tanahnya karena tuntutan ekonomi dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, adapun masyarakat yang menjual lahan pertaniannya kepada pihak PLTU karena hasil pertaniannya yang kering dan tidak bagus akibat musim kemarau dan dampak panas yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan. Adapaun pernyataan berbeda dikatakan oleh I₁₋₅ selaku tokoh masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan :

“Kalau perpindahan di Desa Cigondang keluar dan masuk, kadang menetap kadang mengontrak, kalau tidak menemukan pekerjaan di daerah Desa Cigondang masyarakat tersebut berpindah lagi keluar Desa Cigondang, biasanya yang berpindah ke dalam Desa Cigondang yaitu membuat sesuatu, seperti membuat suatu percobaan jika tidak berjalan masyarakat tersebut berpindah tempat tinggal lagi di luar Desa Cigondang”. (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Dari pernyataan diatas dengan I₁₋₅ yaitu bahwa, masyarakat yang berpindah ke Desa Cigondang ada yang tinggal dalam jangka waktu yang lama kemudian menetap menjadi warga Desa Cigondang dan ada yang berpindah bersifat sementara misalnya dalam kurun waktu beberapa bulan saja seperti nelayan yang berasal dari Indramayu yang mencari ikan ke daerah Kecamatan Labuan lalu bertempat tinggal sementara di Desa Cigondang. Selain itu masyarakat yang berpindah sementara biasanya masyarakat tersebut mencari peluang usaha dan membuka usaha baru di Desa Cigondang, seperti pedagang kecil yang menjual kebutuhan rumah tangga dan menjual makanan hasil olahan rumah tangga, misalnya seperti menjual nasi uduk, gorengan dan lain sebagainya, namun jika usahanya tidak berjalan dengan

baik maka masyarakat tersebut berpindah lagi keluar Desa Cigondang dan mencari peluang usaha yang baru, selain itu karyawan PLTU yang berasal dari luar Desa Cigondang bertempat tinggal untuk sementara di Desa Cigondang selama karyawan tersebut bekerja di PLTU Banten 2 Labuan, sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar yang memiliki kontrakan di Desa Cigondang. Selanjutnya I₁₋₅ juga menjelaskan bahwa:

“Ada nelayan yang berpindah ke dalam Desa Cigondang hanya musim bulan besar, jika tidak menghasilkan hasil tangkapan nelayan tersebut pulang ke daerahnya masing-masing, banyak nelayan yang berasal dari Indramayu, pola perpindahannya musiman tidak menetap, ada orang Tasik orang Garut dan orang dari mana saja yang pindah ke dalam Desa Cigondang jika usahanya berjalan dengan lancar maka masyarakat tersebut tinggal menetap di Desa Cigondang, namun jika usahanya tidak berjalan dan bangkrut maka masyarakat tersebut berpindah lagi keluar Desa Cigondang, biasanya yang pindah ke Desa Cigondang ada yang berjualan cireng, berdagang dipasar, ada yang berjualan kupat, dan kebanyakan sebagai pedagang.” (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Dari hasil wawancara dengan I₁₋₅ dapat diketahui bahwa terdapat masyarakat yang berpindah ke Desa Cigondang hanya musim tertentu saja, seperti para nelayan yang berasal dari daerah Tasik dan Garut hanya bertempat tinggal sementara di Desa Cigondang, karena banyak nelayan yang berasal dari luar Desa Cigondang mencari ikan ke tempat yang potensi ikannya lebih banyak di daerah Kecamatan Labuan dan sekitarnya. Hal yang senada dikatakan oleh I₁₋₄ bahwa: “Dari sini kesitu ada, dari luar ke dalam juga banyak, hampir penuh dan hampir padat, pola perpindahannya ya menetap” (Wawancara dengan I₁₋₄ pada tanggal 23 Juli 2015, di saung petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 11.41 WIB). Dari hasil

wawancara dengan I₁₋₄ yaitu masyarakat Desa Cigondang sebagian ada yang hanya berpindah RT (Rukun Tetangga) saja dan mengontrak rumah. Jika dilihat dari beberapa hasil wawancara diatas bahwa Desa Cigondang memiliki pola perpindahan penduduk yang tetap.

4.2.2.3 Pola Perkembangan Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Cigondang terdiri dari berbagai macam profesi perekonomian. Desa Cigondang di dominasi oleh sektor pertanian, perikanan sebagai mata pencaharian turun temurun. Adapun berikut merupakan tabel 4.10 penjelasan aktivitas perekonomian masyarakat Desa Cigondang:

Tabel 4.10

Profesi Perekonomian Masyarakat Desa Cigondang

No	Profesi Masyarakat	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	685
2	Mengurus Rumah Tangga	286
3	Pelajar/Mahasiswa	4.856
4	Pensiunan dan PNS	123
5	Perdagangan	500
6	Petani dan buruh tani	191
7	Buruh usaha perternakan	40
8	Nelayan	210
9	Karyawan perusahaan swasta	117
10	Karyawan perusahaan pemerintah	378
11	Guru Swasta	21
12	Industri kecil dan kerajinan Rumah Tangga	469
13	Dosen Swasta	4
14	TNI dan POLRI	6
15	Pengacara	1
16	Sopir	97
17	Usaha jasa pengerah tenaga kerja	378
Jumlah		8.362

Sumber: Data Profil Desa dan Kelurahan, 2013

Perekonomian Desa Cigondang di dominasi oleh perdagangan sebanyak 500 orang, dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani sebanyak 191 orang, serta yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 210 orang seperti yang telah dipaparkan pada tabel 4.10. Adapun masyarakat yang belum dan tidak memiliki pekerjaan sebanyak 685 orang. Lahan pertanian Desa Cigondang semakin sempit karena sudah dibangun proyek PLTU Banten 2 Labuan. Dampak dari debu dan panas yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan berpengaruh terhadap hasil pertanian masyarakat sekitar PLTU. Bukan hanya itu, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan pun merasakan dampak yang berpengaruh kepada hasil tangkapan mereka karena limbah panas yang dialirkan ke laut, nelayan sekarang harus mencari ikan cukup jauh dan tidak terjangkau karena biota laut di pesisir pantai Desa Cigondang dan sekitarnya sudah semakin langka akibat dampak limbah air panas yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan yang berdampak pada rusaknya biota laut sehingga nelayan kesulitan dalam mencari ikan dan berpengaruh kepada perekonomian masyarakat sekitar. Seperti yang diungkapkan oleh I₁₋₁ selaku masyarakat nelayan Desa Cigondang Kecamatan Labuan :

“Perkembangan ekonomi belum ada perubahan, jika dibanding sekarang dengan yang dulu, lebih baik dulu, kenapa yang dulu? Karena tempat yang dibangun oleh proyek adalah tempat mencari nafkah kami, namun sekarang setelah dibangunnya proyek, kami mencari ikan ke tempat yang jauh, pembangunan proyek tersebut di area karang, yang dibikin jalan kapal”. (Wawancara dengan I₁₋₁ pada tanggal 23 Juli 2015, di pesisir pantai Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 10.50 WIB).

Dari wawancara dengan masyarakat I₁₋₁ bahwa, perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang belum ada perubahan, masyarakat lebih nyaman dengan keadaan seperti dulu karena tempat yang didirikan proyek saat ini adalah tempat untuk mencari nafkah nelayan-nelayan kecil yang berada di Desa Cigondang, namun masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan kini harus mencari ikan ke tempat yang potensi ikannya lebih banyak dan tidak terjangkau. Dan dibenarkan oleh I₁₋₃ selaku masyarakat petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan :

“Perkembangan ekonomi biasa saja, ini adalah panen yang kedua kalinya, selama satu tahun panen dua kali, namun jika sekarang hasil pertaniannya sedang tidak bagus, karena musim kemarau sehingga hasil pertanian pun kering dan kemungkinan ada dampak panas dari PLTU juga, dulu sebelum ada PLTU lahan pertanian subur-subur”. (Wawancara dengan I₁₋₃ pada tanggal 23 Juli 2015, di saung petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 11.41 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₃ di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani belum mengalami perubahan perkembangan ekonomi, karena saat ini sedang mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Dampak negatif yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan seperti perubahan suhu udara menjadi terasa panas. Masyarakat mengatakan bahwa lahan pertanian sangat subur sebelum adanya PLTU Banten 2 Labuan, namun saat ini setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan masyarakat mengeluhkan bahwa suhu panas yang dihasilkan oleh aktivitas PLTU Banten 2 Labuan berpengaruh kepada hasil pertanian yang kurang bagus. Adapun yang diungkapkan oleh I₁₋₅ selaku Tokoh Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan, yaitu bahwa :

“Biasanya masalah Cigondang itu minim, kebanyakan seperti tukang becak, nelayan, nelayan hanya memanfaatkan hasil alam, petani, ada kuli seperti kuli bangunan dan kebanyakan becak. PLTU adalah perusahaan yang besar, namun kebanyakan yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan sebagian besar adalah orang luar, bukan masyarakat lokal, perkembangan ekonomi masyarakatnya belum berkembang”. (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Dari hasil wawancara dengan I₁₋₅ yaitu bahwa, masyarakat Desa Cigondang belum mengalami perubahan perkembangan ekonomi. Masyarakat Desa Cigondang mempunyai pekerjaan yang beragam, seperti tukang becak, pedagang kecil, petani, nelayan yang hanya memanfaatkan hasil sumber daya alam seperti mencari ikan, udang, kepiting dan hasil laut lainnya yang dapat dijual dan yang dapat dikonsumsi untuk pribadi, karena sebagian besar masyarakat Desa Cigondang menggantungkan kebutuhan hidupnya pada hasil laut dan pertanian yang diperoleh setiap harinya, dan ada pula masyarakat Desa Cigondang yang bekerja sebagai kuli bangunan. Adapun yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan sebagian besar adalah orang dari luar Desa Cigondang. Berbeda dengan yang dikatakan oleh I₂₋₃ selaku Sekertaris Desa Cigondang Kecamatan Labuan, bahwa:

“Perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang lumayan meningkat jika dibandingkan dengan dulu, kemungkinan kecil karena dampak positif dari adanya pembangunan PLTU tapi meningkatnya bukan sepenuhnya karena adanya PLTU, misalnya dilihat dari pembangunan rumah warga juga sudah lumayan meningkat”. (Wawancara dengan I₂₋₃, pada tanggal 09 Juli 2015, di Kantor Desa Cigondang, pukul: 10.30 WIB).

Berdasarkan pernyataan dari I₂₋₃ bahwa, perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan yang dahulu, peningkatan tersebut kemungkinan kecil

karena adanya dampak positif dari pembangunan PLTU Banten 2 Labuan. Banyak masyarakat sekitar yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan walaupun tidak terserap secara maksimal. Masyarakat lokal yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan ditempatkan di bagian buruh kasar seperti *security*, *cleaning service*, pengangkut batu bara. Adapun masyarakat yang membuka usaha baru seperti pedagang kecil di sekitar PLTU Banten 2 Labuan yang berasal dari Desa Sukamaju, hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pedagang kecil karena sebelum adanya PLTU Banten 2 Labuan masyarakat tersebut hanya membuka usahanya di dekat daerah rumahnya saja dan tidak memiliki keuntungan yang besar. Walaupun ada bantuan sosial yang diberikan PLTU Banten 2 Labuan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif, namun tidak sepenuhnya masyarakat Desa Cigondang dapat menerimanya karena persebaran bantuan sosial tersebut tidak merata dan tidak tepat sasaran. Adapun pembuatan kapal besar untuk nelayan hanya ada 2 (dua) ditahun 2015 ini, tetapi nelayan kecil tidak pernah mengetahui dan menggunakan kapal besar tersebut.

4.2.3.4 Penyerapan Tenaga Kerja

Masalah pengangguran merupakan masalah umum, banyaknya pembangunan dapat menyerap tenaga kerja sekitar dan semakin besar dampak positifnya, sekalipun harus memiliki latar belakang pendidikan khusus bagi tenaga kerja. Dampak penyerapan tenaga kerja tidak selalu berupa dampak langsung dan dampak tidak langsung, artinya timbulnya sumber-sumber pekerjaan baru bagi masyarakat. Penyerapan tenaga kerja terhadap adanya

pembangunan PLTU Banten 2 Labuan diharapkan masyarakat lokal terutama masyarakat Desa Cigondang yang diutamakan untuk bekerja di PLTU Banten 2 Labuan, karena mengingat pembangunan tersebut berdiri di lahan masyarakat sekitar. Berikut adalah tabel rekapitulasi tenaga kerja di PLTU Banten 2 Labuan :

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tenaga Kerja PLTU Banten 2 Labuan

No	Uraian	Domisili Labuan (Lingkup Kecamatan Labuan)	Domisili sekitar Labuan (Lingkup Kabupaten Pandeglang)	Domisili Luar Labuan (Lingkup diluar Kabupaten Pandeglang)
1	PT. Indonesia Power (IP)	1	2	67
2	PT. Cogindo Daya Bersama	30	30	127
3	Koperasi Kekal	55	42	13
4	<i>Security</i>	39	20	0
5	<i>Cleaning Service</i>	246	0	0
	<i>Jumlah</i>	371	94	207

Sumber : Data Rekapitulasi Tenaga Kerja PLTU Banten 2 Labuan

Dari hasil tabel diatas bahwa untuk masyarakat lokal yang terserap di PLTU Banten 2 Labuan ditempatkan di berbagai elemen seperti PT. Indonesia Power sebanyak 1 orang, PT. Cogindo Daya Bersama sebanyak 30 orang, Koperasi kekal sebanyak 55 orang, *Security* sebanyak 39 orang dan yang paling mendominasi adalah *cleaning service* sebanyak 246 orang. Dapat dilihat pada tabel 2.11 bahwa masyarakat lokal banyak yang dipekerjakan dibagian buruh kasar seperti *Cleaning service* dan *security*, karena masyarakat lokal memiliki latar pendidikan yang

rendah sehingga ditempatkan dibagian buruh kasar. Untuk PT. Indonesia Power (IP) di dominasi dari masyarakat diluar Kabupaten Pandeglang. Oleh sebab itu akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat sekitar karena masyarakat sekitar dipekerjakan hanya dibagian buruh kasar saja, namun sebenarnya banyak masyarakat Kecamatan Labuan yang mempunyai keterampilan khusus dan kemampuan diberbagai bidang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PLTU Banten 2 Labuan. Informasi yang diperoleh dari I₂₋₃ selaku sekretaris Desa Cigondang bahwa :

“Anak-anak muda banyak yang bekerja di PLTU sebagai buruh kasar, antara lain seperti babat rumput, satpam, cleaning service, yang lulusan SD juga bisa bekerja sebagai buruh kasar, untuk bekerja dibagian staff ada cuma sedikit, karena dilihat dari kemampuannya kalau untuk tenaga ahli”. (Wawancara dengan I₂₋₃, pada tanggal 09 Juli 2015, di Kantor Desa Cigondang, pukul: 10.30 WIB).

Dari pernyataan informan dengan I₂₋₃ diatas bahwa, masyarakat di Desa Cigondang banyak yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan, di tempatkan diberbagai bidang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Ada sebagian masyarakat yang lulus SD/ sederajat bekerja di PLTU Banten 2 Labuan yang ditempatkan di bagian buruh kasar. Pernyataan serupa diungkapkan oleh I₁₋₁ selaku masyarakat nelayan Desa Cigondang Kecamatan Labuan, bahwa :

“Kalau masyarakat lokal yang bekerja di PLTU kurang, kalau masyarakat lokal kebanyakan kerja dibagian buruh kasar, kalau yang di bagian kantor kebanyakan dari luar, kalau karyawan tetap sedikit, kalau karyawan kontrak biasanya banyak”. (Wawancara dengan I₁₋₁ pada tanggal 23 Juli 2015, di pesisir pantai Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 10.50 WIB).

Berdasarkan pernyataan diatas dengan I₁₋₁ bahwa, masyarakat lokal yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan sangat sedikit jika dibandingkan dengan masyarakat diluar Desa Cigondang dan sekitarnya, adapun masyarakat lokal yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan sebagian besar adalah karyawan kontrak yang ditempatkan diberbagai bidang seperti *security*, *cleaning service*, pembabat rumput dan pengangkut batu bara. Hal senada diucapkan oleh I₁₋₄ yaitu bahwa : “Penyerapan tenaga kerja belum terserap secara maksimal, masih banyak masyarakat yang menganggur tidak mempunyai pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₄ bahwa, untuk penyerapan tenaga kerja, masyarakat yang berasal dari Desa Cigondang dan sekitarnya masih belum terserap secara maksimal, dapat dilihat pada tabel 4.10 bahwa masyarakat yang belum dan tidak memiliki pekerjaan sebanyak 685 orang. Adapun yang diungkapkan oleh I₁₋₅ selaku Tokoh Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan, yaitu bahwa :

“Kalau dulu ada namun jika sekarang hanya ada beberapa, kebanyakan yang bekerja di PLTU adalah orang cilacap, dan ada pula masyarakat lokal yang bekerja sebagai *Office Boy*, *Security*, buruh kasar, ada beberapa yang bekerja dibagian koperasinya, ada juga yang bekerja di bagian *Staff*, kebanyakan di buruh kasar”. (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₅ bahwa, tenaga kerja yang berasal dari Desa Cigondang yang terserap bekerja di PLTU Banten 2 Labuan saat ini lebih sedikit, dan sebagian dari masyarakat tersebut bekerja di bagian buruh kasar, seperti *Office Boy*, *Security*, dan pengangkut batu bara serta pembabat rumput. Ada pula masyarakat yang ditempatkan dibagian *staff* dan

koperasi. Kebanyakan masyarakat lokal yang ditempatkan di bagian buruh kasar adalah karyawan kontrak.

Namun pernyataan berbeda di diungkapkan oleh I₂₋₂ selaku Amu CSR, Humas dan Keamanan PT. Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan. Bahwa :

“Hampir 90% pegawai PLTU Labuan terserap dari labuan, dari domisili labuan ada 357 orang untuk kecamatan labuan, kemudian di pandeglang sendiri ada 94 orang, seperti diluar Kabupaten Pandeglang seperti di Serang 234 orang, tetapi kebanyakan dari total tenaga kerja kita 685 orang jadi banyak sekali warga sekitar labuan yang sudah terserap bekerja disini.”. (Wawancara dengan I₂₋₂ pada tanggal 10 Agustus 2015, di Kantor PLTU Banten 2 Labuan, pukul 12.04 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₂₋₂ bahwa, masyarakat lokal sudah banyak yang terserap bekerja di PLTU Banten 2 Labuan dengan jumlah 357 orang untuk Kecamatan Labuan dan sudah termasuk 4 desa penyanggah yaitu Desa Sukamaju, Margasana, Margagiri dan termasuk Desa Cigondang.

Selanjutnya I₂₋₂ juga mengatakan bahwa :

“Tapi memang kebanyakan disini sebagai *cleaning service*, *security*, dari koperasi, kopindo dan Indonesia Power. Jadi terdapat lima elemen yaitu Indonesia Power, ada Cogindo, ada koperasi ada *cleaning service*, sama *security*”. (Wawancara dengan I₂₋₂ pada tanggal 10 Agustus 2015, di Kantor PLTU Banten 2 Labuan, pukul 12.04 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₂₋₂ bahwa masyarakat lokal yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan di tempatkan di berbagai elemen seperti *cleaning service*, *security*, koperasi, cogindo dan Indonesia Power. Penempatan pekerjaan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat sekitar.

4.2.2.5 Berkembangnya Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi disini dimaksudkan dengan timbulnya aktivitas perekonomian lain akibat adanya pembangunan tersebut, sehingga merupakan sumber-sumber pekerjaan baru yang dapat terserap oleh aktivitas pembangunan. Berikut tanggapan I₂₋₃ selaku Sekertaris Desa Cigondang:

“Untuk perkembangan struktur ekonomi secara keseluruhan meningkat, memang nelayan dan petani hampir sama-sama, nelayan ditentukan cuaca, pertanian juga kadang-kadang tidak hasil juga. (Wawancara dengan I₂₋₃, pada tanggal 09 Juli 2015, di Kantor Desa Cigondang, pukul: 10.30 WIB).

Berdasarkan pernyataan diatas dengan I₂₋₃ bahwa, untuk perkembangan struktur ekonomi secara menyeluruh mengalami peningkatan, adapun kendala yang dirasakan oleh masyarakat yang bekerja sebagai nelayan yaitu pekerjaan para nelayan ditentukan oleh iklim, sedangkan pertanian hasilnya tidak menentu terkadang menghasilkan, namun terkadang juga gagal panen sehingga petani mengalami kerugian jika hasil panennya mengalami kerusakan. Pernyataan berbeda diungkapkan oleh I₁₋₁ selaku masyarakat nelayan Desa Cigondang Kecamatan Labuan :

“Tidak ada perubahan, kalau tidak ada hasil tangkapan bekerja menjadi tukang bangunan, itupun kalau ada yang mengajak, tetapi jika ada pekerjaan di darat ya kami bekerja di darat itupun kalau ada yang mengajak, kalau ada peluang, kalau tidak ada ya begini saja, menganggur”. (Wawancara dengan I₁₋₁ pada tanggal 23 Juli 2015, di pesisir pantai Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 10.50 WIB).

Dari pernyataan informan diatas dengan I₁₋₁ bahwa, tidak ada perubahan struktur ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, jika hasil tangkapan ikan nelayan sedang tidak ada, maka nelayan beralih profesi menjadi tukang bangunan jika ada tawaran dan peluang untuk bekerja.

Namun jika tidak ada tawaran dan tidak ada peluang usaha maka para nelayan tersebut menjadi pengangguran.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh I₁₋₄ selaku masyarakat petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan : “Tetap seperti ini, kalau tidak ada pekerjaan bapak bekerja menjadi tukang becak saja. (Wawancara dengan I₁₋₄ pada tanggal 23 Juli 2015, di saung petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 12.02 WIB). Dari hasil wawancara diatas dengan I₁₋₄ bahwa tidak ada perubahan struktur ekonomi, jika tidak memiliki pekerjaan, para petani tersebut bekerja menjadi tukang becak guna untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Para petani tidak hanya dapat mengandalkan dari hasil pertanian saja, karena hasil pertanian hanya dapat di panen dua kali selama satu tahun, dan hasil pertaniannya di bagi rata antara buruh tani dengan pemilik lahan pertanian.

Hal senada diungkapkan oleh I₁₋₅ selaku Tokoh Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan, yaitu bahwa :

“Untuk perkembangan struktur ekonomi biasa saja, tidak ada perubahan, tidak ada pekerjaan sumber-sumber baru, tukang becak tetap menjadi tukang becak, namun jika nelayan bekerja musiman, jika musimnya sedang tidak baik maka nelayan tersebut menganggur, kalau disini seperti pencarian rumput laut untuk kosmetik, namun tidak ada yang menampung”. (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₅ bahwa, tidak ada perubahan perkembangan struktur ekonomi dan tidak ada pekerjaan dari sumber-sumber baru. Dalam hal ini, perkembangan struktur ekonomi masyarakat Desa Cigondang belum dapat dikatakan berkembang, karena dampak negatif lebih

banyak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar karena aktivitas dari PLTU Banten 2 Labuan. Adapun aktivitas perekonomian lain bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan yaitu bekerja sebagai tukang bangunan dan tukang becak guna untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya. Karena petani hanya panen 2 (dua) kali selama satu tahun dan hasil pertaniannya dibagi antara buruh tani dan pemilik lahan pertanian. Selain itu nelayan hanya bekerja musiman, jika musimnya sedang tidak bagus maka nelayan tersebut menganggur, namun ada beberapa nelayan yang bekerja sebagai buruh bangunan jika ada peluang dan jika ada kegiatan pembangunan di daerah Kecamatan Labuan dan sekitarnya, namun jika tidak ada peluang maka nelayan tersebut menganggur.

4.2.2.6 Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan pendapatan baik secara langsung dan tidak langsung dari pembangunan akan memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan seperti yang telah dipaparkan oleh I₁₋₅ selaku Tokoh Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan sebagai berikut :

“Peningkatan masyarakat sebelum dan setelah adanya PLTU tidak ada perkembangan. Hasil penangkapan ikan jelas merosot, hanya perahu kecil tidak bisa beroperasi, ada yang menangkap bubu kepiting, ada jaring udang sekarang berkurang.”. (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Berdasarkan pernyataan dengan I₁₋₅ diatas bahwa, tidak ada perubahan peningkatan pendapatan pada masyarakat Desa Cigondang jika dibandingkan dengan sebelum adanya PLTU Banten 2 Labuan, pendapatan masyarakat

yang bekerja sebagai nelayan menjadi menurun akibat dari limbah panas yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan dan berpengaruh kepada hasil tangkapan para nelayan sekitar. Selanjutnya I₁₋₅ juga mengatakan bahwa :

“Pendapatan masyarakat Desa Cigondang baik yang berprofesi sebagai petani dan nelayan menurun, biasanya sebelum popole ada pemasangan bubu untuk udang masih banyak, namun sekarang berkurang karena air limbah panas PLTU dan sekarang untuk mencari ikan harus ke tempat yang jauh tidak terjangkau dengan motor, dan akhirnya sudah tidak kebeli mesin-mesin untuk motor dan berehenti. Adapun pemberian dana CSR kepada nelayan seperti pemberian kapal, kalau tidak salah ada 2 kapal tetapi pemberiannya itu tidak tepat sasaran, akhirnya kapal-kapalnya sekarang rusak.” (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₅ terungkap bahwa, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan kini harus mencari ikan dengan jarak yang jauh dan tidak terjangkau karena pesisir pantai Kecamatan Labuan telah tercemar limbah panas yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan yang berakibat kepada menurunnya pendapatan nelayan. Tetapi pihak PLTU Banten 2 Labuan memberikan bantuan sosial kepada nelayan dalam bentuk pemberian kapal berkapasitas besar, namun disayangkan pemberian kapal tersebut tidak tepat sasaran sehingga kapal tersebut menjadi rusak. Pernyataan serupa dikatakan oleh I₁₋₁ selaku masyarakat nelayan Desa Cigondang, yaitu bahwa :

“Untuk masalah penghasilan tidak ada perubahan, kalau penghasilan nelayan hanya begitu saja, dapat satu hari dan kosong satu minggu saja sudah bersyukur. Nelayan seperti ini mau mencari uang seratus ribu saja jarang ketemu minggu nya. PLTU mana ada toleransinya sama nelayan, saya sendiri belum pernah merasakan bantuan, bukan hanya saya sendiri, teman-teman yang lain juga tidak pernah, yang namanya bantuan seperti itu nol besar kalau dari proyek, tidak tepat dengan apa yang dijanjikan dulu”. (Wawancara dengan I₁₋₁ pada tanggal 23 Juli

2015, di pesisir pantai Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 10.50 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₁ bahwa, Pendapatan masyarakat Desa Cigondang yang terkena dampak langsung tentunya belum mengalami peningkatan yang diharapkan oleh masyarakat sekitar, terlebih untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang mengalami kemerosotan hasil tangkapan ikan. Nelayan kini mencari ikan harus ke tempat yang memiliki potensi ikan yang lebih banyak, karena biota laut yang terdapat di pesisir pantai Desa Cigondang telah rusak akibat limbah air panas yang dibuang ke laut. Adapun perjanjian yang dilakukan antara pihak PLTU Banten 2 Labuan dengan masyarakat sekitar yang belum direalisasikan sampai saat ini, seperti pemberian KWH kepada masyarakat sekitar dan perbaikan jalan di area Desa sekitar PLTU Banten 2 Labuan. Pernyataan diatas dibenarkan oleh I₁₋₃ selaku masyarakat petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan :

“Begini saja, karena ini lahan pertanian milik orang lain, ibu hanya sebagai buruh tani, jika panen dapet 2 karung hasil panen tersebut dibagi rata, yaitu dibagi 1 karung untuk ibu dan 1 karungnya lagi untuk pemilik sawah, untuk dana CSR tidak ada, belum pernah merasakan”. (Wawancara dengan I₁₋₃ pada tanggal 23 Juli 2015, di saung petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 11.41 WIB).

Dari hasil wawancara dengan I₁₋₃ bahwa, masyarakat yang berprofesi sebagai petani belum mengalami peningkatan pendapatan, karena kebanyakan dari petani bekerja di lahan pertanian milik orang lain dan hasil pertaniannya di bagi rata antara buruh tani dengan pemilik lahan pertanian. Hasil pertanian untuk saat ini kurang baik karena musim kemarau dan karena suhu panas

yang dihasilkan oleh aktivitas PLTU Banten 2 Labuan yang berpengaruh kepada hasil pertanian warga. Masyarakat yang bekerja sebagai petani belum pernah merasakan bantuan sosial dari PLTU Banten 2 Labuan. Adapun bantuan sosial hanya berupa pembangunan mushola di 4 desa penyanggah yaitu Desa Sukamaju, Desa Margasana, Desa Margagiri dan termasuk Desa Cigondang.

Adapun tanggapan yang dikatakan oleh I₂₋₃ selaku Sekertaris Desa Cigondang, yaitu :

“Ada peningkatan tapi tida semua masyarakat ya, seperti nelayan sekarang ada kemerosotan hasil tangkapan ikan, tetapi permasalahan itu bukan karena sepenuhnya adanya PLTU, kan disana juga ada kapal kursin, kapal-kapal besar, tidak 100% karena PLTU, jadi nelayan kecil kepepet karena adanya kapal-kapal besar, ada pemberian dana CSR yang diberikan kepada kepala Desa Cigondang dan diberikan langsung kepada masyarakat dibawah rata-rata garis kemiskinan, tidak semua masyarakat ya, cuma masyarakat yang ekonominya dibawah rata-rata kemiskinan”. (Wawancara dengan I₂₋₃, pada tanggal 09 Juli 2015, di Kantor Desa Cigondang, pukul: 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₂₋₃ bahwa, sebagian kecil masyarakat Desa Cigondang mengalami peningkatan pendapatan, namun saat ini nelayan Desa Cigondang mengalami penurunan hasil tangkapan tetapi tidak sepenuhnya karena dampak dari adanya PLTU Banten 2 Labuan. Ada beberapa kapal nelayan yang berkapasitas kecil terjepit dimuara oleh kapal-kapal nelayan yang berkapasitas besar sehingga nelayan kecil mengalami kesulitan untuk keluar mencari ikan. Adapun pemberian dana CSR yang diberikan oleh PLTU Banten 2 Labuan melalui Kepala Desa Cigondang dan dibagikan langsung kepada masyarakat Desa Cigondang yang perekonomiannya dibawah rata-rata garis kemiskinan.

Selain itu untuk memenuhi kontak sosialnya terhadap masyarakat, perusahaan dihadapkan kepada beberapa tanggung jawab sosial secara simultan, karena CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan perwujudan komitmen kepada keberlangsungan hidup perusahaan oleh karena itu perusahaan menaruh kepedulian terhadap pengembangan sosial. Pada dasarnya keberlanjutan (*sustainability*) yang di dalamnya terdapat unsur ketenagakerjaan adalah keseimbangan antara kepentingan ekonomi.

Melalui tanggung jawab sosial yang dijalankan, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki di berbagai bidang. Kompetensi yang meningkat ini pada gilirannya diharapkan akan mampu dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemberian dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) ada yang berbentuk uang dan barang, jika dalam bentuk barang seperti pembuatan perahu bagi nelayan kecil Desa Cigondang, ada yang berbentuk ekonomi yang diberikan kepada masyarakat sekitar dalam bentuk uang tunai dan diberikan secara bergilir, adapun berbentuk fisik seperti perbaikan jalan-jalan kecil dengan menggunakan *paving block* di daerah Desa Cigondang. Selain itu ada pengobatan gratis yang diberikan kepada 4 (empat) desa penyanggah yaitu Desa Sukamaju, Desa Margasana, Desa Margiri dan termasuk Desa

Cigondang. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) diberikan langsung kepada Kepala Desa Cigondang dan dibagikan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas pembangunan PLTU Banten 2 Labuan dan masyarakat yang perekonomiannya berada di bawah rata-rata garis kemiskinan. Tetapi masyarakat belum merasakan bantuan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani mengatakan bahwa bantuan tersebut belum pernah mereka rasakan, adapun bantuan lain namun tidak tepat sasaran. Seperti yang dikatakan oleh I₁₋₄ bahwa :

“Tidak tau, belum pernah mendapatkan bantuan apa apa dari PLTU, tapi kalau yang lain lain ada yang mendapatkannya, misalnya jika ada pemotongan qurban, orang-orang mendapatkannya tapi saya tidak pernah mendapatkannya, dan bantuan-bantuan lainnya saya belum pernah mendapatkannya”. (Wawancara dengan I₁₋₄, pada tanggal 23 Juli 2015, di saung petani Desa Cigondang, pukul: 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₄ bahwa, belum pernah merasakan bantuan sosial dan bantuan-bantuan lainnya baik dalam bentuk fisik dan ekonomi. Adapun bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan bantuan tersebut tidak diberikan secara menyeluruh oleh pihak PLTU Banten 2 Labuan kepada masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang mendapatkan bantuan dengan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

4.2.2.7 Perubahan Lapangan Pekerjaan

Dengan timbulnya lapangan pekerjaan baru baik yang langsung maupun yang tidak langsung karena perkembangan struktur ekonomi perlu diperhatikan karena tidak selalu perubahan itu menguntungkan masyarakat

umum. Namun perubahan lapangan kerja yang terjadi di Desa Cigondang sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Adapun I₂₋₃ selaku sekretaris Desa Cigondang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk Perubahan Lapangan Pekerjaan, sedikit banyak karena adanya PLTU. yang tadinya tidak ada kerja sekarang ada kerja karena adanya PLTU. Kalau sekarang karyawan banyak yang sebagai babat rumput, satpam, *cleaning service*”. (Wawancara dengan I₂₋₃, pada tanggal 09 Juli 2015, di Kantor Desa Cigondang, pukul: 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₂₋₃ bahwa, ada perubahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Cigondang dan sekitarnya, walaupun masyarakat sekitar tidak terserap secara maksimal oleh PLTU Banten 2 Labuan, masyarakat yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan ditempatkan di beberapa bagian seperti pembabat rumput, satpam dan *cleaning service*.

Namun hal berbeda disampaikan oleh I₁₋₁ selaku masyarakat nelayan Desa Cigondang Kecamatan Labuan :

“Kalau dari proyeknya terbuka untuk semua kalangan seperti perubahan lapangan pekerjaan ada, ini pilih-pilih, ntah usia, ntah kemampuan. Kebanyakan juga kerja sebagai buruh kasar. (Wawancara dengan I₁₋₁ pada tanggal 23 Juli 2015, di pesisir pantai Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 10.50 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₁ bahwa, akan ada perubahan lapangan pekerjaan jika pihak PLTU Banten 2 terbuka bagi semua kalangan yang ingin bekerja di PLTU Banten 2 Labuan tanpa harus melihat usia ataupun kemampuan. Masyarakat sekitar yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan bekerja di bagian buruh kasar dan sebagai karyawan kontrak. Dalam hal ini masyarakat sekitar belum merasakan adanya perubahan lapangan

pekerjaan, karena masyarakat yang ingin bekerja harus memiliki keterampilan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Adapun hal yang sama diungkapkan oleh I₁₋₅ selaku Tokoh Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan, yaitu bahwa :

“Perubahan lapangan pekerjaan belum ada, kebanyakan yang kerja hanya sebagai buruh kasar, seperti *cleaning service*, satpam, pengangkut batu bara. Kalau dibagian kantornya ada cuma jarang”. (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Dari pernyataan diatas dengan I₁₋₅ bahwa belum ada perubahan lapangan pekerjaan, mengingat keterbatasan PLTU Banten 2 Labuan yang tidak mungkin menyerap semua masyarakat yang berada di Desa Cigondang Kecamatan Labuan. Masyarakat yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan ditempatkan di bagian buruh kasar, seperti *cleaning service*, satpam, pengangkut batu bara. Adapun hal serupa disampaikan oleh I₂₋₄ Selaku LSM Desa Cigondang, mengatakan bahwa :

“Sebetulnya tidak ada perubahan. PLTU itu mencari orang-orang yang mempunyai skill, sebetulnya didaerah kita juga banyak yang harus dikaryakan tapi orang-orang kita tidak diberi kesempatan. Kenapa saya katakan tidak diberi kesempatan, karena setelah saya lihat pekerja yang permanen itu semua orang luar, Surabaya, dari Sumatera. Orang-orang kita sebetulnya Pandeglang ini banyak, ahli pembukuan, tentang komputer, mekanik, untuk semua yang diperlukan PLTU itu sebenarnya banyak di Pandeglang itu”. (Wawancara dengan I₂₋₄ pada tanggal 12 April 2015, di tempat tinggal Bapak Oyok di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan I₂₋₄ bahwa, PLTU Banten 2 Labuan mencari orang-orang yang memiliki kemampuan sendiri misalnya kemampuan seperti mengoperasikan komputer, ahli mekanik dan ahli

pembukuan. Namun masyarakat sekitar PLTU Banten 2 Labuan tidak diberikan kesempatan, karena para karyawan tetap semuanya berasal dari luar Desa Cigondang seperti dari daerah Surabaya dan daerah Sumatera. Padahal dari daerah Desa Cigondang sendiri mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai keahlian sendiri.

Namun pernyataan berbeda di diungkapkan oleh I₂₋₂ selaku Amu CSR, Humas dan Keamanan PT. Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan. Bahwa :

“Ada perubahan lapangan pekerjaan, misalnya ada yang tadinya tidak bisa menghidupi anak istrinya, sekarang sudah bekerja di kami walaupun misalnya gaji berapa gitu kan, setidaknya sudah lumayan untuk penghasilan mereka dalam ukuran di Labuan yang penting diatas UMR”.(Wawancara dengan I₂₋₂ pada tanggal 10 Agustus 2015, di Kantor PLTU Banten 2 Labuan, pukul 12.04 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan I₂₋₂ bahwa, terdapat perubahan lapangan pekerjaan, terbukti dengan masyarakat yang tadinya tidak memiliki pekerjaan, kini sudah memiliki pekerjaan dengan bekerja di PLTU Banten 2 Labuan dengan begitu masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Adapun penghasilan karyawan yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan yaitu seluruhnya diatas UMR.

4.2.2.8 Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat dan erat pula kaitannya dengan kebiasaan hidupnya yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup serta kesehatannya. Seperti yang diungkapkan oleh I₁₋₂ selaku masyarakat nelayan Desa Cigondang Kecamatan Labuan :

“Kalau untuk kesehatan kalau ada debu dari batu bara itu saya kasian dengan anak-anak, gangguan pernafasan, pilek-pilek mendadak, sesak-sesak, giliran ingin berobat mending kalau ada uang, sesaknya lumayan debunya, kadang mata juga perih”. (Wawancara dengan I₁₋₁ pada tanggal 23 Juli 2015, di pesisir pantai Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 10.50 WIB).

Dari hasil wawancara dengan I₁₋₂ diatas bahwa, debu yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan seperti debu dari batu bara dan boiler sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, seperti gangguan pernafasan dan membuat mata perih. Sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar. Hal serupa disampaikan juga oleh I₁₋₃ selaku masyarakat petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan, bahwa : “Kalau ada debu ya pasti aja bikin sesek, emak juga kalau lagi kerja ngebul karena asap abunya suka terbang kesini”. (Wawancara dengan I₁₋₃ pada tanggal 23 Juli 2015, di saung petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 11.41 WIB). Dari hasil wawancara dengan I₁₋₃ diatas bahwa, debu yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan mengganggu pernafasan masyarakat sekitar, kebanyakan masyarakat merasakan sesak nafas jika abu tersebut terbang ke permukiman warga sekitar. Hal senada pun di sampaikan oleh I₁₋₅ Selaku Tokoh Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan, bahwa :

“Kalau sakit itu musiman, kalau cuacanya terik anginnya dari sana itu kesini dan paling kena pilek karena debu dari PLTU yang terbang kesini, tapi kalau musim kaya gini abu tersebut terbang kesana ke daerah Tarogong, ke daerah Banyubiru sampai ke daerah Menes, sampai hitam kalau anginnya dari sini kesana”. (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Dari hasil wawancara dengan I₁₋₅ diatas bahwa, masyarakat yang terserang penyakit biasanya hanya musim tertentu saja, jika cuaca terik dan

angin bertiup kencang ke arah utara maka debu tersebut memasuki permukiman warga Desa Cigondang dan sekitarnya serta mengganggu kesehatan masyarakat sekitar seperti gangguan pernafasan. Selanjutnya I₁₋₅ mengatakan bahwa :

“Kalau misalnya ada yang sakit demam karena PLTU udah turun pengobatan gratis langsung. Kalau kesehatan PLTU ada nyumbang sedikit alat dari kampung kalangsari yang bapak liat, seperti tensi, timbangan bayi itu ada cuma satu posyandu, tidak semua”. (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₅ terungkap bahwa, jika ada masyarakat yang terjangkit penyakit karena dampak negatif yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan, biasanya pihak PLTU Banten 2 Labuan memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat sekitar berupa pengobatan gratis. Pengobatan gratis ini diadakan 1 (satu) tahun sekali. Pihak PLTU Banten 2 Labuan juga memberikan bantuan alat medis ke salah satu posyandu yang terdapat di kampung Kalangsari seperti pemberian tensi dan timbangan untuk bayi. Adapun yang disampaikan oleh I₂₋₃ selaku Sekertaris Desa Cigondang, mengatakan bahwa :

“Kalau debu yang dihasilkan PLTU itu biasanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, seperti sesak nafas, masalahnya dampak negatifnya belum tertera ya, masalahnya kan debu itu lama jaraknya, mungkin sekarang juga kita duduk disini mungkin debu-debu PLTU terhisap ya tapi kan jangkanya itu bukan setahun dua tahun, untuk pengobatan gratis itu dokternya datang ke PLTU, tapi sayangnya sama saja kaya berobat ke puskesmas, kenapa gitu? Dari sini ongkos sama ke puskesmas sama, malah lebih kalau ke PLTU, jadi untuk membantu masyarakat kok malah beban untuk ongkos gitu. Maunya saya walaupun gratis silahkan lah datang tetapi di Desa ini supaya masyarakat bisa merasakan”.(Wawancara dengan I₂₋₃, pada tanggal 09 Juli 2015, di Kantor Desa Cigondang, pukul: 10.30 WIB).

Berdasarkan pernyataan diatas dengan I₂₋₃ bahwa, debu yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan berpengaruh kepada kesehatan masyarakat sekitar, seperti gangguan pernafasan. Debu yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan akan berpengaruh kepada kesehatan masyarakat sekitar dalam jangka waktu yang panjang. Pihak PLTU memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar PLTU Banten 2 Labuan, pengobatan gratis tersebut di adakan di PLTU Banten 2 Labuan, namun masih ada masyarakat yang merasa terbebani jika pengobatan gratis tersebut diadakan di PLTU Banten 2 Labuan, karena sebagian besar masyarakat Desa Cigondang memiliki keterbatasan biaya untuk transportasi.

Pernyataan berbeda di diungkapkan oleh I₂₋₂ selaku Amu CSR, Humas dan Keamanan PT. Indonesia Power PLTU Banten 2 Labuan. Bahwa :

“Semua industri kan pasti menghasilkan limbah ya, limbah kami ini sendiri kan bukan hanya limbah abu ya batu bara kan, ada limbah cair, limbah lain sebagainya, tapi untuk semua pengelolaan lingkungan itu sendiri kan sudah ada aturannya, sudah ada aturan pemerintah, sudah ada aturan pemerintah daerah, pemerintah pusat kementerian lingkungan hidup, semuanya kan sudah ada, ketika berdirinya suatu perusahaan sudah pasti ada aturannya seperti itu, (Wawancara dengan I₂₋₂ pada tanggal 10 Agustus 2015, di Kantor PLTU Banten 2 Labuan, pukul 12.04 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₂₋₂ diatas bahwa, limbah yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan sudah sudah dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada karena pengelolaan lingkungan memiliki aturannya tersendiri. Selanjutnya I₂₋₂ juga menegaskan bahwa :

“dampak ada cuma sampai saat ini sendiri kami masih memperhijau jadi yang kategori kalau bagi perusahaan yang sudah masuk kategori memperhijau memang dampaknya ke masyarakat juga tidak ada, istilahnya tidak dirasakan langsung ya, sampai saat ini kami belum menemukan adanya penelitian yang menyatakan bahwa masyarakat sekitar asma atau kena abu batubara, karena kan prosesnya panjang tidak misalnya gini, ada di cigondang misalnya menyatakan oh ada yang asma misalnya, ada yang radang paru-paru itu disebabkan oleh abu batubara misalnya, itukan penelitiannya sangat panjang ya akibat faktornya kan abcdefg, jadi belum tentu oleh PLTU, tapi sampai saat ini ya alhamdulillah dari pegawainya sendiri yang berada disini belum ada apalagi masyarakat yang ada diluar. Untuk pengobatan gratis ada 1 tahun sekali, untuk tahun ini bulan Februari, peserta pengobatan gratis ada 1000 orang masyarakat sekitar yang ikut serta pengobatan tersebut, diberikan obat-obatan gratis, tapi tetap kita yang bayar, dokternya kesini, diadakan di sini”. Wawancara dengan I₂₋₂ pada tanggal 10 Agustus 2015, di Kantor PLTU Banten 2 Labuan, pukul 12.04 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₂₋₂ bahwa sakit yang dirasakan oleh masyarakat sekitar PLTU Banten 2 Labuan tidak sepenuhnya karena abu yang dihasilkan oleh PLTU, karena jika masyarakat mengalami gangguan pernafasan bisa karena banyak faktor bukan hanya karena debu yang dihasilkan oleh PLTU. Karena dalam proses pembangunan PLTU Banten 2 Labuan sudah memiliki aturannya sendiri dalam pengelolaan lingkungan. PLTU juga mengadakan pengobatan gratis satu tahun sekali yang diberikan untuk masyarakat sekitar terutama 4 (empat) Desa penyanggah, yaitu Desa Sukamaju, Desa Margasana, Desa Margiri dan Desa Cigondang. Dibulan Februari 2015 ada sebanyak 1.000 orang yang ikut serta dalam pengobatan gratis yang diadakan di PLTU Banten 2 Labuan.

4.2.2.9 Bentuk Komponen Krisis

Bentuk komponen lain yaitu sumberdaya alam yang sangat langka dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Desa Cigondang merupakan pesisir desa yang memiliki potensi tangkapan ikan yang melimpah sebelum adanya PLTU Banten 2 Labuan, namun saat berdirinya PLTU Banten 2 Labuan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan mengeluhkan susahnyanya dalam menangkap ikan karena air limbah yang sudah tercemar, sehingga banyak nelayan yang harus mencari ikan ke tengah laut yang membuat nelayan harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk bahan bakar perahunya. Seperti yang dikatakan oleh I₁₋₁, bahwa :

“Untuk Sumber Daya Alam di Desa Cigondang sekarang sudah rusak kalau masalah ikan ikan, sudah langka, ada dampak dari PLTU juga, biasanya kalau tumpah batubara ke laut itu udang udang kurang”. (Wawancara dengan I₁₋₁ pada tanggal 23 Juli 2015, di pesisir pantai Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 10.50 WIB).

Dari hasil wawancara dengan I₁₋₁ diatas bahwa, Sumber Daya Alam yang ada di pesisir pantai Desa Cigondang sudah rusak, nelayan susah untuk mencari ikan di sekitaran pesisir pantai yang sudah tercemar oleh limbah, dan udang berkurang jika batu bara dari kapal tongkang PLTU sudah tumpah dan mencemari pesisir pantai Desa Cigondang dan sekitarnya. Hal serupa dibenarkan juga oleh I₁₋₂, bahwa :

“Sumber Daya Alam di Desa Cigondang udah susah sekarang, biasa cari ikan kesana, kalau tidak ke tengah, kalau ke sana sudah panas airnya. Dulu nelayan kecil ini cari ikan disitu, dipesisir pantai, tapi setelah adanya PLTU susah. Makanya kami ganti penangkapan ikan pake bubu, habis ikan tidak ada, udang udah hampir punah tinggal kita cari binatang lumpur”. (Wawancara dengan I₁₋₂ pada tanggal 23 Juli 2015, di pesisir pantai Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 11.08 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I₁₋₂ diatas bahwa, nelayan sudah sulit mencari ikan di pesisir pantai Desa Cigondang karena air laut di pesisir pantai sudah terasa panas sehingga nelayan sulit untuk mencari ikan setelah berdirinya PLTU Banten 2 Labuan, pada akhirnya sebagian nelayan menggantikan alat penangkapan ikan dengan menggunakan bubu untuk mencari binatang lumpur. Adapun yang disampaikan oleh I₁₋₅ Selaku Tokoh Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan :

“Pokok utama yang tadi bapak katakan seperti nelayan penangkap udang itu mati usahanya jadi seharusnya PLTU survey ke lokasi, karena bukan orang Cigondang yang datang kesana, saya minta PLTU survey ke nelayan-nelayan kecil apa keluhan-keluhan nelayan, ternyata kalau ada bantuan yang menerimanya bukan orang-orang yang tepat sasaran, disini mengajukan, tanda tangan, akhirnya bantuan sudah turun tidak tepat sasaran.”. (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Dari hasil wawancara dengan I₁₋₅ diatas bahwa, saat ini nelayan penangkap ikan dan udang sudah sulit untuk mencari ikan dipesisir pantai Desa Cigondang dan sekitarnya karena sudah tercemar oleh limbah air panas yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan. Selain itu terdapat bantuan untuk masyarakat namun tidak tepat sasaran. Selanjutnya I₁₋₅ juga menjelaskan bahwa :

“Kalau nelayan yang penting perahunya aja, mesin gede. Kalau Sumber Daya Alam waktu itu sudah ada pemberdayaan sumber daya alam waktu itu pernah di bikin disini, seperti jenis rumput laut tapi bukan rumput untuk bikin cincau, emang kemarin dicoba disini tapi tidak jadi karena faktor alam juga”. (Wawancara dengan I₁₋₅ pada tanggal 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang Kecamatan Labuan, pukul 17.12 WIB).

Dari hasil wawancara dengan I₁₋₅ bahwa nelayan membutuhkan perahu dan mesin berkapasitas besar, pihak PLTU diminta untuk langsung *survey* ke lapangan agar dapat mengetahui apa saja keluhan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ada pemberdayaan Sumber Daya Alam seperti jenis rumput laut yang dibuat menjadi bahan makanan seperti cincau, namun sudah tidak berjalan lagi karena adanya faktor alam.

Pembangunan PLTU Banten 2 Labuan mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan. Keuntungannya yakni banyak masyarakat lokal yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan sebagai buruh kasar seperti pengangkut batu bara, *security*, pembabat rumput dan OB (*Office Boy*), dan kerugian yang dirasakan masyarakat Desa Cigondang berdampak langsung kepada nelayan-nelayan kecil dan petani karena hasil tangkapan nelayan-nelayan kecil sekarang menjadi menurun akibat rusaknya biota laut yang mengakibatkan langkanya ikan di Pesisir Pantai Desa Cigondang. Komponen krisis yang dibutuhkan oleh nelayan yaitu hanya perahu dan mesin yang berkapasitas besar agar nelayan dapat mencari ikan ke tempat yang potensi ikannya jauh lebih banyak. Selain itu komponen krisis lainnya yaitu memperbaharui dan memperbaiki kualitas biota laut yang sudah mulai rusak untuk bisa menjaga pasokan ikan yang cukup, karena ikan membutuhkan tempat tinggal yang baik.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan yakni mencakup pemaparan lebih lanjut dari hasil analisis data yang ditujukan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait masing-masing indikator komponen sosial ekonomi dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan teori dari Suratmo (2004:116) untuk mengukur indikator sosial ekonomi masyarakat dapat diukur oleh setidaknya sembilan indikator sosial ekonomi, yaitu pola perkembangan penduduk, pola perpindahan, pola perkembangan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, berkembangnya struktur ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan lapangan pekerjaan, kesehatan masyarakat, bentuk komponen krisis lain. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator sosial ekonomi dalam penelitian mengenai “Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten”.

4.3.1 Pola Perkembangan Penduduk

Pola perkembangan penduduk (jumlah, umur, perbandingan kelamin dan sebagainya) pola perkembangan penduduk pada masa-masa yang lalu sampai sekarang perlu diketahui. Pola perkembangan penduduk di Desa Cigondang jika di lihat dari perhitungan perbandingan jenis kelamin, angka ketergantungan dan angka kepadatan penduduk pada analisis data diatas, dapat diketahui bahwa Desa Cigondang memiliki kepadatan penduduk diatas rata-rata yakni 8.553 perkilo meter persegi, memiliki ketergantungan pada penduduk usia produktif sebanyak 49,066% yang menunjukkan bahwa

penduduk Desa Cigondang belum bisa dikatakan penduduk yang berkembang, karena masih banyak masyarakat terutama nelayan yang susah mencari ikan akibat dari dampak pembangunan PLTU Banten 2 Labuan. Desa Cigondang merupakan salah satu Desa yang memiliki ketergantungan pada sumber daya yang tersedia untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dapat dilihat pada tabel 4.9 bahwa, masyarakat Desa Cigondang yang buta aksara sebanyak 687 orang, masyarakat yang tidak tamat SD/ sederajat sebanyak 554 orang dan masyarakat yang tidak tamat SLTP/ sederajat sebanyak 901 orang, sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Cigondang masih terbilang cukup rendah. Selain itu anak-anak tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena tingkat keinginan untuk bekerja sebagai nelayan lebih besar jika dibandingkan dengan keinginan untuk bersekolah seperti anak-anak yang lain pada umumnya karena keterbatasan ekonomi yang di alami oleh masyarakat Desa Cigondang dan sekitarnya. Selain itu pada tahun 2011 jumlah penduduk Desa Cigondang sebanyak 8.507 jiwa yaitu dengan jumlah laki-laki sebanyak 4.527 jiwa dan perempuan sebanyak 3.980 jiwa, pada tahun 2012 jumlah penduduk Desa Cigondang mengalami penurunan dengan 8.016 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 4.235 jiwa dan perempuan sebanyak 3.781 jiwa dan pada tahun 2013 terdapat peningkatan jumlah penduduk sebanyak 8.382 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 4.435 jiwa dan perempuan sebanyak 3.947 jiwa. Dengan kata lain bahwa dampak adanya pembangunan PLTU Banten 2 Labuan belum memiliki dampak positif

terhadap pertumbuhan penduduk Desa Cigondang. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti saat berada di tempat penelitian dan berdasarkan dari hasil wawancara dengan para informan tentang pola perkembangan penduduk bahwa penduduk Desa Cigondang merupakan penduduk yang belum berkembang, karena kesejahteraan masyarakat dapat tercermin pada tingkat keberhasilan pendidikan masyarakat.

4.3.2 Pola Perpindahan Penduduk

Pola perpindahan ini erat hubungannya dengan perkembangan penduduk, pola perpindahan yang perlu diketahui adalah perpindahan ke luar dan masuk ke dalam suatu daerah secara umum, serta pola perpindahan musiman dan tetap. Perpindahan penduduk yang di alami masyarakat Desa Cigondang merupakan perpindahan penduduk yang memiliki pola perpindahan yang tetap. Ada beberapa masyarakat yang pindah karena tanah yang mereka miliki telah dijual dan masyarakat yang tidak memiliki rumah dan tanah pribadi, lebih banyak mengontrak di Desa Cigondang diatas tanah wakaf. Adapun beberapa masyarakat yang pindah ke dalam Desa Cigondang hanya musiman. Biasanya masyarakat yang berpindah musiman ini bekerja sebagai nelayan yang mencari ikan ke tempat yang potensi ikannya lebih banyak di daerah Kecamatan Labuan, seperti nelayan dari Indramayu berpindah ke dalam Desa Cigondang hanya beberapa waktu saja dan pada musim tertentu saja. Beberapa masyarakat dari luar Desa Cigondang yang berpindah ke dalam Desa Cigondang biasanya memiliki usaha sendiri, misalnya jika usahanya berjalan dengan baik seperti berjualan kecil-kecilan,

maka masyarakat biasanya bertempat tinggal menetap di Desa Cigondang, namun jika usahanya tidak berjalan dengan baik biasanya masyarakat tersebut berpindah lagi keluar Desa Cigondang dan mencari peluang usaha baru yang lainnya. Selain itu karyawan yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan yang berasal dari luar Desa Cigondang menetap dalam waktu sementara di Desa Cigondang selama masyarakat tersebut bekerja di PLTU Banten 2 Labuan. Dalam hasil pengamatan yang dilakukan peneliti saat berada di tempat penelitian, melihat bahwa dalam indikator pola perpindahan penduduk Desa Cigondang sebagian besar masyarakat yang berpindah ke dalam Desa Cigondang adalah tetap. Sebagian masyarakat menjual tanahnya karena keterbatasan ekonomi yang mengharuskan menjual tanahnya kepada oranglain dan masih tetap tinggal di daerah Desa Cigondang. Masyarakat hanya berpindah RT (Rukun Tetangga) saja dengan mengontrak rumah. Sesuai data daftar isian potensi Desa dan Kelurahan pada tahun 2012 bahwa jumlah penduduk Desa Cigondang sebanyak 8.016 jiwa dengan jumlah laki laki sebanyak 4.235 jiwa dan perempuan sebanyak 3.781 jiwa dan mengalami peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2013 yaitu dengan jumlah 8.382 jiwa, jumlah laki-laki sebanyak 4.435 jiwa dan perempuan sebanyak 3.947 jiwa. Dengan kata lain bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk karena jumlah dari karayawan PLTU yang berdomisili dari luar Kecamatan Labuan sebanyak 207 orang dan bertempat tinggal sementara di Desa Cigondang dan sekitarnya. Selain itu masyarakat yang memiliki lahan pertanian disekitar area PLTU Banten 2 Labuan telah dijual untuk pelebaran proyek PLTU Banten 2

Labuan pada tahun 2015, namun sampai saat ini proyek tersebut belum berjalan. Beberapa buruh tani kehilangan mata pencahariannya karena lahan pertanian sudah dijual oleh pemiliknya kepada PLTU Banten 2 Labuan.

4.3.3 Pola Perkembangan Ekonomi

Pola perkembangan ekonomi masyarakat ini erat hubungannya pula dengan pola perkembangan penduduk, perpindahan, keadaan sumberdaya alam yang tersedia dan sumber pekerjaan yang tersedia. Perekonomian masyarakat Desa Cigondang terdiri dari hasil pertanian, peternakan, nelayan. Perekonomian Desa Cigondang di dominasi oleh sektor perdagangan sebanyak 500 orang, dari sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga sebanyak 469 orang, petani dan buruh tani sebanyak 191 orang dan nelayan sebanyak 210 orang seperti yang telah dipaparkan pada tabel 4.10. Pertanian dan perikanan adalah mata pencaharian turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cigondang. Perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang belum mengalami perubahan yang diharapkan oleh masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan petani, karena sebagian besar masyarakat Desa Cigondang menggantungkan kebutuhan hidupnya pada hasil laut dan pertanian yang diperoleh setiap harinya. Dalam pengamatan peneliti saat berada di tempat penelitian bahwa perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang belum ada perubahan khususnya bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan petani, namun bagi masyarakat yang membuka usaha dengan berjualan di area PLTU Banten 2 Labuan telah mengalami perubahan ekonomi walaupun tidak meningkat secara pesat. Selain itu masyarakat yang

bekerja di PLTU Banten 2 Labuan telah mengalami perubahan ekonomi karena dapat memenuhi kebutuhan dalam keluarganya. Masyarakat yang membuka usaha rumah sewa mengalami peningkatan pendapatan karena karyawan PLTU Banten 2 Labuan yang berdomisili diluar Kecamatan Labuan sebanyak 207 orang dan bertempat tinggal sementara di Desa Cigondang dan sekitarnya dengan menyewa rumah dalam waktu yang cukup lama.

4.3.4 Penyerapan Tenaga Kerja

Masalah pengangguran merupakan masalah umum khususnya di Negara berkembang. Negara majupun saat ini tengah mengalami masalah tersebut. Banyaknya pembangunan dapat menyerap tenaga kerja sekitar dan makin besar dampak positifnya, sekalipun harus mengadakan pendidikan khusus. Dampak penyerapan tenaga kerja tidak selalu berupa dampak langsung tetapi juga dampak tidak langsung, artinya timbulnya sumber-sumber pekerjaan yang baru dan ini merupakan komponen berikutnya yang penting. PLTU Banten 2 Labuan telah banyak menyerap tenaga kerja lokal khususnya Kecamatan Labuan dengan jumlah 371 orang tenaga kerja yang terserap dan bekerja di lima elemen yaitu, *security* sebanyak 39 orang, *cleaning service* sebanyak 246 orang, koperasi sebanyak 55 orang, cogindo sebanyak 30 orang dan Indonesia Power sebanyak 1 orang. Dari hasil penelitian langsung oleh peneliti di lapangan mengenai indikator penyerapan tenaga kerja bahwa masyarakat lokal yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan sebagian besar bekerja sebagai karyawan kontrak seperti buruh kasar yakni pengangkut batu bara, pembabat rumput, OB (*Office Boy*), *Security*, adapun

beberapa masyarakat lokal yang bekerja di bagian *Staff* dan koperasi tetapi tidak banyak. Dari hasil temuan dilapangan bahwa sebenarnya tidak banyak masyarakat lokal yang diberikan kesempatan untuk bekerja, karena karyawan tetap semua berasal dari luar Desa Cigondang Kecamatan Labuan seperti dari daerah Surabaya dan dari daerah Sumatera. Jika dilihat bahwa sebenarnya masyarakat lokal mempunyai berbagai macam kemampuan, keterampilan dan pengetahuan, seperti ahli pembukuan, ahli mekanik dan ahli dalam pengoperasian komputer. Sebenarnya masyarakat lokal mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan keahlian untuk semua yang diperlukan oleh PLTU Banten 2 Labuan, namun saat ini masyarakat sekitar tidak dapat terserap secara maksimal oleh PLTU Banten 2 Labuan dan sebagian besar masyarakat lokal yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan hanya sebagai karyawan kontrak seperti *cleaning service* sebanyak 246 orang dari Kecamatan Labuan dan sudah termasuk Desa Cigondang dan *security* sebanyak 39 orang dari Kecamatan Labuan dan sudah termasuk Desa Cigondang. Semua karyawan yang diserap oleh PLTU Banten 2 Labuan dilihat dari latar belakang pendidikan serta kemampuan yang dimilikinya. Adapun karyawan tetap yang berasal dari Kecamatan Labuan hanya beberapa orang saja yang ditempatkan di berbagai elemen seperti koperasi 55 orang dan Indonesia Power (IP) 1 orang dari Kecamatan Labuan sudah termasuk Desa Cigondang. Dengan kata lain PLTU Banten 2 Labuan 2 belum menyerap secara maksimal masyarakat Desa Cigondang.

4.3.5 Berkembangnya Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi disini dimaksudkan dengan timbulnya aktifitas perekonomian lain akibat adanya pembangunan tersebut, sehingga merupakan sumber-sumber pekerjaan baru yang sering dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari yang terserap oleh pembangunan. Misalnya hotel, rumah sewa, restoran, warung, transportasi umum, toko-toko dan lain sebagainya. Struktur ekonomi masyarakat Desa Cigondang belum dapat dikatakan berkembang, karena dampak negatif lebih banyak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar karena aktivitas dari PLTU Banten 2 Labuan. Adapun aktivitas perekonomian lain selain masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan jika tidak ada hasil tangkapan, nelayan tersebut beralih profesi yaitu bekerja sebagai tukang bangunan jika terdapat peluang usaha, namun jika tidak ada peluang usaha maka nelayan tersebut menganggur untuk beberapa waktu sampai memiliki hasil tangkapan yang banyak, dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani jika tidak ada pekerjaan, petani tersebut bekerja sebagai tukang becak dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dari hasil penelitian dilapangan bahwa indikator mengenai berkembangnya struktur ekonomi masyarakat Desa Cigondang belum berkembang, karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki peluang usaha yang baru karena keterbatasan ekonomi yang mereka miliki, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, jika tidak ada peluang usaha yang baru maka mereka tidak memiliki pekerjaan dan pada akhirnya banyak nelayan yang menganggur serta petani yang tidak bekerja hanya mengandalkan hasil dari pekerjaan mereka sehari-

hari seperti tukang becak dan pembantu rumah tangga. Selain itu dampak positif dapat dirasakan oleh masyarakat yang membuka usaha seperti rumah sewa karena karyawan PLTU yang berdomisili dari luar Kecamatan Labuan bertempat tinggal sementara di Desa Cigondang dalam waktu yang cukup lama, sehingga masyarakat sekitar mendapatkan keuntungan.

4.3.6 Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Keadaan umum untuk masyarakat di Negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan baik secara langsung atau tidak langsung dari pembangunan akan memberikan dampak yang berarti. Sering ada proyek yang melayani sendiri kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dari pegawainya dan membuat kompleks perumahan dan fasilitas lain sendiri. Kebijakan ini sebenarnya mengurangi dampak positif dari perekonomian masyarakat dan secara tidak sadar membuat tembok pemisah yang tidak terlihat dengan masyarakat setempat, sering juga disebut sebagai masyarakat modern yang bersaing. Hal ini akan memberikan dampak negatif pada interaksi karyawan pada proyek masyarakat setempat.

Pendapatan masyarakat Desa Cigondang yang terkena dampak langsung tentunya belum mengalami perubahan peningkatan, terlebih untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang mengalami kemerosotan hasil tangkapan ikan yang berpengaruh kepada pendapatan masyarakat. Hasil penangkapan para nelayan sebelum adanya PLTU Banten 2 Labuan yakni dengan modal Rp 200.000,- bisa mendapatkan hasil Rp 400.000,- namun setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan menurun menjadi Rp 300.000,-. Hal

ini mengakibatkan penurunan pendapatan pada masyarakat Desa Cigondang terutama masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Pendapatan penangkapan ikan nelayan tradisional Desa Cigondang dan sekitarnya menurun setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan sesuai data yang terdapat pada TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 3 yang terdapat di pasar Labuan, yaitu pada tahun 2013 penjualan sebesar Rp. 333.003, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar Rp. 201.936,58. Nelayan saat ini harus mencari ikan ke tempat yang berlokasi cukup jauh dari daerah penangkapan sebelumnya, karena pesisir pantai Desa Cigondang dan sekitarnya telah tercemar akibat dampak negatif dari aktivitas PLTU Banten 2 Labuan seperti limbah air panas yang dibuang ke laut dan mengakibatkan biota laut menjadi rusak. Selain itu masyarakat yang berprofesi sebagai petani belum mengalami peningkatan pendapatan karena kebanyakan dari petani bekerja di lahan pertanian milik orang lain dan hasil pertaniannya di bagi rata antara buruh tani dan pemilik lahan pertanian. Adapula pedagang dari luar Desa Cigondang yang berjualan di area sekitar PLTU Banten 2 Labuan yang mendapatkan keuntungan lebih besar, karena sebelumnya pedagang tersebut hanya berjualan di dekat area rumah dan tidak mendapatkan keuntungan yang lebih besar tidak seperti saat berjualan di area sekitar PLTU Banten 2 Labuan. Masyarakat lokal yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan merasakan peningkatan pendapatan, karena sebelumnya masyarakat tersebut tidak memiliki pekerjaan, namun dengan adanya PLTU Banten 2 Labuan masyarakat tersebut dapat terserap dan bekerja di PLTU Banten 2 Labuan, serta mengalami peningkatan pendapatan.

Melalui tanggung jawab sosial yang dijalankan, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Pemberian dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) ada yang berbentuk uang dan barang, jika dalam bentuk barang seperti pembuatan perahu bagi nelayan Desa Cigondang, ada yang berbentuk ekonomi yang diberikan kepada pedagang kecil. Bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) diberikan langsung oleh PLTU Banten 2 Labuan kepada Kepala Desa Cigondang dan dibagikan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas pembangunan PLTU Banten 2 Labuan dan masyarakat yang berada di bawah rata-rata garis kemiskinan. Tetapi banyak masyarakat yang belum merasakan bantuan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani mengatakan bahwa bantuan tersebut belum pernah mereka rasakan, adapun bantuan lain namun tidak tepat sasaran. Dari hasil penelitian lapangan mengenai indikator peningkatan pendapatan penduduk bahwa masyarakat yang mengalami peningkatan pendapatan hanya yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan dan pedagang kecil dari luar Desa Cigondang yang berjualan di area sekitar PLTU Banten 2 Labuan. Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan petani tidak mengalami peningkatan pendapatan. Selain itu bantuan CSR (*corporate social responsibility*) lainnya yaitu berupa uang yang diberikan secara bergulir sebesar Rp. 100.000,- hingga Rp. 300.000,- per kepala rumah tangga. Selain

itu bantuan fisik seperti perbaikan jalan dengan menggunakan *paving blok* di jalan-jalan kecil Desa Cigondang, pemberian mesin untuk produksi kerupuk, mesin penggiling tepung ikan untuk pembuatan pur, penanaman pohon toga untuk pengobatan gizi buruk, adapun bantuan kesehatan berupa pengobatan gratis 1 (satu) tahun sekali yang diberikan PLTU Banten 2 Labuan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif, namun tidak sepenuhnya masyarakat Desa Cigondang dapat menerimanya karena persebaran bantuan sosial tersebut tidak merata dan tidak tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang mendapatkan bantuan dengan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

4.3.7 Perubahan Lapangan Pekerjaan

Dengan timbulnya lapangan pekerjaan baru baik yang langsung atau tidak langsung karena perkembangan struktur ekonomi perlu diperhatikan karena tidak selalu perubahan itu menguntungkan bagi masyarakat secara umum. Misalnya enggannya pemuda-pemudi untuk bekerja sebagai petani, mereka lebih memilih bekerja sebagai buruh atau pemberi jasa walaupun penghasilan dan pengeluarannya lebih buruk. Sudah ada perubahan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, namun belum sepenuhnya masyarakat Desa Cigondang dapat bekerja di PLTU Banten 2 Labuan karena mengingat keterbatasan PLTU Banten 2 Labuan yang tidak mungkin menyerap semua masyarakat yang berada di Desa Cigondang Kecamatan Labuan. Dari hasil penelitian di lapangan mengenai indikator perubahan lapangan pekerjaan belum ada perubahan secara maksimal karena masih banyak masyarakat lokal

yang tidak terserap bekerja di PLTU Banten 2 Labuan, dapat di lihat pada tabel 4.10 bahwa masyarakat yang belum dan tidak bekerja sebanyak 685 orang. Masyarakat lokal yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan di tempatkan di berbagai elemen seperti *security* sebanyak 39 orang, *cleaning service* sebanyak 246 orang, cogindo sebanyak 30 orang, koperasi sebanyak 55 orang dan Indonesia Power (IP) hanya 1 orang, namun memang banyak masyarakat yang ditempatkan dibagian buruh kasar karena tidak memiliki latar pendidikan yang cukup.

4.3.8 Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat dan erat pula kaitannya dengan kebiasaan kehidupannya. Misalnya kebiasaan mandi, cuci, dan keperluan sehari-hari untuk makan dan minum yang masih menggunakan air sungai. Maka pencemaran air dari proyek akan langsung mengenai kesehatan masyarakat, begitu halnya dengan pencemaran udara dan kebisingan. Dampak adanya pembangunan PLTU Banten 2 Labuan di Pesisir Pantai Desa Cigondang Kecamatan Labuan memiliki dampak yang negatif bagi kesehatan masyarakat Desa Cigondang. Masyarakat mengeluhkan kebisingan yang timbul dari aktivitas PLTU Banten 2 Labuan sangat mengganggu masyarakat Desa Cigondang dan sekitarnya, debu yang dihasilkan oleh boiler PLTU Banten 2 Labuan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat Desa Cigondang dan sekitarnya, serta masyarakat merasakan sesak nafas jika debu sudah terbang ke daerah Desa Cigondang dan sekitarnya. Adapun bantuan untuk kesehatan seperti pengobatan gratis

diadakan satu tahun sekali, namun masyarakat mengatakan bahwa pengobatan gratis tersebut belum berjalan secara optimal, karena biaya transportasi untuk ke PLTU Banten 2 Labuan lebih besar dan diharapkan pengobatan gratis tersebut di adakan di Desa Cigondang agar seluruh masyarakat yang terkena dampak langsung bisa berobat dan masyarakat Desa Cigondang tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar jika pengobatan tersebut diadakan di Desa Cigondang dan sekitarnya. Adapun bantuan pengobatan gratis yang diberikan kepada masyarakat sekitar pada bulan februari 2015 dan diikuti oleh 1.000 peserta dari kecamatan Labuan dan kecamatan Panimbang. Pengobatan gratis tersebut berjalan hanya satu tahun sekali. Dalam penelitian langsung di lapangan mengenai indikator kesehatan masyarakat yaitu bahwa, memang jika dilihat abu yang dihasilkan boiler PLTU Banten 2 Labuan bisa berpengaruh jangka panjang kepada kesehatan masyarakat sekitar. Pada malam hari suara bising yang dihasilkan oleh aktivitas PLTU Banten 2 Labuan mengganggu istirahat masyarakat sekitar. Adapun pengobatan gratis yang diberikan kepada masyarakat sekitar terutama 4 desa penyanggah termasuk Desa Cigondang yang diberikan 1 (satu) tahun sekali, diadakan langsung di kantor PLTU Banten 2 Labuan, namun dari hasil temuan langsung dilapangan bahwa masyarakat sekitar masih mengeluhkan belum pernah mendapatkan bantuan seperti pengobatan gratis tersebut.

4.3.9 Bentuk Komponen Krisis

Bentuk komponen lain yaitu sumberdaya alam yang sangat langka dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya air, disuatu tempat dimana air sangat sedikit sekali sehingga masyarakat sangat menggantungkan hidupnya pada air tersebut akan merupakan dampak besar bagi masyarakat.

Desa Cigondang merupakan pesisir desa yang memiliki potensi tangkapan ikan yang melimpah sebelum adanya PLTU Banten 2 Labuan, namun setelah berdirinya PLTU Banten 2 Labuan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan mengeluhkan susahya dalam menangkap ikan karena limbah air panas yang sudah mencemari pesisir pantai Desa Cigondang dan sekitarnya. Akibatnya nelayan sekarang mencari ikan harus ke tempat yang potensi ikannya lebih banyak karena ikan dan udang di pesisir pantai Desa Cigondang sudah semakin langka. Komponen krisis yang dibutuhkan oleh nelayan yaitu hanya perahu dan mesin yang berkapasitas besar agar nelayan dapat mencari ikan ke tempat yang tidak terjangkau dengan potensi ikan yang lebih banyak. Dari hasil penelitian langsung dilapangan mengenai indikator bentuk komponen krisis yaitu bahwa limbah panas yang dibuang ke laut berpengaruh kepada mata pencaharian nelayan karena air menjadi coklat keruh sehingga nelayan kesulitan dalam mencari ikan akibat biota laut yang sudah rusak, sehingga potensi ikan di pesisir pantai Desa Cigondang dan sekitarnya semakin berkurang. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan kecil membutuhkan komponen kritis seperti memperbaharui dan memperbaiki kualitas biota laut yang sudah mulai rusak untuk bisa menjaga

pasokan ikan yang cukup, karena ikan membutuhkan tempat tinggal yang baik.

Berdasarkan dari hasil pembahasan dari masing-masing indikator sosial ekonomi menurut Suratmo di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, dampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan berpengaruh kepada dampak sosial dan dampak ekonomi masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan. Karena masih terdapat dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar seperti pencemaran limbah air panas yang merusak biota laut sehingga berdampak langsung pada penurunan pendapatan nelayan Desa Cigondang dan sekitarnya, menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat sekitar, karena abu yang dihasilkan oleh PLTU Banten 2 Labuan mengganggu pernafasan masyarakat sekitar dan membuat mata menjadi perih, selain itu ada beberapa masyarakat yang merasakan dampak positif yaitu masyarakat yang berasal dari Kecamatan Labuan yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan ditempatkan diberbagai elemen seperti PT. Indonesia Power (IP), PT. Cogindo Daya Bersama, Koperasi Kekal, *cleaning service*, *security* dan masyarakat yang berjualan di sekitar area PLTU Banten 2 Labuan serta masyarakat yang membuka usaha seperti rumah sewa sehingga menambah pendapatan masyarakat tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusah masalah penelitian yaitu bagaimana dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Banten 2 Labuan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten, maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari dampak sosial yaitu, Desa Cigondang memiliki perkembangan penduduk yang tidak stabil serta memiliki pola perpindahan penduduk yang menetap, selain itu dampak dari adanya debu yang dihasilkan oleh aktivitas PLTU Banten 2 Labuan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, seperti gangguan pernafasan dan membuat mata menjadi perih. Selain itu perusahaan telah memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat melalui program CSR (*corporate social responsibilty*) dalam bentuk pengobatan gratis bagi empat desa penyanggah yaitu Desa Sukamaju, Desa Margasana, Desa Margagiri dan termasuk Desa Cigondang, bantuan pendidikan seperti pembangunan MCK pada beberapa sekolah di Kecamatan Labuan dan pemberian bantuan lainnya dalam rangka membantu masyarakat secara umum.

2. Dari dampak ekonomi keberadaan PLTU Banten 2 Labuan dianggap belum mengalami perubahan yang diharapkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, bisa dilihat dari pendapatan masyarakat terutama yang bekerja sebagai nelayan bahwa pendapatan masyarakat setelah adanya pembangunan PLTU Banten 2 Labuan semakin menurun terutama masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, karena nelayan sekitar harus mencari ikan ke tempat yang lebih jauh dengan potensi ikan yang lebih banyak karena telah tercemarnya pesisir pantai di Kecamatan Labuan. Selain itu belum ada perubahan perkembangan ekonomi karena masyarakat sekitar menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang tersedia. Namun disisi lain terdapat keuntungan bagi pedagang yang berjualan di area sekitar PLTU Banten 2 Labuan dan memberikan keuntungan juga bagi masyarakat yang membuka rumah sewa untuk karyawan PLTU yang berasal dari luar Kecamatan Labuan. Selain itu PLTU Banten 2 Labuan sudah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, walaupun belum terserap secara maksimal tenaga kerja dari Desa Cigondang Kecamatan Labuan. Masyarakat lokal yang bekerja di PLTU Banten 2 Labuan ditempatkan diberbagai elemen, yaitu *Cleaning Service*, *Security*, PT. Indonesia Power (IP), PT. Cogindo Daya Bersama dan Koperasi Kekal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan dari apa yang peneliti temukan dilapangan mengenai dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Banten 2 Labuan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten, maka saran yang peneliti ajukan yaitu:

1. Dari dampak sosial yaitu, memperbaharui dan memperbaiki kualitas biota laut yang sudah mulai rusak. Memberikan bantuan kepada nelayan kecil berupa kapal dan mesin yang berkapasitas besar agar para nelayan kecil dapat mencari ikan ke tempat yang potensi ikannya jauh lebih banyak seperti lautan luas yang memungkinkan nelayan kecil dapat menghasilkan jumlah tangkapan ikan yang jauh lebih banyak. Pihak PLTU Banten 2 Labuan juga harus menciptakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dapat membangun kemandirian masyarakat sekitar sehingga masyarakat tidak bergantung pada PLTU Banten 2 Labuan.
2. Dari dampak ekonomi yaitu, PLTU Banten 2 Labuan harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar pada umumnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat sekitar sehingga PLTU Banten 2 Labuan dapat menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas dan dapat membuka peluang pekerjaan serta menyerap tenaga kerja secara

maksimal bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pembangunan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, Jakarta : FE UI.
- Afifuddin. 2012. *Pengantar administrasi pembangunan (Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi)*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bruce Mitchell, B. Setiawan dan Dwita Hadi 2003. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Bungin, burhan.2007. *Analisis Data PenelitianKualitatif*.Jakarta :Rajawali Press.
- Dahuri Rokhmin dan Ginting Sapta Putra, 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta : Balai pustaka.
- Edi, Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama.
- Ginting, Perdana. 2007. *Sisitem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*. Bandung : Yrama Widya.
- Irawan, Prasetya. 2005. *PenelitianKualitatif&KuantitatifUntukIlmu-IlmuSosial*. DIA FISIP UI.
- _____. 2006. *PenelitianKualitatif&KuantitatifUntukIlmu-IlmuSosial*. DIA FISIP UI.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung : Rosdakarya.
- Moleong, Ixey.J. 2007. *MetodePenelitianKualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Grafika Indonesia. Bandung.
- Prastowo, Andi. 2011.*Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perpektif Rancangan Penelitian*.Yogyakarta : Arruzz Media.

- Sjafari, Agus dan Sumaryo GS. 2012. *Pembangunan Masyarakat (Teori dan Implementasi di Era Otonomi Daerah)*. Serang : FISIP Untirta Press.
- Soekartawi. 1995. *Analisis Usaha Tani*. Jakarta : UI Press.
- Solihin. 2008. *Corporate Social Responsibility from charity to sustainability*. Jakarta : Salemba empat.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suratmo, Gunarwan. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Susanto, A.B. 2007. *Corporate Social Responsibility: A Strategic Management Approach*. Jakarta : The Jakarta Counsulting Group..
- Purba, Jhony. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara.

SUMBER LAIN :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Daerah Nomor 2 Tahun 2011 mengenai tata ruang wilayah Provinsi Banten.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Data ANDAL PLTU BANTEN 2 Labuan.

Dampak Pertambangan Pasir Pada Lingkungan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Desa Pancanegara Kecamatan Paburuan Kabupaten Serang, oleh Kiki Rizki Desianti, Untirta, Tahun 2012

www.dahana.com/berita/resmi-dibangun-pltu-banten-1x660-mw-sebagai-suplai-sistem-jawa-bali/ (di unggah pada tanggal 04/11/2014, Pukul 20.28).

<http://irmawidiyanti.blogspot.com/2011/04/makalah-pltu-untuk-mata-kuliah-ostl.html>.

<http://belajar-pltu.blogspot.com/2011/05/pengertian-pltu.html>.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Apa saja kontribusi perusahaan bagi masyarakat ?
2. Bagaimana Perkembangan penduduk bila dilihat dari perkembangan jumlah penduduk secara umum dan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan yang terkena dampak langsung dari adanya pembangunan PLTU di pesisir pantai Kecamatan Labuan ?
3. Apakah PLTU Banten 2 Labuan di Kecamatan Labuan ada pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi khususnya di Desa Cigondang ?
4. Apakah berdirinya PLTU Banten 2 Labuan di Kecamatan Labuan sudah memenuhi aspek-aspek pembangunan ?
5. Apa sajakah dampak positif dan negatif dengan adanya pembangunan PLTU Banten 2 Labuan ?
6. Bagaimana dengan hasil pertanian, perikanan/penjualan masyarakat di Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?
7. Bagaimana pola perpindahan penduduk Desa Cigondang?
8. Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang secara umum, baik yang dilihat dari profesi maupun ekonomi masyarakat ?
9. Apakah ada bantuan dana CSR kepada masyarakat sekitar? (Jika ada dalam bentuk apa CSR tersebut ?)
10. Bagaimana penyerapan tenaga kerja masyarakat ?
11. Apakah jumlah pengangguran berkurang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan di Desa Cigondang ?
12. Seperti apa perubahan lapangan pekerjaan yang terjadi ?
13. Apakah banyak masyarakat sekitar yang bekerja di PLTU ?
14. Bekerja sebagai apa masyarakat local di PLTU ini ?
15. Mengenai struktur berkembangnya struktur ekonomi, apakah timbulnya aktivitas baru dalam menunjang ekonomi masyarakat ?
16. Bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat ?
17. Apakah terjadi kemerosotan hasil tangkapan ikan ?

18. Apakah terdapat dampak negatif yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dengan adanya pembangunan PLTU ?
19. Bentuk komponen krisis apa yang dibutuhkan masyarakat ?
20. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PLTU ?
21. Bagaimana pendapatan masyarakat di Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?
22. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?
23. Adakah dampak sosial yang ditimbulkan dari berdirinya PLTU Banten 2 Labuan yang ada di Kecamatan Labuan ?
24. Terdapat kerjasama atau tidak dari pihak PLTU dengan LSM? (jika ada dalam bentuk apa?)
25. Berapa pendapatan per kapita atau gaji yang diterima para karyawan ?
26. Sejauh mana peranan BLHD Kabupaten Pandeglang terhadap dampak PLTU yang ada di kecamatan Labuan ?
27. Apakah ada pengawasan dari BLHD Pandeglang terhadap dampak PLTU yang ada di Kecamatan Labuan ?
28. Bagaimana proses pengendalian pencemaran laut/perusakan laut ?
29. Bagaimana status pencemaran yang terjadi di kawasan laut di Labuan ?

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI

Q I	I₁₋₁ (Bapak Sopian, selaku nelayan Desa Cigondang Kecamatan Labuan) Hari Rabu, 23 Juli 2015 Di pesisir pantai Desa Cigondang
Q ₁	<p>Apa saja kontribusi dari perusahaan yang diberikan untuk masyarakat ?</p> <p><i>Kalau kontribusi dari perusahaan pernah ada dana untuk masyarakat sekitar tapi tidak dimeratakan hanya orang-orang tertentu, yang menerima itu bagang kambang padahal harusnya nelayan-nelayan kecil kaya gini yang dibantu, kalau bagang kambang kan itu perahu besar dan nyari nya juga keluar bukan di daerah sini</i></p>
Q ₂	<p>Bagaimana Perkembangan penduduk bila dilihat dari perkembangan jumlah penduduk secara umum dan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan yang terkena dampak langsung dari adanya pembangunan PLTU di pesisir pantai Kecamatan Labuan ?</p> <p><i>Untuk perkembangan penduduk ya saya kurang tau juga neng tapi kalo perbedaan yang dulu dulu sama yang sekarang sih enakan yang dulu neng, enakan yang dulu kenapa, itukan yang dibangun sama proyek kan tempat nyari nafkah kami, sekarang kan setelah dibangunnya proyek kan mau ga mau kita nyari nya kejauh. Rata-rata nelayan disini itu lulusan SD neng ada juga yang ga tamat SD karena ga punya uang</i></p>
Q ₃	<p>Apa sajakah dampak positif dan negatif dengan adanya pembangunan PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Kalau misalnya sekarang nih kan selagi ada tarolah batu kanan kiri kan bisa kalau lagi musim badai perahu kan bisa sandar dengan aman ya, itu juga</i></p>

	<p><i>kalau misalnya diperbolehkan sama dia, kadang-kadang ada jengkelnya juga, selagi ombak datang berhubung ada batu disinikan ombaknya kesini dampaknya, pas perahu kesini mau kesana berlindung ga boleh itu yang paling jengkel malahan sering dikepung kepung sama petugas bener aja itu, kalau dulu mah misalkan datang ombak disini kan agak ringan, tapi sekarang kalau misalnya ada batu ombak dari sana kan nerjang ke batu balik lagi kesini, bagi nelayan yang perahu perahu kaya gini kan gimana caranya supaya perahu kan selamat berlindung satu satu nya jalan ya lari ke situ, pas lari ke situ dilarang lagi. Dampak positif bagi nelayan kayanya ga ada sih</i></p>
Q4	<p>Bagaimana dengan hasil pertanian, perikanan/penjualan masyarakat di Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Kalau untuk perikanan mah kurang neng, cari ikan harus ke tengah</i></p>
Q5	<p>Bagaimana pola perpindahan penduduk Desa Cigondang?</p> <p><i>Kalau masalah kewarganegaraan mah keluar masuk, yang dari sini banyak yang keluar dan yang dari luar banyak yang kesini, dan masyarakat Desa Cigondang memiliki pola perpindahan yang tetap neng, masyarakat yang pindah ke sini itu biasanya permanen</i></p>
Q6	<p>Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang secara umum, baik yang dilihat dari profesi maupun ekonomi masyarakat ?</p> <p><i>Ya kalau perkembangan ekonomi belum ada perubahan, kalau dibanding sekarang sama yang dulu-dulu mah enakan dulu, enakan dulunya gimana? Itu kan sekarang yang dibangun proyek itu kan tempat cari nafkah barisan kami, sekarang kan setelah dibangun proyek kan kejauh, itu kan pas area karang itu yang dibangun sekarang itu, yang dibikin jalan kapal</i></p>

Q7	<p>Apakah ada bantuan dana CSR kepada masyarakat sekitar? (Jika ada dalam bentuk apa CSR tersebut ?)</p> <p><i>PLTU sama nelayan mah mana pernah toleransinya, saya sendiri belum pernah merasakan bantuan, bukan saya sendiri temen-temen juga mana.CSR apa CSR apa yang namanya bantuan-bantuan itu nol besar kalau dari proyek mah terus terang aja, ga tepat sama apa yang diucapkan dulu jauh. Terus kan sama nelayan nelayan yang kaya gini kan mau istilahnya walaupun ga besar juga ada santunan katanya, ntah itu dari alat tangkap,ntah istilahnya seperti kaya kendaraannya kaya perahu.</i></p>
Q8	<p>Bagaimana penyerapan tenaga kerja masyarakat ?</p> <p><i>Kalau masyarakat lokal mah kurang, kalau lokal kebanyakan kerja dibagian buruh kasar yang pait paitnya aja, kalau yang kantor mah bagian luar kebanyakan, kalau karyawan tetap sedikit neng, kalau karyawan kontrak biasanya banyak</i></p>
Q9	<p>Apakah jumlah pengangguran berkurang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan di Desa Cigondang ?</p> <p><i>Ya ngga sih menurut saya, masih banyak masyarakat sekitar yang jadi pengangguran</i></p>
Q10	<p>Seperti apa perubahan lapangan pekerjaan yang terjadi ?</p> <p><i>Kalau dari proyeknya terbuka untuk semua kalangan sih kayanya perubahan lapangan pekerjaan ada, inikan kadang pilih-pilih, ntah usia, ntah kemampuan. Kebanyakan juga kerja sebagai buruh kasar</i></p>
Q11	<p>Apakah banyak masyarakat sekitar yang bekerja di PLTU ?</p>

	<i>Lokal mah kurang</i>
Q ₁₂	<p>Bekerja sebagai apa masyarakat local di PLTU ini ?</p> <p><i>Di bagian buruh kasar</i></p>
Q ₁₃	<p>Mengenai struktur berkembangnya struktur ekonomi, apakah timbulnya aktivitas baru dalam menunjang ekonomi masyarakat ?</p> <p><i>Ya gitu gitu aja neng, kalau lagi ga ada hasil tangkapan ya kerja jadi tukang bangunan neng, itupun kalau ada yang ngajak, kalau ada job di darat ya kerja di darat kalau ada yang ngajak, kalau ada peluang, kalau ga ada ya gini gini aja, nganggur</i></p>
Q ₁₄	<p>Bagaimana dengan peningkatan pendapatan masyarakat ?</p> <p><i>Menurun meningkat mah ya gitu-gitu aja kalau masalah penghasilan mah, ya kalau penghasilan mah ya nelayan mah gimana ya, dapat satu hari kosong satu minggu aja udah syukur-syukur aja. Nelayan-nelayan gini mah mau cari uang seratus ribu aja jarang ketemu minggu nya, bener neng. PLTU mana ada toleransinya sama nelayan, saya sendiri belum pernah merasakan bantuan bukan saya sendiri, temen-temen juga ga pernah, CSR apa CSR apa itu yang namanya bantuan-bantuan itu nol besar kalau dari proyek mah terus terang aja, ga tepat sama apa yang dijanjikan dulu</i></p>
Q ₁₅	<p>Apakah terjadi kemerosotan hasil tangkapan ikan ?</p> <p><i>Ya sih kurang kurang total, emang dampak ada sih, soalnya kan kalau tumpah batu bara tuh kadang-kadang udang juga kurang, kalau selagi tumpah gitu maksudnya. Itukan pas aera karang yang dibangun sekarang itu yang dibikin jalan kapal itu. Kalau disini itu mati udah ikan-ikan kurang, lain lagi kaya dulu sebelum dibangun jadi ikan kan dari sana bisa nyebrang kesini secara</i></p>

	<i>langsung, sekarang ada batu kan kecegat.</i>
Q ₁₆	<p>Apakah terdapat dampak negatif yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dengan adanya pembangunan PLTU ?</p> <p><i>Kalau untuk kesehatan mah neng kalau ada debu dari batubara itu saya mah kasian sama anak-anak aja, gangguan pernafasan, pilek-pilek mendadak, sesek-sesek pas giliran berobat ya mending kalau ada uang mah, seseknya lumayan itu debunya, kadang mata juga perih</i></p>
Q ₁₇	<p>Bentuk komponen krisis apa yang dibutuhkan masyarakat ?</p> <p><i>Untuk Sumber Daya Alam di Desa Cigondang sekarang mah udah rusak kalau masalah ikan ikan mah, udah langka, ada dampak dari PLTU juga, biasanya kalau tumpah batubara ke laut itu udang udang kurang, ya paling yang dibutuhin itu biota lautnya aja neng dibenerin lagi</i></p>
Q ₁₈	<p>Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PLTU ?</p> <p><i>Gitu gitu aja ga ada peningkatan apa-apa neng</i></p>
Q ₁₉	<p>Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Ya gitu gitu aja sih kalau masalah penghasilan mah, ya memang kebanyakan mah nelayan mah ya dapet satu hari kosongnya satu minggu aja udah syukur syukur aja, nelayan nelayan begini mah pengen cari uang seratu ribu sehari jarang ketemu minggu nya.</i></p>

Q ₂₀	<p>Adakah MOU yang dibangun antara pihak PLTU Banten 2 Labuan dengan pihak kepala Desa dan masyarakat di Desa Cigondang (Kalau ada, apa bentuk MOU nya?)</p> <p><i>Kalau ada perjanjian atau ga nya saya kurang tau menau ya Cuma pas saya lagi kerja disitu, sempet disitukan tertulis, ntah secara tulis, ntah secara lisan itu ada, saya kan sempet pernah kerja disini kan, inikan jalan katanya mau idup, tau kapan ini dibangun, dulu tuh kalau salah itu dari proyek denger seandai iya udah rampung, udah beres istilahnya udah operasi, ini kan rencanya dari pas pinggiran pantai ini kan 100 meter ke air ini mau di DAM dulu saya sempat dengar itu tapi belum ada realisasinya. Dulu juga sayap pernah denger katanya misalnya kalau udah operasi desa yang terdekat aja sama proyek saya denger itu mau di kasih KWH, tapi sampai sekarang belum ada.</i></p>
-----------------	---

<p>Q</p> <p>I</p>	<p>I₁₋₂</p> <p>(Bapak Sumah selaku nelayan Desa Cigondang)</p> <p>Hari Kamis, 23 Juli 2015 Pukul 11.08 WIB Di pesisir pantai Desa Cigondang</p>
Q ₁	<p>Apa saja kontribusi dari perusahaan yang diberikan untuk masyarakat ?</p> <p><i>Ngga ada, ngga ada sama sekali</i></p>
Q ₂	<p>Bagaimana Perkembangan penduduk bila dilihat dari perkembangan jumlah penduduk secara umum dan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan yang terkena dampak langsung dari adanya pembangunan PLTU di pesisir pantai Kecamatan Labuan ?</p>

	<i>Meningkat neng</i>
Q ₃	<p>Apakah PLTU Banten 2 Labuan di Kecamatan Labuan ada pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi khususnya di Desa Cigondang ?</p> <p><i>Ngaruh neng</i></p>
Q ₄	<p>Apa sajakah dampak positif dan negatif dengan adanya pembangunan PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Dampak negatifnya ya itu suka ada debu, kadang suka gelap itu yang bagian disana ga kelihatan kena debu, iya sampe batu itu juga ga kelihatan kalau datang debu itu, terus hasil tangkapan sangat merosot, biasa 100% jadi 50% gitu. Dampak positifnya belum pernah dirasakan.</i></p>
Q ₅	<p>Bagaimana dengan hasil pertanian, perikanan/penjualan masyarakat di Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Ya kadang-kadang kalau lagi ada penjualan itu kadang-kadang dapet seratus ribu, kalau ngga ada sih kosong sama sekali ngga ada</i></p>
Q ₆	<p>Bagaimana pola perpindahan penduduk Desa Cigondang?</p> <p><i>Perpindahannya tetap neng, lebih banyak dari Cigondang ke dalem</i></p>
Q ₇	<p>Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang secara umum, baik yang dilihat dari profesi maupun ekonomi masyarakat ?</p> <p><i>Ngga ada perkembangan sih neng kalau saya rasa, malah kayanya menurun, karena kan sekarang ikan dipinggiran udah jarang harus cari ikan di tengah laut</i></p>

Q ₈	<p>Apakah ada bantuan dana CSR kepada masyarakat sekitar? (Jika ada dalam bentuk apa CSR tersebut ?)</p> <p><i>Belum pernah ada</i></p>
Q ₉	<p>Bagaimana penyerapan tenaga kerja masyarakat ?</p> <p><i>Penyerapan tenaga kerja belum maksimal neng</i></p>
Q ₁₀	<p>Apakah jumlah pengangguran berkurang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan di Desa Cigondang ?</p> <p><i>Berkurang karena banyak yang kerja di PLTU</i></p>
Q ₁₁	<p>Seperti apa perubahan lapangan pekerjaan yang terjadi ?</p> <p><i>Ya perubahan lapangan kerja mah ada sih neng, banyak masyarakat yang bekerja di PLTU</i></p>
Q ₁₂	<p>Apakah banyak masyarakat sekitar yang bekerja di PLTU ?</p> <p><i>Banyak neng yang kerja di PLTU mah, dari mana mana aja itu ada yang dari Labuan, ada yang dari Panimbang kalau yang di daerah sini ada sih ada</i></p>
Q ₁₃	<p>Bekerja sebagai apa masyarakat local di PLTU ini ?</p> <p><i>Tau ya kadang-kadang itu ada yang pembabat rumput gitu, batu bara itu, kerjanya, lebih banyak di buruh kasar</i></p>
Q ₁₄	<p>Mengenai struktur berkembangnya struktur ekonomi, apakah timbulnya aktivitas ?</p> <p><i>Ada sih, paling kalau musim gelombang besar itu ya, saya kerja di darat, apa aja itulah kalau kerja di darat tuh kalau ombaknya besar</i></p>

	<p><i>dilaut kerja di darat, kerja bangunan, kalau disini kalau udah gelombang besar udah ga bisa keluar.</i></p>
Q15	<p>Bagaimana dengan peningkatan pendapatan masyarakat ?</p> <p><i>Ngga ada peningkatan apa apa, ya makin merosot, semakin turun, kalau dapat pendapatan seratus ribu untuk keluarga, untuk beli solar lagi, untuk beli rokok gitu. Perahunya punya orang, punya curagan, saya numpang doang</i></p>
Q16	<p>Apakah terjadi kemerosotan hasil tangkapan ikan ?</p> <p><i>Ada, biasanya bisa dapet 100% sekarang Cuma 50%, ya nyari ke tengah, kalau ga kepinggir, dipinngir masih ada ikan tapi jarang</i></p>
Q17	<p>Apakah terdapat dampak negatif yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dengan adanya pembangunan PLTU ?</p> <p><i>Ya ngaruh sama kesehatan, sesak nafas gitu batuk, kena penyakit, belum pernah ngerasain pengobatan gratis</i></p>
Q18	<p>Bentuk komponen krisis apa yang dibutuhkan masyarakat ?</p> <p><i>Ya yang dibutuhin masyarakat apalagi yang nelayan kaya kami, Cuma butuh perahu yang gede aja gitu, ya itung itung satu perahu untuk beberapa orang saya mah udah bersyukur aja neng</i></p>
Q19	<p>Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PLTU ?</p> <p><i>Ngga ada peningkatan neng, gitu gitu aja</i></p>

Q ₂₀	<p>Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Ngga ada perubahan neng, gitu gitu aja malah saya rasa semakin menurun karena kan ikan sudah sulit didaerah sini mah harus ke tengah</i></p>
Q ₂₁	<p>Adakah MOU yang dibangun antara pihak PLTU Banten 2 Labuan dengan pihak kepala Desa dan masyarakat di Desa Cigondang (Kalau ada, apa bentuk MOU nya?)</p> <p><i>Saya belum pernah denger sih ya neng</i></p>

<p>Q</p> <p>I</p>	<p>I₁₋₃</p> <p>(Emak Juhariah, selaku petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan) Hari Rabu, 23 Juli 2015 Pukul 11.41 Di saung petani Desa Cigondang</p>
Q ₁	<p>Apa saja kontribusi dari perusahaan yang diberikan untuk masyarakat ?</p> <p><i>Ngga ada neng, belum pernah ngerasain bantuan apa apa dari PLTU</i></p>
Q ₂	<p>Bagaimana Perkembangan peunduduk bila dilihat dari perkembangan jumlah penduduk secara umum dan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan yang terkena dampak langsung dari adanya pembangunan PLTU di pesisir pantai Kecamatan Labuan ?</p> <p><i>Ya penduduk mah banyak, saya mah ga tau ya masyarakat disini mah perkembangannya saya rasa sih belum berkembang neng karena banyak masyarakat yang disini kehidupannya masih kaya gitu aja, apalagi para nelayan sekarang cari ikan juga harus ke tempat yang jauh</i></p>

Q ₃	<p>Apakah PLTU Banten 2 Labuan di Kecamatan Labuan ada pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi khususnya di Desa Cigondang ?</p> <p><i>Ngaruh neng</i></p>
Q ₄	<p>Apa sajakah dampak positif dan negatif dengan adanya pembangunan PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Dampak negatifnya ya atuh ada aja neng abu abunya mah item, ya pasti aja ngaruh sama kesehatan, ya namanya juga kalau lagi kerja mah ngebul pan asepanya itu abunya</i></p>
Q ₅	<p>Bagaimana dengan hasil pertanian, perikanan/penjualan masyarakat di Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Ja eta neng ngaruh kering neng ti panas jeung halodo kering, tilu hulu tilu hulu eta neng</i></p>
Q ₆	<p>Bagaimana pola perpindahan penduduk Desa Cigondang?</p> <p><i>Kalau masyarakat disini mah ga tau ya rasanya nambah, orang disini mah tanahnya pada dijual jadi nyedeknya ke sebelah sini. Ya orang ga punya mah paling nyedek kesini neng, ya ngontrak-ngontrak neng, ibu juga ngontrak dari tanah wakaf dan kebanyakan yang pindah kesini itu menetap neng</i></p>
Q ₇	<p>Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang secara umum, baik yang dilihat dari profesi maupun ekonomi masyarakat ?</p> <p><i>Biasa biasa aja barang kali, kalau ini mah ga atau ke dua kali panen ini ya, ga tau ini mah, lagi depan depannya iya kali</i></p>

Q ₈	<p>Apakah ada bantuan dana CSR kepada masyarakat sekitar? (Jika ada dalam bentuk apa CSR tersebut ?)</p> <p><i>Henteu, teu pernah di dieu mah, seperti keur babasaan ieu mah keur ngobrol, keur ngomong saenya na mun motong kebo, motong naon korban, sok aya ka emak kaditu? Teu aya</i></p>
Q ₉	<p>Bagaimana penyerapan tenaga kerja masyarakat ?</p> <p><i>Banyak masyarakat yang terserap kerja di PLTU neng</i></p>
Q ₁₀	<p>Apakah jumlah pengangguran berkurang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan di Desa Cigondang ?</p> <p><i>Otomatis berkurang neng, kan banyak yang udah kerja di PLTU tapi ga semua juga masyarakat yang bisa kerja di PLTU</i></p>
Q ₁₁	<p>Seperti apa perubahan lapangan pekerjaan yang terjadi ?</p> <p><i>Ada perubahan neng, banyak yang kerja di PLTU</i></p>
Q ₁₂	<p>Apakah banyak masyarakat sekitar yang bekerja di PLTU ?</p> <p><i>Banyak yang dari dari Cigondang, dari Muncang ya, banyak dari sini, dari RT 1 juga ada, tapi kalau RT 5 RT 6 mah ngga ada</i></p>
Q ₁₃	<p>Bekerja sebagai apa masyarakat local di PLTU ini ?</p> <p><i>Ya ada satpam, pembabat rumput, cleaning service</i></p>
Q ₁₄	<p>Mengenai struktur berkembangnya struktur ekonomi, apakah timbulnya aktivitas baru dalam menunjang ekonomi masyarakat ?</p> <p><i>Ngga ada neng, tetep aja ibu kaya gini, kalau ga ada kerjaan ya ibu nganggur</i></p>

Q15	<p>Bagaimana dengan peningkatan pendapatan masyarakat ?</p> <p><i>Begini begini aja neng, ini kan lahan pertanian punya orang neng, ibu mah cuma sebagai buruh tani, kalau misalnya panen dapet 2 karung ya dibagi 1 karung untuk ibu dan 1 karungnya lagi untuk yang punya sawahnya neng, jadi bagi dua, untuk dana CSR ga ada disini mah belum pernah</i></p>
Q16	<p>Apakah terdapat dampak negatif yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dengan adanya pembangunan PLTU ?</p> <p><i>Aya neng, sesek</i></p>
Q17	<p>Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PLTU ?</p> <p><i>Ngga ada peningkatan neng, masih kaya dulu</i></p>

Q I	<p>I₁₋₄</p> <p>(Bapak Jali, selaku petani Desa Cigondang Kecamatan Labuan) Hari Rabu, 23 Juli 2015 Pukul 11.41 Di saung petani Desa Cigondang</p>
Q ₁	<p>Apa saja kontribusi dari perusahaan yang diberikan untuk masyarakat ?</p> <p><i>Belum pernah merasakan kontribusi apa apa dari PLTU</i></p>
Q ₂	<p>Bagaimana Perkembangan penduduk bila dilihat dari perkembangan jumlah penduduk secara umum dan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan yang terkena dampak langsung dari adanya pembangunan PLTU di pesisir pantai Kecamatan Labuan ?</p>

	<i>Belum ada perkembangan apa apa ya saya rasa, masih gitu gitu aja</i>
Q3	<p>Apakah PLTU Banten 2 Labuan di Kecamatan Labuan ada pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi khususnya di Desa Cigondang ?</p> <p><i>Ngaruh</i></p>
Q4	<p>Apa sajakah dampak positif dan negatif dengan adanya pembangunan PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Ya biasa aja neng, udah ketawan karna panasnya, gersangnya, kalau tidur ada kedengeran inilah itulah, bising</i></p>
Q5	<p>Bagaimana dengan hasil pertanian, perikanan/penjualan masyarakat di Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Ngga ini mah lagi jelek neng, karna kemarau ya, barang kali ada dampak panas dari PLTU juga, pohon pohonan pisang apa ja kaya gini, kalau dulu mah ya belum ada PLTU mah ya subur subur gitu ya.</i></p>
Q6	<p>Bagaimana pola perpindahan penduduk Desa Cigondang?</p> <p><i>Dari sini kesitu ada, , dari luar ke dalem juga banyak, hampir penuh bae nyah hampir padet, pola perpindahannya ya menetap neng</i></p>
Q7	<p>Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang secara umum, baik yang dilihat dari profesi maupun ekonomi masyarakat ?</p> <p><i>Ngga ada perubahan, ya kaya gini aja</i></p>

Q ₈	<p>Apakah ada bantuan dana CSR kepada masyarakat sekitar? (Jika ada dalam bentuk apa CSR tersebut ?)</p> <p><i>Ga tau neng, belum pernah dapet bantuan apa apa. Tapi kalau yang lain lain mah ada yang dapet. Kalau misalnya ada motong kurban, orang orang mah dapet, saya mah ngga dapet, kenapa ya? Bantuan-bantuan lainnya juga saya belum pernah mendapatkannya</i></p>
Q ₉	<p>Bagaimana penyerapan tenaga kerja masyarakat ?</p> <p><i>Penyerapan tenaga kerja belum terserap secara maksimal neng, masih banyak masyarakat yang nganggur ga punya kerjaan</i></p>
Q ₁₀	<p>Apakah jumlah pengangguran berkurang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan di Desa Cigondang ?</p> <p><i>Pengangguran mah banyak</i></p>
Q ₁₁	<p>Seperti apa perubahan lapangan pekerjaan yang terjadi ?</p> <p><i>Perubahannya mah ada dikit neng, banyak yang kerja di PLTU sekarang</i></p>
Q ₁₂	<p>Apakah banyak masyarakat sekitar yang bekerja di PLTU ?</p> <p><i>Banyak neng</i></p>
Q ₁₃	<p>Bekerja sebagai apa masyarakat local di PLTU ini ?</p> <p><i>Ga tau ya itu, ada yang jadi cleanin service gitu, bersih bersih rumput, buruh kasar, gitulah kalau mau melamar ke situ harus punya duit, kalau ga punya mah ga jadi</i></p>

Q ₁₄	<p>Mengenai struktur berkembangnya struktur ekonomi, apakah timbulnya aktivitas baru dalam menunjang ekonomi masyarakat ?</p> <p><i>Ya begini aja neng, kalau ngga ada kerjaan ya bapak kerja jadi tukang becak aja</i></p>
Q ₁₅	<p>Bagaimana dengan peningkatan pendapatan masyarakat ?</p> <p><i>Ya biasa aja neng, ga ada peningkatan</i></p>
Q ₁₆	<p>Apakah terdapat dampak negatif yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dengan adanya pembangunan PLTU ?</p> <p><i>Pasti ada mah, dari debunya itu suka batuk, sesek</i></p>
Q ₁₇	<p>Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PLTU ?</p> <p><i>Ya belum ada peningkatan</i></p>

Q I	<p style="text-align: center;">I₁₋₅</p> <p style="text-align: center;">(Bapak Edi Arumsyah selaku Tokoh Masyarakat Desa Cigondang)</p> <p>Hari Selasa, 28 Juli 2015, di tempat tinggal Bapak Sarum di Desa Cigondang</p>
Q ₁	<p>Apa saja kontribusi dari perusahaan yang diberikan untuk masyarakat ?</p> <p><i>Kontribusi ke masyarakat ada sebagian ekonomi tapi ga berjalan dikarenakan ga tepat sasaran, dan kemarin ada sebagian sosial juga dana CSR untuk kesehatan tetapi hanya satu kali saja dana tersebut turun dan selanjutnya ga ada lagi, ada lagi dari fisik hanya sebagian hanya sekedar kampung tetangga</i></p>

	<p><i>aja, seperti kampung kalang sari kaya fapling, sebenarnya ada dana CSR untuk masyarakat tapi ya itu ga yang manfaatnya orang-orang lain ga tepat sasaran</i></p>
Q ₂	<p>Bagaimana Perkembangan peunduduk bila dilihat dari perkembangan jumlah penduduk secara umum dan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan yang terkena dampak langsung dari adanya pembangunan PLTU di pesisir pantai Kecamatan Labuan ?</p> <p><i>Engga, malah kalau dibilang berkembang engga sih, malah yang perusahaan-perusahaan nelayan yang kecil-kecil itu kan mati total, karena kan pada waktu PLTU kesini waktu membangun itu ada perjanjian bahwa nelayan udang yang kecil ternyata sampai sekarang belum ada realisasinya, karena kan jangkauan nya itu biasanya sekian mill pake motor 2 PK ternyata sekarang ga bisa harus mencapai 5 PK sampai 10 PK itu. Akhirnya pada mati, kalau ga ada realisasinya mau mencukupi kebutuhan hidupnya gimana neng? Ada sih emang ada PLTU mengadakan tapi salah sasaran. Jadi dapatnya bukan ke nelayan yang kecil tapi ke nelayan pendatang, saya dengar tuh dua perahu sampai sekarang rusak. Kalau petani ya mati ga mati neng cuma gitu-gitu aja, kalau saya dengar tahun 2015 katanya mau mulai pembangunan proyek perluasan PLTU lagi di lahan pertanian tapi sampai sekarang belum</i></p> <p><i>Aja</i></p>
Q ₃	<p>Apakah PLTU Banten 2 Labuan di Kecamatan Labuan ada pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi khususnya di Desa Cigondang ?</p> <p><i>Kalau ekonomi sih ya ada sedikitlah, karena ada bantuan gitu neng, dari sosialnya ada, dari kesehatannya ada, lagi pula tahun kemaren kan ada bantuan-bantuan dari PLTU hanya gimana sih ada bantuan buat kerupuk,</i></p>

	<p><i>ada gilingan-gilingan buat pupuk, buat pur</i></p>
Q ₄	<p>Apa sajakah dampak positif dan negatif dengan adanya pembangunan PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Dampak negativenya kalau blowernya itu bocor kadang-kadang abunya sangat mengganggu pernafasan kadang abunya bisa sampai ke menes, limbah air panas yang di buang ke laut yang sangat merugikan masyarakat nelayan kecil yang harus lebih jauh lagi nyari ikannya, kalau dampak positifnya banyak masyarakat sekitar yang bekerja di PLTU dan biasanya di cleaning service, satpam</i></p>
Q ₅	<p>Bagaimana dengan hasil pertanian, perikanan/penjualan masyarakat di Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Kalau itu sih kurang tau ya. Kalau itu kan istilahnya ga mayoritas petani, ya paling sekitar 3 kwintal lah, paling banyak 5 kwintal 6 kwintal lah, dengan hasil pertanian sih rasanya ga pernah sih limbah PLTU dampaknya ke petani, ga ada. Cuma pertama aja, itu sekarang ga ada, dulu kan boilernya pecah sekali pecah, akhirnya ke padi item, tapi sekarang ga ada, kalau petani ikan yang seperti udang itu udah, udah total mati karena ga terjangkau, kan dulu mah ada bagang, sekarang udah ga ada, udang kepiting dan bagang yang total udah ga ada</i></p>
Q ₆	<p>Bagaimana pola perpindahan penduduk Desa Cigondang?</p> <p><i>Kalau Desa Cigondang itu keluar masuk, kadang menetap kadang adalagi yang ngontrak, karena kan yang disebut keluar masuk itu kan pertama kaya ngontrak, kalau ga ketemu kerjaan disini biasanya pulang, biasanya yang pindah ke Desa Cigondang itu bikin apa bikin apa, kaya percobaan kalau ga jalan ya udah pergi lagi, apa lagi nelayan hanya sekedar kalau musim bulan</i></p>

	<p><i>besar ya ga ada udah pergi ke daerahnya, kebanyakan kalau disini kan kebanyakan apa lagi di daerah Lantera kebanyakan keluar masuk orang Indramayu nelayannya, pola perpindahannya musiman ga menetap, kadang ya orang Tasik orang Garut orang mana mana pindah kesini berjalan dan lancar usahanya langsung menetap disini, kalau bangkrut ya udah pergi lagi gitu, biasanya yang pindah ke Desa Cigondang itu ada yang jualan cireng, dagang dipasar, ada yang jualan kupa gitu, kebanyakan ya sebagai pedagang</i></p>
Q7	<p>Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang secara umum, baik yang dilihat dari profesi maupun ekonomi masyarakat ?</p> <p><i>Itu biasanya masalah Cigondang itu minim neng, kebanyakan seperti tukang becak, nelayan, nelayan kan memanfaatkan alam, petani, ya ada kuli ya kuli bangunan ya macam-macam, kebanyakan becak. Seharusnya kan itu perusahaan besar ya, tetap aja yang kerjanya itu orang luar, perkembangan ekonomi masyarakatnya belum berkembang</i></p>
Q8	<p>Apakah ada bantuan dana CSR kepada masyarakat sekitar? (Jika ada dalam bentuk apa CSR tersebut ?)</p> <p><i>Perusahaan sudah memberikan dana CSR sekitar 125 juta untuk masyarakat hanya saja sekarang CSR tersebut tidak berjalan lagi, mungkin memang dana tersebut turun tapi diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab atau ada oknum tertentu. Biasanya CSR tersebut dalam bentuk dana kesehatan dan itu baru turun satu kali saja, selanjutnya ada dana untuk sunatan masal juga ada juga dana untuk ekonomi dan dana untuk pembangunan jalan</i></p> <p><i>Adapun bantuan kesehatan ya itu pemberian ke posyandu dikarangsari yang bapak tau, kaya timbangan bayi</i></p>

Q ₉	<p>Bagaimana penyerapan tenaga kerja masyarakat ?</p> <p><i>Kalau dulu mah iya, kalau lagi ini mah tenaga beratlah istilahnya, kalau sekarang mah ngga ada, ya ada mah ada satu dua tiga mah tapi ga semua, kebanyakan orang cilacap, ada sih ada ya masyarakat lokal yang bekerja sebagai Office Boy, Security, buruh kasar kebanyakan mah neng, ada yang kerja dibagian koperasinya, ada juga yang kerja di bagian Staff juga ada tapi ga banyak, kebanyakan di buruh kasar</i></p>
Q ₁₀	<p>Apakah jumlah pengangguran berkurang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan di Desa Cigondang ?</p> <p><i>Justru menjadi melemah, tingkat pengangguran sekarang makin banyak karena yang nelayan kecil usaha mereka jadi ga berjalan lagi karena kurangnya modal dan berhenti apalagi yang cari kepiting udah mati total karena mereka hanya menggunakan bubu saja, kalau yang punya modal biasanya alih profesi seperti buka warung atau buka bedengan ya kalau yang ga punya modal udah mati total, ya kalau cewenya buat nasi uduk</i></p>
Q ₁₁	<p>Seperti apa perubahan lapangan pekerjaan yang terjadi ?</p> <p><i>Perubahan lapangan pekerjaan belum ada neng, kebanyakan yang kerja itu cuma sebagai buruh kasar, kaya cleaning service, satpam, pengangkut batu bara. Kalau dibagian kantornya ada cuma jarang</i></p>
Q ₁₂	<p>Apakah banyak masyarakat sekitar yang bekerja di PLTU ?</p> <p><i>Banyak masyarakat yang bekerja di PLTU dibagian security, cleaning service dan buruh kasar ada juga masyarakat setempat yang bekerja dibagian staff tapi jarang karena masyarakat disini rata-rata pendidikan lulusan SD dan SMP, kalau yang lulusan SMA masih jarang apa lagi S1.kalau tenaga ahli</i></p>

	<i>kebanyakan dari luar</i>
Q ₁₃	<p>Bekerja sebagai apa masyarakat local di PLTU ini ?</p> <p><i>Banyaknya cleaning service, security dan ada juga yang dibagian staff tapi jarang</i></p>
Q ₁₄	<p>Mengenai struktur berkembangnya struktur ekonomi, apakah timbulnya aktivitas baru dalam menunjang ekonomi masyarakat ?</p> <p><i>Untuk perkembangan struktur ekonomi biasa aja, berkembang ngga, jadi standar aja gitu, ga ada pekerjaan sumber-sumber baru, tukang becak tetap tukang becak, kalau nelayan musim bulan ini, bulannya kan besar ya udah nganggur, paling sedikit-sedikit mah ya ada, itupun kalau ada yang nampung, kalau disini seperti pencarian rumput laut untuk kosmetik, Cuma ga ada yang nampung</i></p>
Q ₁₅	<p>Bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat ?</p> <p><i>Peningkatan masyarakat sebelum dan setelah adanya PLTU gitu-gitu aja. Hasil penangkapan ikan jelas merosot, hanya itu tadi perahu kecil ga bisa jalan, ada yang nangkap bubu kepiting, ada jaring udang sekarang kurang. Pendapatan masyarakat Desa Cigondang baik yang berprofesi sebagai petani dan nelayan menurun, biasanya kan sebelum popole itu pasang bubu untuk udang kan banyak dan dekat sekarang kan panas airnya kena limbah dan mencari ikannya ke jauh ga terjangkau sama motor, akhirnya udah ga kebeli mesin-mesin untuk motor, jadi udah berehenti. Adapun pemberian dana CSR kepada nelayan seperti pemberian kapal, kalau ga salah ada 2 kapal tapi pemberiannya itu tidak tepat sasaran neng, akhirnya kapal-kapalnya sekarang rusak</i></p>

Q16	<p>Apakah terdapat dampak negatif yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dengan adanya pembangunan PLTU ?</p> <p><i>Kalau sakit mah musiman itu, kalau cuacanya terik anginnya dari sana kesini itu paling kena pilek karena debu dari PLTU yang terbang kesini, tapi kalau musim kaya gini mah kesana ke Tarogong, ke Banyubiru samapi ke Menes debunya, sampai hitam kalau anginnya dari sini kesana. Kalau misalnya ada yang sakit demam karena PLTU udah turun pengobatan gratis langsung. Kalau kesehatan PLTU ada nyumbang sedikit alat dari kampung kalangsari yang bapak liat, seperti tensi, timbangan bayi itu ada cuma satu posyandu, ga semua</i></p>
Q17	<p>Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PLTU ?</p> <p><i>Rata-rata penduduk tamatan SD dan sekarang sudah lebih banyak yang tamatan SMP dan SMA</i></p>
Q18	<p>Adakah MOU yang dibangun antara pihak PLTU Banten 2 Labuan dengan pihak kepala Desa dan masyarakat di Desa Cigondang (Kalau ada, apa bentuk MOU nya?)</p> <p><i>Ada perjanjian bahwa nelayan udang yang kecil ternyata sampai sekarang belum ada realisasinya</i></p>
Q19	<p>Bentuk komponen krisis apa yang dibutuhkan masyarakat ?</p> <p><i>Pokok utama yang tadi bapak katakan seperti nelayan penangkap udang itu jadi seharusnya PLTU itu survey ke lokasi karena bukan yang datang orang Cigondang yang datang kesana, kita disitu ada bantuan, di ambil, di bikin ternyata jadi bukan wadahnya, saya minta mah PLTU survey ke nelayan-</i></p>

	<p><i>nelayan kecil apa keluhan-keluhan nelayan, ternyata kalau ada bantuan yang menerimanya bukan orang-orang yang tepat sasaran, disini mengajukan, tanda tangan, akhirnya bantuan sudah turun tidak tepat sasaran. Kalau nelayan yang penting perahunya aja, mesin gede. Kalau Sumber Daya Alam waktu itu sudah ada pemberdayaan sumber daya alam waktu itu pernah di bikin disini, seperti jenis rumput laut tapi bukan rumput untuk bikin cincin, emang kemarin dicoba disini tapi ga jadi karena faktor alam juga</i></p>
Q ₂₀	<p>Secara umum lebih banyak keuntungan atau kerugian dari adanya PLTU ? Kalau keuntungan ada juga yang untung ya paling oknum-oknum tertentu, kalau kerugian sih ya paling untuk nelayan-nelayan kecil kalau cari ikan harus ke tengah</p>

<p>Q I</p>	<p>I₂₋₁ (Bapak Asep Bungamin selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Lab Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang) Hari Selasa, 02 Juli 2015, di Kantor Lab BLHD Kabupaten Pandeglang</p>
Q ₁	<p>Sejauh mana peranan BLHD Kabupaten Pandeglang terhadap dampak PLTU yang ada di kecamatan Labuan ?</p> <p><i>Kami selalu mengontrol ke PLTU langsung dan jika ada pengaduan dari masyarakat kami langsung ke lapangan, jika memang limbah tersebut sangat mengganggu atau pun tidak sesuai dengan kadarnya maka kami memberikan surat peringatan kepada pihak PLTU</i></p>
Q ₂	<p>Bagaimana proses pengendalian pencemaran laut atau perusakan laut?</p> <p><i>Untuk pencemaran laut sih hanya air bahang saja itu pun hanya perpindahan</i></p>

	<i>panas daripada air lalu dibuang ke laut</i>
Q ₃	<p>Bagaimana status pencemaran yang terjadi di kawasan laut?</p> <p><i>Status pencemarannya berbahaya atau tidak berbahayanya itu kita sesuaikan dengan PP 101 Tahun 2014, tentang pengelolaan limbah, berbeda kalau PLTU itu kan menggunakan air laut lalu dibuang lagi itu kan hanya menggunakan perpindahan panas daripada air</i></p>
Q ₄	<p>Ada pengawasan dari pihak BLHD pandeglang atau tidak?</p> <p><i>Ada pengawasan dan disesuaikan dengan budget, kami ada anggaran khusus BLHD Pandeglang kalau tidak ada anggaran apakah kita bisa jalan? Tentu tidak. Kalau misalkan ga ada anggaran disuruh jalan kesana apakah mau? Ga bakalan pada mau</i></p>
Q ₅	<p>Dalam bentuk apa pengawasan tersebut?</p> <p><i>Kita langsung datang ke sana itu tanpa planning, pemberitahuan ga ada</i></p>

Q	I₂₋₂
I	<p>(Ibu Lilis Nurlilah selaku Amu CSR, Humas dan Keamanan Indonesia Power (PLTU Banten 2 Labuan)</p> <p>Hari Senin, 10 Agustus 2015, di Kantor PLTU Banten 2 Labuan</p>
Q ₁	<p>Apa saja kontribusi perusahaan bagi masyarakat?</p> <p><i>Kontribusinya banyak ya neng, ada segi kalau dari masyarakat sekitar ada segi dari lapangan pekerjaan karena kami perusahaan listrik, kami menghasilkan listrik dan dikonsumsi kepada masyarakat bukan hanya di</i></p>

	<p><i>labuan tetapi diseluruh Indonesia termasuk Labuan belum dari CSR, kami sudah berjalan, dari segi pembangunan sudah jelas mungkin dari CSR tersebut kan beberapa yang sudah kami bantu membangun, dari segi pendidikan kami juga sudah membantu banyak sekolah sekolah, jadi banyak sekali kontribusinya dari aspek sosial, dari aspek budaya fasilitas, sarana dan prasarana. Untuk sekolah sih kami tidak sepenuhnya membangun sekolah tapi kita bantu sarana dan prasarana nya misalnya membantu pembuatan MCK misalnya disekolah ya disekitar desa penyanggah ini saja, kemudian kita sumbang bola volly atau kegiatan acara-acara sekolah misalnya</i></p>
<p>Q₂</p>	<p>Apakah ada bantuan dana CSR kepada masyarakat sekitar? (Jika ada dalam bentuk apa CSR tersebut ?)</p> <p><i>Tentu saja ada, Jadi kita itu program CSR nya ada yang namanya in power care, in power itu Indonesia Power, care itu Community Assisten, Community Relation sama Community empowermen,itu jadi program community CSR nya</i></p> <p><i>In Power Care</i></p> <p><i>Bantuan untuk nelayan sering kita tuh ada sih beberapa yang kita bantu nelayan itu pompa penggedokan seperti pompa air untuk pembersihan kapal, itu ada di Desa Teluk untuk nelayan Teluk</i></p>
<p>Q₃</p>	<p>Bagaimana penyerapan tenaga kerja masyarakat?</p> <p><i>Hampir 90% kali ya kalau kita bisa ini, pegawai PLTU Labuan terserap dari labuan, dari domisili labuan ada 357 orang, itu untuk kecamatan labuan ya, itu ada 357 orang bayangkan, kemudian di pandeglang sendiri ada 94 orang jadi agak melipir sedikit kaya ke menes pandeglang dan sekitarnya ada 94 orang, seperti diluar Kabupaten Pandeglang seperti di Serang 234, tapi kan kebanyakan dari total tenaga kerja kita 685 orang jadi banyak sekali warga sekitar labuan yang sudah terserap bekerja disini. Tapi memang kebanyakan</i></p>

	<p><i>disini sebagai cleaning service, security, dari koperasi, kopindo dan Indonesia Power. Jadi ada lima elemen mba disini itu ada Indonesia Power, ada Kopindo, ada koperasi ada cleaning service, sama security</i></p>
Q4	<p>Apakah jumlah pengangguran berkurang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan di Desa Cigondang ?</p> <p><i>Otomatis ya, ya kita ga tau sih masalahnya gini, sebelum dia bekerja di PLTU dia bekerja dimana kita ga tau, ada yang bekerja ada mungkin yang sudah bekerja dan pindah ke kami</i></p>
Q5	<p>Seperti apa perubahan lapangan pekerjaan yang terjadi ?</p> <p><i>Ada perubahan lapangan pekerjaan, misalnya ada yang tadinya tidak bisa menghidupi anak istrinya, sekarang sudah bekerja di kami walaupun misalnya gaji berapa gitu kan, setidaknya sudah lumayanlah gitu untuk penghasilan mereka dalam ukuran di Labuan yang penting diatas UMR</i></p>
Q6	<p>Apakah banyak masyarakat sekitar yang bekerja di PLTU ?</p> <p><i>Banyak sekali mba, untuk kecamatan labuan ya, itu ada 357 orang</i></p>
Q7	<p>Bekerja sebagai apa masyarakat local di PLTU ini ?</p> <p><i>kebanyakan disini sebagai cleaning service, security, dari koperasi, kopindo dan Indonesia Power</i></p>
Q8	<p>Apakah terdapat dampak negatif yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dengan adanya pembangunan PLTU ?</p> <p><i>Semua pabrik ya semua industri kan pasti menghasilkan limbah ya, limbah kami ini sendiri kan bukan hanya limbah abu ya batu bara kan, ada limbah cair, limbah lain sebagainya, tapi untuk semua pengelolaan lingkungan itu</i></p>

	<p><i>sendiri kan sudah ada aturannya, sudah ada aturan pemerintah, sudah ada aturan pemerintah daerah, pemerintah pusat kementrian lingkungan hidup, semuanya kan sudah ada, ketika berdirinya suatu perusahaan sudah pasti ada aturannya seperti itu, dampak ada cuma apa namanya sampai saat ini sendiri kami masih memperhijau jadi yang kategori kalau bagi perusahaan yang sudah masuk kategori memperhijau emang dampaknya ke masyarakat juga tidak ada, istilahnya tidak dirasakan langsung ya, sampai saat ini sih kami belum menemukan adanya penelitian yang menyatakan bahwa masyarakat sekitar asma atau kena abu batubara, karena kan prosesnya panjang ya mba tidak misalnya gini, ada di cigondang misalnya menyatakan oh ada yang asma misalnya, ada yang radang paru-paru itu disebabkan oleh abu batubara misalnya, itukan penelitiannya sangat panjang ya akibat faktornya kan abcdefg, jadi belum tentu oleh PLTU, tapi sampai saat ini sih ya alhamdulillah dari pegawainya sendiri yang berada disini belum ada apalagi masyarakat yang ada diluar gitu ya. Untuk pengobatan gratis ada 1 tahun sekali, untuk tahun ini bulan Februari, peserta pengobatan gratis ada 1000 orang masyarakat sekitar yang ikut serta pengobatan tersebut, diberikan obat-obatan gratis, tapi tetap kita yang bayar, dokternya kesini, diadakan di sini</i></p>
<p>Q₉</p>	<p>Apakah PLTU Banten 2 Labuan di Kecamatan Labuan ada pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi khususnya di Desa Cigondang ?</p> <p><i>Kalau dari segi bangunannya sendiri, misalnya gini ohh dari adanya PLTU Labuan jadi panas ya, saya rasa dari dulu Labuan panas panas juga ya sama aja gitu, untuk akses jalan, dulu tau kan jalan yang di depan PLTU, dulu masih jelek banget kan? Tapi kan sekarang sudah ini ya, kemudian dari segi pembangunan lainnya, mba bisa lihat kan disebelah kanan sana ada lapangan futsal itu bisa dipake untuk masyarakat sekitar</i></p>

Q10	<p style="text-align: center;">Apa sajakah dampak positif dan negatif dengan adanya pembangunan PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Yang tadi saya bilang sih sebenarnya, dampak positifnya banyak dari segi lapangan pekerjaan sudah pasti, fasilitas sarana dan prasarana nya sudah dibangun, dari program CSR yang sudah berkembang, banyaklah dampak positifnya, dengan adanya satu pabrik sebenarnya ya mba meningkatkan citra dari satu daerah sendiri ya, misalnya Labuan sekarang jadi lebih rame lho ga sesepe dulu gitukan. Kemudian bertambah juga industri industri kecil lainnya. Kalau ada pabrik otomatis rumah atau kos kosan keuntungan kan buat masyarakat sekitar banyak sekali dampak positifnya. Namun dampak negatifnya, ya itu dia dampak negatifnya mungkin yaa bising kali ya tapi itu pun tingkat kebisingannya sudah pada level yang tidak mengganggu. Ada sih mba tingkat kebisingan, panas itu semua ada kadarnya, ada ukurannya gitu, tapi kita sudah batas normal sih.</i></p>
Q11	<p style="text-align: center;">Apakah berdirinya PLTU Banten 2 Labuan di Kecamatan Labuan sudah memenuhi aspek-aspek pembangunan ?</p> <p><i>Sudah, kalau kami tidak memenuhi aspek pembangunan kami tidak akan diberikan surat ijin untuk mendirikan bangunan, IMB kan, kalau surat ijin mendirikan industri sudah diberikan otomatis kami sudah mempunyai ijin untuk mendirikan bangunan</i></p>
Q12	<p style="text-align: center;">Bagaimana dengan hasil pertanian, perikanan/penjualan masyarakat di Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Ikan di jeti hidup hidup aja ya, ubur ubur banyak banyak aja ya, malah banyak banyak aja dan banyak banyak aja saya rasa, saya juga bingung, potensi nelayan juga malah ikan normal normal aja, karena saya sendiri</i></p>

	<p><i>masih makan ikan maksudnya, kalau perbedaan dari jaman dulu sampai sekarang susah dicari ya wajar, karena kan ikan tiap tahun diambil terus terus ya pasti berkurang</i></p>
Q ₁₃	<p>Adakah MOU yang dibangun antara pihak PLTU Banten 2 Labuan dengan pihak kepala Desa dan masyarakat di Desa Cigondang (Kalau ada, apa bentuk MOU nya?)</p> <p><i>Semacam MOU belum ya, kalau MOU ya, tapi kalau pertemuan sih sudah sering, ada kita namanya komunikasi masyarakat ya, pertemuan kepala desa untuk program CSR kita untuk komunikasi masyarakat sudah dibangun</i></p>
Q ₁₄	<p>Adakah dampak sosial yang ditimbulkan dari berdirinya PLTU Banten 2 Labuan yang ada di Kecamatan Labuan ?</p> <p><i>Misalnya kalau dulu sih kontrakan berapa sih harganya, kalau sekarang sudah berapa ratus ya semenjak adanya PLTU, ya paling itu dampaknya, kalau dampak sosial ga ada sih ya saya rasa.</i></p>
Q ₁₅	<p>Berapa pendapatan per kapita atau gaji yang diterima para karyawan ?</p> <p><i>Ya diatas UMR mba</i></p>

<p>Q I</p>	<p style="text-align: center;">I_{2.3} (Ibu Bapak Muhaemin selaku Sekertaris Desa Cigondang Kecamatan Labuan) Hari Kamis, 09 Juli 2015, di Kantor Desa Cigondang</p>
<p>Q₁</p>	<p>Apa saja kontribusi dari perusahaan yang diberikan untuk masyarakat ?</p> <p style="text-align: center;"><i>Ada sih CSR itu melalui kepala Desa</i></p>
<p>Q₂</p>	<p>Bagaimana Perkembangan penduduk bila dilihat dari perkembangan jumlah penduduk secara umum dan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan yang terkena dampak langsung dari adanya pembangunan PLTU di pesisir pantai Kecamatan Labuan ?</p> <p style="text-align: center;"><i>Perkembangan masyarakat desa Cigondang sekarang dapat dikatakan masyarakat yang berkembang neng, karena sebagian masyarakat yang pindah ke Desa Cigondang itu profesinya sebagai pedagang kebanyakan neng, namun banyak masyarakat Desa Cigondang yang lulusan SD juga yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan</i></p>
<p>Q₃</p>	<p>Apa sajakah dampak positif dan negatif dengan adanya pembangunan PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p style="text-align: center;"><i>Terdapat dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya ada perkrutan tenaga kerja kasar misalnya ada yang babat rumput itu ya, seolah olah lulusan SD juga bisa masuk, ruginya ya nelayan kecil susah cari ikan di daerah sana neng</i></p>
<p>Q₄</p>	<p>Bagaimana dengan hasil pertanian, perikanan/penjualan masyarakat di Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p style="text-align: center;"><i>Hasilnya meningkat sih neng, secara keseluruhan sih meningkat. Kalau faktor</i></p>

	<p><i>pertanian disini itu tadah hujan, bukan tanah irigasi, ya kalau musim hujan ya ada air, kalau musim kemarau gini ga ada air, masalahnya itu bukan irigasi sawah alami aja gitu, memang dampaknya sedikit sedikit mah ada sih dari panas dan debu, kalau pertanian ya itu susah sekarang nelayan cari ikan</i></p>
Q5	<p>Bagaimana pola perpindahan penduduk Desa Cigondang?</p> <p><i>Perkembangan penduduk masyarakat Desa Cigondang kebanyakan yang pindah itu menetap neng ke Desa Cigondang</i></p>
Q6	<p>Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang secara umum, baik yang dilihat dari profesi maupun ekonomi masyarakat ?</p> <p><i>Perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang agak meningkat dikit dari yang dulu-dulu, kemungkinan kecil karena dampak dari adanya pembangunan PLTU tapi meningkatnya itu bukan sepenuhnya karena adanya PLTU neng, misalnya dilihat dari pembangunan rumah warga juga agak meningkat tapi bukan karena PLTU juga neng</i></p>
Q7	<p>Apakah ada bantuan dana CSR kepada masyarakat sekitar? (Jika ada dalam bentuk apa CSR tersebut ?)</p> <p><i>Ada neng diberikan kepada yang terkena dampak dan dibawah rata rata garis kemiskinan, masalahnya kalau semua ga ke rekrut juga. Ada yang berbentuk uang, ada bentuk barang, kalau bentuk barang seperti kaya dulu pembuatan perahu, ada CSR untuk ekonomi untuk kesejahteraan pedagang kecil. Bantuan untuk nelayan juga ada, nelayan kecil ada nelayan besar juga ada</i></p>

Q ₈	<p>Bagaimana penyerapan tenaga kerja masyarakat ?</p> <p><i>Anak-anak muda banyak yang bekerja di PLTU sebagai buruh kasar, antara lain seperti babat rumput, satpam, cleaning service, yang lulusan SD juga bisa bekerja sebagai buruh kasar neng, untuk bekerja dibagian staff ada neng cuma sedikit, karena diliat basicnya juga kalau untuk tenaga ahli neng</i></p>
Q ₉	<p>Apakah jumlah pengangguran berkurang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan di Desa Cigondang ?</p> <p><i>Kalau pengangguran sih meningkat ya, walaupun adanya PLTU</i></p>
Q ₁₀	<p>Seperti apa perubahan lapangan pekerjaan yang terjadi ?</p> <p><i>Kalau untuk Perubahan Lapangan Pekerjaan, sedikit banyak ada neng karena adanya PLTU. Kan yang tadinya ga ada kerja sekarang ada kerja karena adanya PLTU juga. Kalau sekarang karyawan banyak yang sebagai babat rumput, satpam, cleaning service</i></p>
Q ₁₁	<p>Apakah banyak masyarakat sekitar yang bekerja di PLTU ?</p> <p><i>Ngga sih neng, sebagian kecil</i></p>
Q ₁₂	<p>Bekerja sebagai apa masyarakat local di PLTU ini ?</p> <p><i>Ya kebanyakan di tenaga kasar, kaya pembabat rumput, cleaning service, satpam</i></p>
Q ₁₃	<p>Mengenai struktur berkembangnya struktur ekonomi, apakah timbulnya aktivitas baru dalam menunjang ekonomi masyarakat ?</p> <p><i>Untuk perkembangan struktur ekonomi sih secara keseluruhan meningkat</i></p>

	<p><i>neng, memang nelayan dan petani hampir sama-sama sih ya, nelayan ditentukan cuaca, pertanian juga kadang-kadang ga hasil juga</i></p>
Q14	<p>Bagaimana dengan peningkatan pendapatan masyarakat ?</p> <p><i>Ada peningkatan tapi ga semua masyarakat ya neng, seperti nelayan sekarang ada kemerosotan hasil tangkapan ikan neng, tetapi permasalahan itu bukan karena tok adanya PLTU ya, kan disana juga ada kapal kursin, kapal-kapal besar, ga 100% karena PLTU, jadi nelayan kecil kepepet neng karena adanya kapal-kapal besar, ada pemberian dana CSR yang diberikan kepada kepala desa Cigondang dan diberikan langsung kepada masyarakat dibawah rata-rata garis kemiskinan, ga semua</i></p>
Q15	<p>Apakah terjadi kemerosotan hasil tangkapan ikan ?</p> <p><i>Iya neng, Sekarang ada kemerosotan hasil tangkapan ikan, tapi ga tok karena adanya PLTU ya neng, karena kan itu ditengah ada kapal kursin ya kapal kapal besar jadi nelayan kecil kepepet gitu, jadi bukan 100% karena PLTU</i></p>
Q16	<p>Apakah terdapat dampak negatif yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dengan adanya pembangunan PLTU ?</p> <p><i>Kalau debu yang dihasilkan PLTU itu biasanya mempengaruhi kesehatan masyarakat neng, seperti sesek nafas gitu, masalahnya dampak negatifnya belum tertera ya, masalahnya kan debu itu lama jaraknya, mungkin sekarang juga kita duduk disini mungkin debu-debu PLTU terhisap ya tapi kan jangkanya itu bukan setahun dua tahun neng, untuk pengobatan gratis itu dokternya datang ke PLTU, tapi sayangnya sama saja kaya berobat ke puskesmas, kenapa gitu? Dari sini ongkos sama ke puskesmas sama, malah</i></p>

	<p><i>lebih kalau ke PLTU, jadi untuk membantu masyarakat kok malah beban untuk ongkos gitu neng. Mau saya sih walaupun gratis silahkan lah datang tetapi di Desa ini supaya masyarakat bisa merasakan, jadi percuma gitu neng</i></p>
Q ₁₇	<p>Bentuk komponen krisis apa yang dibutuhkan masyarakat ?</p> <p><i>Komponen krisis? Kalau semcam air bersih sih sudah cukup kali ya, kalau yang di dekat PLT U airnya keruh, ada sih tapi ada tengki air bersih. Ya kalau untuk nelayan paling perahu besar</i></p>
Q ₁₈	<p>Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PLTU ?</p> <p><i>Agak meningkat neng kalau masalah pendidikan mah, masyarakat sekarang lulusannya bukan lagi merah putih, sekarang mah udah abu abu ya, bahkan yang ke perguruan tinggi terutama serang ya, bandung, semarang, jogja sudah banyak. Dulu sih Cuma satu dua, sekarang mah ratusan lah</i></p>
Q ₁₉	<p>Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?</p> <p><i>Kalau keadaan ekonomi masyarakat Desa Cigondang agak meningkat sih neng daripada yang dulu dulu, ga ada dampak dari PLTU juga sih ya tapi kemungkinan ada, mungkin</i></p>
Q ₂₀	<p>Adakah MOU yang dibangun antara pihak PLTU Banten 2 Labuan dengan pihak kepala Desa dan masyarakat di Desa Cigondang (Kalau ada, apa bentuk MOU nya?)</p> <p><i>Ngga, ngga ada</i></p>

Q ₂₁	<p>Adakah dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari berdirinya PLTU Banten 2 Labuan yang ada di Kecamatan Labuan ?</p> <p><i>Ada neng, Memang disisi lain ada yang meningkat ya, disisi lain ada yang dirugikan</i></p>
-----------------	---

<p>Q</p> <p>I</p>	<p>I₂₋₄</p> <p>(Bapak TB. Aripudin selaku LSM Desa Cigondang)</p> <p>Hari Minggu, 12 April 2015 Pukul 16.38</p>
Q ₁	<p>Terdapat kerjasama atau tidak dari pihak PLTU dengan LSM? (jika ada dalam bentuk apa?)</p> <p><i>Sebetulnya jika kita bicarakan mengenai PLTU itu tidak ada kerjasama dengan lembaga gitu ya, karena apa sampai sekarang pun lembaga-lembaga kita itu mulai dari LSM dan dari mahasiswa, ntah itu dari wartawan selalu menyoroti semua kejadian kejadian yang ada di PLTU. Mau kerjasama gimana kalau mereka tertutup</i></p>
Q ₂	<p>Apa saja dampak positif dan negative adanya PLTU untuk masyarakat ?</p> <p><i>Jelas untuk negatifnya sangat besar satu dari limbah PLTU kawasan laut yang ada di kita, yang kedua para nelayan setelah adanya PLTU ini dalam mencari ikan sangat jauh dari wilayah, itu tidak bisa ditentukan, selanjutnya dari debu dan bau nya, bau dari batu bara. Di labuan ini sudah tidak nyaman sebenarnya dengan suhu panasnya, tidak seperti dulu ketika PLTU itu belum ada. Dampak lingkungan yang terjadi satu terjadinya abrasi di Cigondang di daerah Laba, sampai putusnya jalan masuknya masyarakat yang</i></p>

	<i>menyambungkan jalan dari Laba ke Panimbang Positifnya sedikit</i>
Q3	<p>Apa saja kontribusi dari perusahaan yang diberikan untuk masyarakat ?</p> <p><i>Justru sebetulnya kalau bantuan kesehatan ya mungkin kan masyarakat disini harus merasakan, tapi sampai sekarang tidak ada yang merasakan bantuan dari PLTU tentang dana kesehatan, pengobatan-pengobatan gratis dari PLTU itu tidak ada. Untuk bantuan itu tidak merata</i></p>
Q4	<p>Apakah banyak masyarakat sekitar yang bekerja di perusahaan ?</p> <p><i>Tidak banyak, kebanyakn yang bekerja dari luar kaya pandeglang,</i></p>
Q5	<p>Secara umum lebih banyak keuntungan atau kerugian dari adanya PLTU ?</p> <p><i>Sangat banyak kerugian yang dirasakan masyarakat, keuntungannya tidak seberapa hanya dirasakan oleh pedagang sebagian</i></p>
Q6	<p>Apakah ada keberatan yang dirasakan masyarakat setelah berdirinya PLTU ?</p> <p><i>Banyak neng, yaitu biasanya dingin kalau malam sekarang panas, ada perubahan suhu</i></p>
Q7	<p>Bekerja sebagai apa masyarakat local di perusahaan ini ?</p> <p><i>Orang di kita itu kebanyakan bekerja di bagian buruh kasar</i></p>
Q8	<p>Berapa pendapatan per kapita atau gaji yang diterima para karyawan ?</p> <p><i>Gaji mereka itu sebenarnya tidak sesuai, walaupun bicara UMR tidak sesuai</i></p>
Q9	<p>Seperti apa perubahan lapangan pekerjaan yang terjadi ?</p> <p><i>Sebetulnya tidak ada perubahan. PLTU itu mencari orang orang yang</i></p>

	<p><i>mempunyai skill, sebetulnya didaerah kita juga banyak yang harus dikaryakan tapi orang orang kita tidak diberi kesempatan. Kenapa saya katakan tidak diberi kesempatan, karena setelah saya lihat pekerja yang permanen itu semua orang luar, Surabaya, dari Sumatera. Orang orang kita sebetulnya Pandeglang ini banyak, ahli pembukuan, tentang komputer, mekanik, untuk semua yang diperlukan PLTU itu sebenarnya banyak di Pandeglang itu</i></p>
Q ₁₀	<p>Apakah terdapat dampak negatif yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dengan adanya pembangunan PLTU ?</p> <p><i>Sekarang gini, kita tidak tahu radiasi yang dihasilkan oleh PLTU, karena radiasi yang dihasilkan oleh PLTU itu, melalui apa sutet pun kita akan terlihat itu 25 tahun ke depan. Sekarang adalah radiasi panas, makanya banyak masyarakat yang mengalami flu akibat dari pada radiasi itu</i></p>
Q ₁₁	<p>Apakah ada bantuan dana CSR kepada masyarakat sekitar? (Jika ada dalam bentuk apa CSR tersebut ?)</p> <p><i>Memang CSR ada, namun tidak maksimal</i></p>
Q ₁₂	<p>Apakah secara umum masyarakat sekitar dapat dikatakan sejahtera ?</p> <p><i>Tingkat kemiskinan itu masih ada</i></p>
Q ₁₃	<p>Mengenai struktur berkembangnya struktur ekonomi, apakah timbulnya aktivitas baru dalam menunjang ekonomi masyarakat ?</p> <p><i>Tidak ada perkembangan sama sekali, dari dulu sampai sekarang masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan petani ya tetap saja seperti itu. Malah mempersempit ruang kerja petani, karna wilayah sawah disitu sudah habi. Sebenarnya dari petani bisa lari menjadi pedagang</i></p>

Q14	<p>Apakah masyarakat terganggu dengan adanya limbah yang dibuang ke laut ?</p> <p><i>Sebetulnya mah bukan limbah ke laut aja terganggu kalau ke laut kan itu pencemaran laut, yang dirasakan adalah kepanasan debu ke masyarakat itu sehari hari dan kalau malam aroma batu bara itu tercium oleh kita, sedangkan itu kan akan menimbulkan dampak penyakit</i></p>
-----	--

MATRIKS HASIL WAWANCARA SESUDAH REDUKSI

1. Pola perkembangan penduduk

Q I	Bagaimana pola perpindahan penduduk Desa Cigondang?
I ₁₋₁	<i>Kalau masalah kewarganegaraan mah keluar masuk, yang dari sini banyak yang keluar dan yang dari luar banyak yang kesini, dan masyarakat Desa Cigondang memiliki pola perpindahan yang tetap neng, masyarakat yang pindah ke sini itu biasanya permanen</i>
I ₁₋₂	<i>Perpindahannya tetap neng, lebih banyak dari Cigondang ke dalem</i>
I ₁₋₃	<i>Kalau masyarakat disini mah ga tau ya rasanya nambah, orang disini mah tanahnya pada dijual jadi nyedeknya ke sebelah sini. Ya orang ga punya mah paling nyedek kesini neng, ya ngontrak-ngontrak neng, ibu juga ngontrak dari tanah wakaf dan kebanyakan yang pindah kesini itu menetap neng</i>
I ₁₋₄	<i>Dari sini kesitu ada, , dari luar ke dalem juga banyak, hampir penuh bae nyah hampir padet, pola perpindahannya ya menetap neng</i>
I ₁₋₅	<i>Kalau Desa Cigondang itu keluar masuk, kadang menetap kadang adalagi yang ngontrak, karena kan yang disebut keluar masuk itu kan pertama kaya ngontrak, kalau ga ketemu kerjaan disini biasanya pulang, biasanya yang pindah ke Desa Cigondang itu bikin apa bikin apa, kaya percobaan kalau ga jalan ya udah pergi lagi, apa lagi nelayan hanya sekedar kalau musim bulan besar ya ga ada udah pergi ke daerahnya, kebanyakan kalau disini kan kebanyakan apa lagi di daerah Lantera kebanyakan keluar masuk orang Indramayu nelayannya, pola perpindahannya musiman ga menetap, kadang ya orang Tasik orang Garut orang mana mana pindah kesini berjalan dan lancar usahanya langsung menetap disini, kalau bangkrut ya udah pergi lagi gitu, biasanya yang pindah ke Desa Cigondang itu ada yang jualan cireng, dagang dipasar, ada yang jualan kupat gitu, kebanyakan ya sebagai pedagang</i>
I ₂₋₃	<i>Perkembangan penduduk masyarakat Desa Cigondang kebanyakan yang pindah itu menetap neng ke Desa Cigondang</i>

2. Pola Perpindahan Penduduk

Q I	Apakah banyak masyarakat desa Cigondang yang bekerja di PLTU?
I ₁₋₁	<i>Kalau masalah kewarganegaraan mah keluar masuk, yang dari sini banyak yang keluar dan yang dari luar banyak yang kesini, dan masyarakat Desa Cigondang memiliki pola perpindahan yang tetap neng, masyarakat yang pindah ke sini itu biasanya permanen</i>
I ₁₋₂	<i>Perpindahannya tetap neng, lebih banyak dari Cigondang ke dalem</i>
I ₁₋₃	<i>Kalau masyarakat disini mah ga tau ya rasanya nambah, orang disini mah tanahnya pada dijual jadi nyedeknya ke sebelah sini. Ya orang ga punya mah paling nyedek kesini neng, ya ngontrak-ngontrak neng, ibu juga ngontrak dari tanah wakaf dan kebanyakan yang pindah kesini itu menetap neng</i>
I ₁₋₄	<i>Dari sini kesitu ada, , dari luar ke dalem juga banyak, hampir penuh bae nyah hampir padet, pola perpindahannya ya menetap neng</i>
I ₁₋₅	<i>Kalau Desa Cigondang itu keluar masuk, kadang menetap kadang adalagi yang ngontrak, karena kan yang disebut keluar masuk itu kan pertama kaya ngontrak, kalau ga ketemu kerjaan disini biasanya pulang, biasanya yang pindah ke Desa Cigondang itu bikin apa bikin apa, kaya percobaan kalau ga jalan ya udah pergi lagi, apa lagi nelayan hanya sekedar kalau musim bulan besar ya ga ada udah pergi ke daerahnya, kebanyakan kalau disini kan kebanyakan apa lagi di daerah Lantera kebanyakan keluar masuk orang Indramayu nelayannya, pola perpindahannya musiman ga menetap, kadang ya orang Tasik orang Garut orang mana mana pindah kesini berjalan dan lancar usahanya langsung menetap disini, kalau bangkrut ya udah pergi lagi gitu, biasanya yang pindah ke Desa Cigondang itu ada yang jualan cireng, dagang dipasar, ada yang jualan kupaat gitu, kebanyakan ya sebagai pedagang</i>
I ₂₋₃	<i>Perkembangan penduduk masyarakat Desa Cigondang kebanyakan yang pindah itu menetap neng ke Desa Cigondang</i>

3. Pola Perkembangan Ekonomi

<p>Q I</p>	<p>Bagaimana Perkembangan penduduk bila dilihat dari perkembangan jumlah penduduk secara umum dan penduduk yang berprofesi sebagai nelayan yang terkena dampak langsung dari adanya pembangunan PLTU di pesisir pantai Kecamatan Labuan ?</p>
<p>I₁₋₁</p>	<p><i>Untuk perkembangan penduduk ya saya kurang tau juga neng tapi kalo perbedaan yang dulu dulu sama yang sekarang sih enakan yang dulu neng, enakan yang dulu kenapa, itukan yang dibangun sama proyek kan tempat nyari nafkah kami, sekarang kan setelah dibangunnya proyek kan mau ga mau kita nyari nya kejauh. Rata-rata nelayan disini itu lulusan SD neng ada juga yang ga tamat SD karena ga punya uang</i></p>
<p>I₁₋₂</p>	<p><i>Meningkat neng</i></p>
<p>I₁₋₃</p>	<p><i>Ya penduduk mah banyak, saya mah ga tau ya masyarakat disini mah perkembangannya saya rasa sih belum berkembang neng karena banyak masyarakat yang disini kehidupannya masih kaya gitu aja, apalagi para nelayan sekarang cari ikan juga harus ke tempat yang jauh</i></p>
<p>I₁₋₄</p>	<p><i>Belum ada perkembangan apa apa ya saya rasa, masih gitu gitu aja</i></p>
<p>I₁₋₅</p>	<p><i>Engga, malah kalau dibilang berkembang engga sih, malah yang perusahaan-perusahaan nelayan yang kecil-kecil itu kan mati total, karena kan pada waktu PLTU kesini waktu membangun itu ada perjanjian bahwa nelayan udang yang kecil ternyata sampai sekarang belum ada realisasinya, karena kan jangkauan nya itu biasanya sekian mill pake motor 2 PK ternyata sekarang ga bisa harus mencapai 5 PK sampai 10 PK itu. Akhirnya pada mati, kalau ga ada realisasinya mau mencukupi kebutuhan hidupnya gimana neng? Ada sih emang ada PLTU mengadakan tapi salah sasaran. Jadi dapatnya bukan ke nelayan yang kecil tapi ke nelayan pendatang, saya dengar tuh dua perahu sampai sekarang rusak. Kalau petani ya mati ga mati neng cuma gitu-gitu aja, kalau saya dengar tahun 2015 katanya mau mulai pembangunan proyek perluasan PLTU lagi di lahan pertanian tapi sampai sekarang belum</i> <i>Aja</i></p>
<p>I₂₋₃</p>	<p><i>Perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang agak meningkat dikit dari yang dulu-dulu, kemungkinan kecil karena dampak dari adanya pembangunan PLTU tapi meningkatnya itu bukan sepenuhnya karena adanya PLTU neng, misalnya dilihat dari pembangunan rumah warga juga agak meningkat tapi bukan karena PLTU juga neng</i></p>

--	--

4. Penyerapan tenaga kerja

Q I	Bagaimana penyerapan tenaga kerja masyarakat ?
I ₁₋₁	<i>Kalau masyarakat lokal mah kurang, kalau lokal kebanyakan kerja dibagian buruh kasar yang pait paitnya aja, kalau yang kantor mah bagian luar kebanyakan, kalau karyawan tetap sedikit neng, kalau karyawan kontrak biasanya banyak</i>
I ₁₋₂	<i>Penyerapan tenaga kerja belum maksimal neng</i>
I ₁₋₃	<i>Banyak masyarakat yang terserap kerja di PLTU neng</i>
I ₁₋₄	<i>Banyak masyarakat yang kerja di PLTU</i>
I ₁₋₅	<i>Kalau dulu mah iya, kalau lagi ini mah tenaga beratlah istilahnya, kalau sekarang mah ngga ada, ya ada mah ada satu dua tiga mah tapi ga semua, kebanyakan orang cilacap, ada sih ada ya masyarakat lokal yang bekerja sebagai Office Boy, Security, buruh kasar kebanyakan mah neng, ada yang kerja dibagian koperasinya, ada juga yang kerja di bagian Staff juga ada tapi ga banyak, kebanyakan di buruh kasar</i>
I ₂₋₂	<i>Hampir 90% kali ya kalau kita bisa ini, pegawai PLTU Labuan terserap dari labuan, dari domisili labuan ada 357 orang, itu untuk kecamatan labuan ya, itu ada 357 orang bayangkan, kemudian di pandeglang sendiri ada 94 orang jadi agak melipir sedikit kaya ke menes pandeglang dan sekitarnya ada 94 orang, seperti diluar Kabupaten Pandeglang seperti di Serang 234, tapi kan kebanyakan dari total tenaga kerja kita 685 orang jadi banyak sekali warga sekitar labuan yang sudah terserap bekerja disini. Tapi memang kebanyakan disini sebagai cleaning service, security, dari koperasi, kopindo dan Indonesia Power. Jadi ada lima elemen mba disini itu ada Indonesia Power, ada Kopindo, ada koperasi ada cleaning service, sama security</i>
I ₂₋₃	<i>Anak-anak muda banyak yang bekerja di PLTU sebagai buruh kasar, antara lain seperti babat rumput, satpam, cleaning service, yang lulusan SD juga bisa bekerja sebagai buruh kasar neng, untuk bekerja dibagian staff ada neng cuma sedikit, karena diliat basicnya juga kalau untuk tenaga ahli neng</i>

Q I	Apakah jumlah pengangguran berkurang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan di Desa Cigondang ?
I ₁₋₁	<i>Ya ngga sih menurut saya, masih banyak masyarakat sekitar yang jadi pengangguran</i>
I ₁₋₂	<i>Berkurang karena banyak yang kerja di PLTU PLTU</i>
I ₁₋₃	<i>Otomatis berkurang neng, kan banyak yang udah kerja di PLTU tapi ga semua juga masyarakat yang bisa kerja di PLTU</i>
I ₁₋₄	<i>Pengangguran mah banyak</i>
I ₁₋₅	<i>Justru menjadi melemah, tingkat pengangguran sekarang makin banyak karena yang nelayan kecil usaha mereka jadi ga berjalan lagi karena kurangnya modal dan berhenti apalagi yang cari kepiting udah mati total karena mereka hanya menggunakan bubu saja, kalau yang punya modal biasanya alih profesi seperti buka warung atau buka bedengan ya kalau yang ga punya modal udah mati total, ya kalau cewenya buat nasi uduk</i>
I ₆	<i>Kalau pengangguran sih meningkat ya, walaupun adanya PLTU</i>

5. Berkembangnya Struktur Ekonomi

Q I	Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang secara umum, baik yang dilihat dari profesi maupun ekonomi masyarakat ?
I ₁₋₁	<i>Ya kalau perkembangan ekonomi belum ada perubahan, kalau dibanding sekarang sama yang dulu-dulu mah enakan dulu, enakan dulunya gimana? Itu kan sekarang yang dibangun proyek itu kan tempat cari nafkah barisan kami, sekarang kan setelah dibangun proyek kan kejauh, itu kan pas area karang itu yang dibangun sekarang itu, yang dibikin jalan kapal</i>
I ₁₋₂	<i>Ngga ada perkembangan sih neng kalau saya rasa, malah kayanya menurun, karena kan sekarang ikan dipinggiran udah jarang harus cari ikan di tengah laut</i>
I ₁₋₃	<i>Biasa biasa aja barang kali, kalau ini mah ga atau ke dua kali panen ini ya, ga tau ini mah, lagi depan depannya iya kali</i>
I ₁₋₄	<i>Ngga ada perubahan, ya kaya gini aja</i>

I ₁₋₅	<i>Itu biasanya masalah Cigondang itu minim neng, kebanyakan seperti tukang becak, nelayan, nelayan kan memanfaatkan alam, petani, ya ada kuli ya kuli bangunan ya macam-macam, kebanyakan becak. Seharusnya kan itu perusahaan besar ya, tetap aja yang kerjanya itu orang luar, perkembangan ekonomi masyarakatnya belum berkembang</i>
I ₂₋₃	<i>Perkembangan ekonomi masyarakat Desa Cigondang agak meningkat dikit dari yang dulu-dulu, kemungkinan kecil karena dampak dari adanya pembangunan PLTU tapi meningkatnya itu bukan sepenuhnya karena adanya PLTU neng, misalnya dilihat dari pembangunan rumah warga juga agak meningkat tapi bukan karena PLTU juga neng</i>

Q / I	Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?
I ₁₋₁	<i>Ya gitu gitu aja sih kalau masalah penghasilan mah, ya memang kebanyakan mah nelayan mah ya dapet satu hari kosongnya satu minggu aja udah syukur syukur aja, nelayan nelayan begini mah pengen cari uang seratu ribu sehari jarang ketemu minggu nya.</i>
I ₁₋₂	<i>Ngga ada perubahan neng, gitu gitu aja malah saya rasa semakin menurun karena kan ikan sudah sulit didaerah sini mah harus ke tengah</i>
I ₂₋₃	<i>Kalau keadaan ekonomi masyarakat Desa Cigondang agak meningkat sih neng daripada yang dulu dulu, ga ada dampak dari PLTU juga sih ya tapi kemungkinan ada, mungkin</i>

6. Peningkatam Pendapatan Masyarakat

Q / I	Bagaimana dengan peningkatan pendapatan masyarakat ?
I ₁₋₁	<i>Menurun meningkat mah ya gitu-gitu aja kalau masalah penghasilan mah, ya kalau penghasilan mah ya nelayan mah gimana ya, dapat satu hari kosong satu minggu aja udah syukur-syukur aja. Nelayan-nelayan gini mah mau cari uang seratus ribu aja jarang ketemu minggu nya, bener neng. PLTU mana ada toleransinya sama nelayan, saya sendiri belum pernah merasakan bantuan bukan saya sendiri, temen-temen juga ga pernah, CSR apa CSR apa itu yang namanya bantuan-bantuan itu nol</i>

	<i>besar kalau dari proyek mah terus terang aja, ga tepat sama apa yang dijanjikan dulu</i>
I ₁₋₂	<i>Ngga ada peningkatan apa apa, ya makin merosot, semakin turun, kalau dapat pendapatan seratus ribu untuk keluarga, untuk beli solar lagi, untuk beli rokok gitu. Perahunya punya orang, punya curagan, saya numpang doang</i>
I ₁₋₃	<i>Begini begini aja neng, ini kan lahan pertanian punya orang neng, ibu mah cuma sebagai buruh tani, kalau misalnya panen dapet 2 karung ya dibagi 1 karung untuk ibu dan 1 karungnya lagi untuk yang punya sawahnya neng, jadi bagi dua, untuk dana CSR ga ada disini mah belum pernah</i>
I ₁₋₄	<i>Ya biasa aja neng, ga ada peningkatan</i>
I ₁₋₅	<i>Peningkatan masyarakat sebelum dan setelah adanya PLTU gitu-gitu aja. Hasil penangkapan ikan jelas merosot, hanya itu tadi perahu kecil ga bisa jalan, ada yang nangkap bubu kepiting, ada jaring udang sekarang kurang. Pendapatan masyarakat Desa Cigondang baik yang berprofesi sebagai petani dan nelayan menurun, biasanya kan sebelum popole itu pasang bubu untuk udang kan banyak dan dekat sekarang kan panas airnya kena limbah dan mencari ikannya ke jauh ga terjangkau sama motor, akhirnya udah ga kebeli mesin-mesin untuk motor, jadi udah berehenti. Adapun pemberian dana CSR kepada nelayan seperti pemberian kapal, kalau ga salah ada 2 kapal tapi pemberiannya itu tidak tepat sasaran neng, akhirnya kapal-kapalnya sekarang rusak</i>
I ₂₋₃	<i>Ada peningkatan tapi ga semua masyarakat ya neng, seperti nelayan sekarang ada kemerosotan hasil tangkapan ikan neng, tetapi permasalahan itu bukan karena tok adanya PLTU ya, kan disana juga ada kapal kursin, kapal-kapal besar, ga 100% karena PLTU, jadi nelayan kecil kepepet neng karena adanya kapal-kapal besar, ada pemberian dana CSR yang diberikan kepada kepala desa Cigondang dan diberikan langsung kepada masyarakat dibawah rata-rata garis kemiskinan, ga semua</i>

Q I	<p align="center">Bagaimana dengan hasil pertanian, perikanan/penjualan masyarakat di Desa Cigondang setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan ?</p>
I ₁₋₁	<p><i>Kalau untuk perikanan mah kurang neng, cari ikan harus ke tengah</i></p>
I ₁₋₂	<p><i>Ya kadang-kadang kalau lagi ada penjualan itu kadang-kadang dapet seratus ribu, kalau ngga ada sih kosong sama sekali ngga ada</i></p>
I ₁₋₃	<p><i>Ja eta neng ngaruh kering neng ti panas jeung halodo kering, tilu hulu tilu hulu eta neng</i></p>
I ₁₋₄	<p><i>Ngga ini mah lagi jelek neng, karna kemarau ya, barang kali ada dampak panas dari PLTU juga, pohon pohonan pisang apa ja kaya gini, kalau dulu mah ya belum ada PLTU mah ya subur subur gitu ya</i></p>
I ₁₋₅	<p><i>Kalau itu sih kurang tau ya. Kalau itu kan istilahnya ga mayoritas petani, ya paling sekitar 3 kwintal lah, paling banyak 5 kwintal 6 kwintal lah, dengan hasil pertanian sih rasanya ga pernah sih limbah PLTU dampaknya ke petani, ga ada. Cuma pertama aja, itu sekarang ga ada, dulu kan boilernya pecah sekali pecah, akhirnya ke padi item, tapi sekarang ga ada, kalau petani ikan yang seperti udang itu udah, udah total mati karena ga terjangkau, kan dulu mah ada bagang, sekarang udah ga ada, udang kepiting dan bagang yang total udah ga ada</i></p>
I ₂₋₂	<p><i>Ikan di jeti hidup hidup aja ya, ubur ubur banyak banyak aja ya, malah banyak banyak aja dan banyak banyak aja saya rasa, saya juga bingung, potensi nelayan juga malah ikan normal normal aja, karena saya sendiri masih makan ikan maksudnya, kalau perbedaan dari jaman dulu sampai sekarang susah dicari ya wajar, karena kan ikan tiap tahun diambil terus ya pasti berkurang</i></p>
I ₂₋₃	<p><i>Hasilnya meningkat sih neng, secara keseluruhan sih meningkat. Kalau faktor pertanian disini itu tadah hujan, bukan tanah irigasi, ya kalau musim hujan ya ada air, kalau musim kemarau gini ga ada air, masalahnya itu bukan irigasi sawah alami aja gitu, memang dampaknya sedikit sedikit mah ada sih dari panas dan debu, kalau pertanian ya itu susah sekarang nelayan cari ikan</i></p>

Q I	<p align="center">Apakah terjadi kemerosotan hasil tangkapan ikan ?</p>
I ₁₋₁	<p><i>Ya sih kurang kurang total, emang dampak ada sih, soalnya kan kalau</i></p>

	<i>tumpah batu bara tuh kadang-kadang udang juga kurang, kalau selagi tumpah gitu maksudnya. Itukan pas aera karang yang dibangun sekarang itu yang dibikin jalan kapal itu. Kalau disini itu mati udah ikan-ikan kurang, lain lagi kaya dulu sebelum dibangun jadi ikan kan dari sana bisa nyebrang kesini secara langsung, sekarang ada batu kan kecegat.</i>
I ₁₋₂	<i>Ada, biasanya bisa dapet 100% sekarang Cuma 50%, ya nyari ke tengah, kalau ga kepinggir, dipinngir masih ada ikan tapi jarang</i>
I ₂₋₃	<i>Iya neng, Sekarang ada kemerosotan hasil tangkapan ikan, tapi ga tok karena adanya PLTU ya neng, karena kan itu ditengah ada kapal kursin ya kapal kapal besar jadi nelayan kecil kepepet gitu, jadi bukan 100% karena PLTU</i>

7. Perubahan Lapangan Pekerjaan

Q I	Seperti apa perubahan lapangan pekerjaan yang terjadi ?
I ₁₋₁	<i>Kalau dari proyeknya terbuka untuk semua kalangan sih kayanya perubahan lapangan pekerjaan ada, inikan kadang pilih-pilih, ntah usia, ntah kemampuan. Kebanyakan juga kerja sebagai buruh kasar</i>
I ₁₋₂	<i>Ya perubahan lapangan kerja mah ada sih neng, banyak masyarakat yang bekerja di</i>
I ₁₋₃	<i>Ada perubahan neng, banyak yang kerja di PLTU</i>
I ₁₋₄	<i>Perubahannya mah ada dikit neng, banyak yang kerja di PLTU sekarang</i>
I ₁₋₅	<i>Perubahan lapangan pekerjaan belum ada neng, kebanyakan yang kerja itu cuma sebagai buruh kasar, kaya cleaning service, satpam, pengangkut batu bara. Kalau dibagian kantornya ada cuma jarang</i>
I ₂₋₂	<i>Ada perubahan lapangan pekerjaan, misalnya ada yang tadinya tidak bisa menghidupi anak istrinya, sekarang sudah bekerja di kami walaupun misalnya gaji berapa gitu kan, setidaknya sudah lumayanlah gitu untuk penghasilan mereka dalam ukuran di Labuan yang penting diatas UMR</i>
I ₂₋₃	<i>Kalau untuk Perubahan Lapangan Pekerjaan, sedikit banyak ada neng karena adanya PLTU. Kan yang tadinya ga ada kerja sekarang ada kerja karena adanya PLTU juga. Kalau sekarang karyawan banyak yang sebagai babat rumput, satpam, cleaning service</i>

I ₂₋₄	<i>Sebetulnya tidak ada perubahan. PLTU itu mencari orang orang yang mempunyai skill, sebetulnya didaerah kita juga banyak yang harus dikaryakan tapi orang orang kita tidak diberi kesempatan. Kenapa saya katakan tidak diberi kesempatan, karena setelah saya lihat pekerja yang permanen itu semua orang luar, Surabaya, dari Sumatera. Orang orang kita sebetulnya Pandeglang ini banyak, ahli pembukuan, tentang komputer, mekanik, untuk semua yang diperlukan PLTU itu sebenarnya banyak di Pandeglang itu</i>
------------------	--

Q I	Apakah banyak masyarakat sekitar yang bekerja di PLTU ?
I ₁₋₁	<i>Lokal mah kurang</i>
I ₁₋₂	<i>Banyak neng yang kerja di PLTU mah, dari mana mana aja itu ada yang dari Labuan, ada yang dari Panimbang kalau yang di daerah sini ada sih ada</i>
I ₁₋₃	<i>Banyak yang dari dari Cigondang, dari Muncang ya, banyak dari sini, dari RT 1 juga ada, tapi kalau RT 5 RT 6 mah ngga ada</i>
I ₁₋₄	<i>Banyak neng</i>
I ₁₋₅	<i>Banyak masyarakat yang bekerja di PLTU dibagian security, cleaning service dan buruh kasar ada juga masyarakat setempat yang bekerja dibagian staff tapi jarang karena masyarakat disini rata-rata pendidikan lulusan SD dan SMP, kalau yang lulusan SMA masih jarang apa lagi S1.kalau tenaga ahli kebanyakan dari luar</i>
I ₂₋₂	<i>Banyak sekali mba, untuk kecamatan labuan ya, itu ada 357 orang</i>
I ₂₋₃	<i>Ngga sih neng, sebagian kecil</i>

Q I	Bekerja sebagai apa masyarakat local di PLTU ini ?
I ₁₋₁	<i>Di bagian buruh kasar</i>
I ₁₋₂	<i>Tau ya kadang-kadang itu ada yang pembabat rumput gitu, batu bara itu, kerjanya, lebih banyak di buruh kasar</i>
I ₁₋₃	<i>Ya ada satpam, pembabat rumput, cleaning service</i>
I ₁₋₄	<i>Ga tau ya itu, ada yang jadi cleanin service gitu, bersih bersih rumput, buruh kasar, gitulah kalau mau melamar ke situ harus punya duit, kalau ga punya mah ga jadi</i>
I ₁₋₅	<i>Banyaknya cleaning service, security dan ada juga yang dibagian staff tapi jarang</i>
I ₂₋₂	<i>kebanyakan disini sebagai cleaning service, security, dari koperasi, kopindo dan Indonesia Power</i>

I ₂₋₃	<i>Ya kebanyakan di tenaga kasar, kaya pembabat rumput, cleaning service, satpam</i>
------------------	--

8. Kesehatan Masyarakat

Q I	Apakah terdapat dampak negatif yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dengan adanya pembangunan PLTU ?
I ₁₋₁	<i>Kalau untuk kesehatan mah neng kalau ada debu dari batubara itu saya mah kasian sama anak-anak aja, gangguan pernafasan, pilek-pilek mendadak, sesek-sesek pas giliran berobat ya mending kalau ada uang mah, seseknya lumayan itu debunya, kadang mata juga perih</i>
I ₁₋₂	<i>Ya ngaruh sama kesehatan, sesak nafas gitu batuk, kena penyakit, belum pernah ngerasain pengobatan gratis</i>
I ₁₋₃	<i>Aya neng, sesek</i>
I ₁₋₄	<i>Pasti ada mah, dari debunya itu suka batuk, sesek</i>
I ₁₋₅	<i>Kalau sakit mah musiman itu, kalau cuacanya terik anginnya dari sana kesini itu paling kena pilek karena debu dari PLTU yang terbang kesini, tapi kalau musim kaya gini mah kesana ke Tarogong, ke Banyubiru samapi ke Menes debunya, sampai hitam kalau anginnya dari sini kesana. Kalau misalnya ada yang sakit demam karena PLTU udah turun pengobatan gratis langsung. Kalau kesehatan PLTU ada nyumbang sedikit alat dari kampung kalangsari yang bapak liat, seperti tensi, timbangan bayi itu ada cuma satu posyandu, ga semua</i>
I ₂₋₂	<i>Semua pabrik ya semua industri kan pasti menghasilkan limbah ya, limbah kami ini sendiri kan bukan hanya limbah abu ya batu bara kan, ada limbah cair, limbah lain sebagainya, tapi untuk semua pengelolaan lingkungan itu sendiri kan sudah ada aturannya, sudah ada aturan pemerintah, sudah ada aturan pemerintah daerah, pemerintah pusat kementerian lingkungan hidup, semuanya kan sudah ada, ketika berdirinya suatu perusahaan sudah pasti ada aturannya seperti itu, dampak ada cuma apa namanya sampai saat ini sendiri kami masih memperhijau jadi yang kategori kalau bagi perusahaan yang sudah masuk kategori memperhijau emang dampaknya ke masyarakat juga tidak ada, istilahnya tidak dirasakan langsung ya, sampai saat ini sih kami belum menemukan adanya penelitian yang menyatakan bahwa masyarakat sekitar asma atau</i>

	<p><i>kena abu batubara, karena kan prosesnya panjang ya mba tidak misalnya gini, ada di cigondang misalnya menyatakan oh ada yang asma misalnya, ada yang radang paru-paru itu disebabkan oleh abu batubara misalnya, itukan penelitiannya sangat panjang ya akibat faktornya kan abcdefg, jadi belum tentu oleh PLTU, tapi sampai saat ini sih ya alhamdulillah dari pegawainya sendiri yang berada disini belum ada apalagi masyarakat yang ada diluar gitu ya. Untuk pengobatan gratis ada 1 tahun sekali, untuk tahun ini bulan Februari, peserta pengobatan gratis ada 1000 orang masyarakat sekitar yang ikut serta pengobatan tersebut, diberikan obat obatan gratis, tapi tetap kita yang bayar, dokternya kesini, diadakan di sini</i></p>
I ₂₋₃	<p><i>Kalau debu yang dihasilkan PLTU itu biasanya mempengaruhi kesehatan masyarakat neng, seperti sesek nafas gitu, masalahnya dampak negatifnya belum tertera ya, masalahnya kan debu itu lama jaraknya, mungkin sekarang juga kita duduk disini mungkin debu-debu PLTU terhisap ya tapi kan jangkanya itu bukan setahun dua tahun neng, untuk pengobatan gratis itu dokternya datang ke PLTU, tapi sayangnya sama saja kaya berobat ke puskesmas, kenapa gitu? Dari sini ongkos sama ke puskesmas sama, malah lebih kalau ke PLTU, jadi untuk membantu masyarakat kok malah beban untuk ongkos gitu neng. Mau saya sih walaupun gratis silahkan lah datang tetapi di Desa ini supaya masyarakat bisa merasakan, jadi percuma gitu neng</i></p>
I ₂₋₄	<p><i>Sekarang gini, kita tidak tahu radiasi yang dihasilkan oleh PLTU, karena radiasi yang dihasilkan oleh PLTU itu, melalui apa sutet pun kita akan terlihat itu 25 tahun ke depan. Sekarang adalah radiasi panas, makanya banyak masyarakat yang mengalami flu akibat dari pada radiasi itu</i></p>

9. Bentuk Komponen Kritis Lainnya (Keberadaan Sumber Daya Alam)

Q I	Bekerja sebagai apa masyarakat local di PLTU ini ?
I ₁₋₁	<p><i>Untuk Sumber Daya Alam di Desa Cigondang sekarang mah udah rusak kalau masalah ikan ikan mah, udah langka, ada dampak dari PLTU juga, biasanya kalau tumpah batubara ke laut itu udang udang kurang, ya paling yang dibutuhin itu biota lautnya aja neng dibenerin lagi</i></p>
I ₁₋₂	<p><i>Ya yang dibutuhin masyarakat apalagi yang nelayan kaya kami, Cuma butuh perahu yang gede aja gitu, ya itung itung satu perahu untuk beberapa orang saya mah udah bersyukur aja neng</i></p>

I ₁₋₅	<p><i>Pokok utama yang tadi bapak katakan seperti nelayan penangkap udang itu jadi seharusnya PLTU itu survey ke lokasi karena bukan yang datang orang Cigondang yang datang kesana, kita disitu ada bantuan, di ambil, di bikin ternyata jadi bukan wadahnya, saya minta mah PLTU survey ke nelayan-nelayan kecil apa keluhan-keluhan nelayan, ternyata kalau ada bantuan yang menerimanya bukan orang orang yang tepat sasaran, disini mengajukan, tanda tangan, akhirnya bantuan sudah turun tidak tepat sasaran. Kalau nelayan yang penting perahunya aja, mesin gede. Kalau Sumber Daya Alam waktu itu sudah ada pemberdayaan sumber daya alam waktu itu pernah di bikin disini, seperti jenis rumput laut tapi bukan rumput untuk bikin cincau, emang kemarin dicoba disini tapi ga jadi karena faktor alam juga</i></p>
------------------	--

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asep Bungawan
Pekerjaan/Jabatan : PNS. Kasir Pengendalian Perencanaan & Peng Lab. LK
Umur : 35 th
No.Hp/Tlp :
Alamat : Jl. Raya Labuan km. 3 Cipacung Majasari Pandeglang

Menyatakan bahwa benar yang telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian Skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Melinda Paula Tumbol
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661110006
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara

Saya tidak keberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Demikian, data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian

Pandeglang, 2 Juli 2015


Informan

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. HAEMIN
Pekerjaan/Jabatan : STAP. DESA Cijomaras / Sekretaris Desa
Umur : 56. TAHUN
No.Hp/Temp : 08129 7810 986
Alamat : K.P. Cijomaras TASAK.

Menyatakan bahwa benar yang telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian Skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Melinda Paula Tumbol
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661110006
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara

Saya tidak keberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Demikian, data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian

Pandeglang, 09 Juli 2015



Informan

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lili Nurdaillah
Pekerjaan/Jabatan : Indonesia Power / AMU CIR - Humas & Keamanan
Umur : 26 th
No.Hp/Tlp : 081807262979
Alamat : Jl. Raya Labuan KM 17 kp bebun pader
Sateki - Pandeglang - Banten.

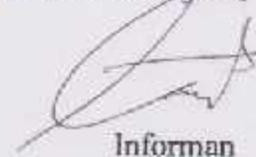
Menyatakan bahwa benar yang telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian Skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Melinda Paula Tumbol
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661110006
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara

Saya tidak keberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Demikian, data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian

Pandeglang, 10 Agustus 2015



Informan

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fdy. Arumanjah
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
Umur : Seiring 1988
No.Hp/Tlp : 50
Alamat : Cigondang

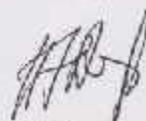
Menyatakan bahwa benar yang telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian Skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Melinda Paula Tumbol
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661110006
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara

Saya tidak keberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Demikian, data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian

Pandeglang, 28 Juli 2015



Informan

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EMak Juhariah
Pekerjaan/Jabatan : Petani
Umur : 65
No.Hp/Tlp :
Alamat :

Menyatakan bahwa benar yang telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian Skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Melinda Paula Tumbol
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661110006
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara

Saya tidak keberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Demikian, data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian

Pandeglang, 23 Juli 2015

Juhariah
Informan

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asep Bungawan
Pekerjaan/Jabatan : PNS. Kasi Pengendalian Perencanaan & Peng. Lab. LIT
Umur : 35 th
No.Hp/Tlp :
Alamat : Jl. Raya Labuan Km. 3. Cipacung Majasari Pandeglang

Menyatakan bahwa benar yang telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian Skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Melinda Paula Tumbol
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661110006
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara

Saya tidak keberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Demikian, data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian

Pandeglang, 2 Juli 2015


Informan

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bapak Tali
Pekerjaan/Jabatan : Pelani
Umur : 67
No.Hp/Tlp :
Alamat :

Menyatakan bahwa benar yang telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian Skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Melinda Paula Tumbol
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661110006
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara

Saya tidak keberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Demikian, data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Pandeglang, 23 Juli 2015



Informan

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TB Aripudin
Pekerjaan/Jabatan : Wraswasta ILSM
Umur : 43
No.Hp/Tlp :
Alamat : Cigandong - Keramat

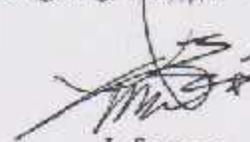
Menyatakan bahwa benar yang telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian Skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Melinda Paula Tumbol
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661110006
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara

Saya tidak keberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Demikian, data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian

Pandeglang, 17 April 2015



Informan

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUMBER
Pekerjaan/Jabatan : Melayan .
Umur : 62 th .
No.Hp/Tlp- :
Alamat : Karang sari RT 03 .

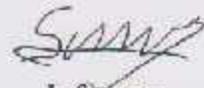
Menyatakan bahwa benar yang telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian Skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Melinda Paula Tumbol
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661110006
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara

Saya tidak keberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Demikian, data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian

Pandeglang, 25 Juli 2015


Informan

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : 
Pekerjaan/Jabatan : NELAYATI
Umur : 42 TH
No.Hp/Tlp- :
Alamat : KARANG SARI

Menyatakan bahwa benar yang telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian Skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Melinda Paula Tumbol
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661110006
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara

Saya tidak keberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Demikian, data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian

Pandeglang, 23 JUNI 2015


Informan

MEMBER CHECK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lilic Nuraitah
Pekerjaan/Jabatan : Indonesia Power/ Amu CIR. Humas & Keamanan
Umur : 26 th
No.Hp/Tlp : 081807262979
Alamat : Jl. Raya Labuan KM 17 Kp Kebou Pader
Saketi - Pandeglang - Banten.

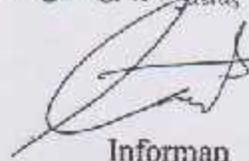
Menyatakan bahwa benar yang telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian Skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Melinda Paula Tumbol
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 6661110006
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara

Saya tidak keberatan apabila nama dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan penelitian ini.

Demikian, data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian

Pandeglang, 10 Agustus 2015



Informan



Nomor : 243 /07/UJPBLB/2015
Surat Sdr. : 840/UN.43.6.1/PG/2015
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Permohonan Izin
Mencari Data

Labuan, 09 Juli 2015

Kepada :

FAKULTAS ILMU SOSIA DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA
Jl. Raya Jakarta KM.4 Pakupatan
Serang - Banten

U.p. Kaprodi

Menindaklanjuti surat Saudara No. 840/UN.43.6.1/PG/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Permohonan Izin Mencari Data, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan pencarian data di PT Indonesia Power UJP PLTU Banten 2 Labuan.

Adapun untuk waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MANAJER ADMINISTRASI
ISMA SOLEH





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone: (0254) 280330 Ext. 228, Fax: 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 843 /UN.43.6.1/PG/2015

29 Juni 2015

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Desa Cigondang
di
Tempat

Dengan Hormat,

Selubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Melinda Paula Tumbol
NIM : 6661110006

Semester : VIII

Mata Kuliah : SKRIPSI

Judul : Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten

Data diperlukan : 1. Wawancara terkait dampak sosial ekonomi
2. Data Kependudukan Desa Cigondang (Jumlah Penduduk tahun 2013-2014), data jumlah penduduk berdasarkan profesi di setiap bidang, data usia penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2013-2014 dan data terkait lainnya.

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197903252005012001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM-4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax: 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip.untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 042 /UN.43.6.1/PG/2015

29 Juni 2015

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kecamatan Labuan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Schubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : Melinda Paula Tumbol
NIM : 6661110006

Semester : VIII

Mata Kuliah : SKRIPSI

Judul : Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten

Data diperlukan : Data kependudukan Kecamatan Labuan (jumlah penduduk Tahun 2013-2014). Data jumlah penduduk berdasarkan profesi disetiap bidang, data usia penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2013-2014, data persebaran penduduk dan data terkait lainnya

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197905252005012001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 891 /UN.43.6.1/PG/2015

29 Juni 2015

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Masyarakat Desa Cigondang
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : Melinda Paula Tumbol
NIM : 6661110006

Semester : VIII

Mata Kuliah : SKRIPSI

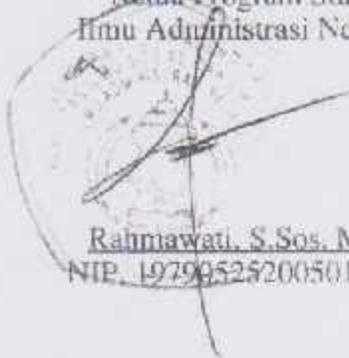
Judul : Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2
Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang
Kecamatan Labuan Banten

Data : Wawancara Terkait Dampak Sosial Ekonomi
diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197905252005012001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 840 /UN.43.6.1/PG/2015

29 Juni 2015

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
PLTU Banten 2 Labuan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Schubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : Melinda Paula Tumbol
NIM : 6661110306

Semester : VIII

Mata Kuliah : SKRIPSI

Judul : Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten

Data : Wawancara terkait Dampak Sosial Ekonomi diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan **izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Rahmawati S. Sos. M.Si
NIP. 197905252005012001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax: 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kouak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 859 /UN.43.6.1/PG/2015

29 Juni 2015

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pandeglang
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : Melinda Paula Tumbol
NIM : 6661110006

Semester : VIII

Mata Kuliah: SKRIPSI

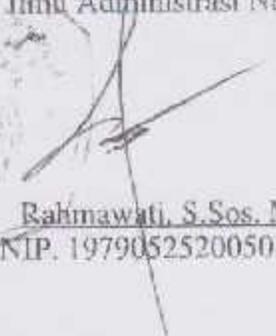
Judul : Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten.

Data diperlukan : Wawancara terkait Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan Pada Kehidupan Sosial Ekonomi.

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Rahmawati, S.Sos. M.Si
NIP. 197905252005012001



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa

Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
*INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL
AND CULTURAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL
TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN
BUDAYA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1.
- (2) Salinan naskah asli *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tid

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
tid
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 118

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

I. UMUM

1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sipil dan Politik.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara.

Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia

Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga mengemukakan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women* 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN

HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "*Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka I) dan "*Piagam Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "*bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*" (huruf b) dan "*bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia*" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "*International Bill of Human Rights*" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamankan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

3. Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas

pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 1).

Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur pokok-pokok yang bersifat prosedural (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), dan yang mencakup pengaturan penandatanganan, pengesahan, aksesi, dan penyimpanan Kovenan ini, serta tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai penyimpan (*depository*) (Pasal 26 dan Pasal 30), mulai berlakunya Kovenan ini (Pasal 27), lingkup wilayah berlakunya Kovenan ini di negara pihak yang berbentuk federal (Pasal 28), prosedur perubahan (Pasal 29), dan bahasa yang digunakan dalam naskah otentik Kovenan ini (Pasal 31).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (*interdependent*). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama.

Peaksanaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik.

(Ayat 2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4557

KOVENAN INTERNASIONAL
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)
tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatanganan,
ratifikasi, dan akses

MUKADIMAH

Negara-Negara Pihak dalam Kovenan ini,

Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia,

Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, juga hak-hak sipil dan politiknya,

Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia .

Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk mengupayakan pemajuan dan penghormatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyetujui pasal-pasal berikut :

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-

kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan suatu bangsa dirampas sumber-sumber hayat hidupnya.

3. Negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas administrasi atas wilayah-wilayah Perwalian, harus memajukan hak penentuan nasib sendiri, dan menghormatinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukkan langkah-langkah legislatif.
2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.
3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan ekonomi nasional, mereka dapat menentukan sampai seberapa jauh dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Pasal 3

Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.

Pasal 4

Negara Pihak pada Kovenan ini mengenai bahwa menikmati hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketetapan hukum yang sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 5

1. Dalam Kovenan ini tidak terdapat hal-hal yang boleh ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan tindakan yang bertujuan untuk menghapuskan hak-hak dan kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau pembatasan atas hak atau kebebasan tersebut lebih jauh dari pada yang diatur dalam Kovenan.
2. Tidak diperbolehkan pembatasan atau pengurangan dari hak asasi manusia yang mendasar yang telah diakui atau terdapat di suatu negara berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

BAGIAN III

Pasal 6

1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini harus meliputi juga pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang memadai dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi perorangan.

Pasal 7

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya:

- (a) Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya dengan:
 - (i) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan apapun, khususnya kepada perempuan yang dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
 - (ii) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;
- (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;
- (c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi yang tepat tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.

- (d) Istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Pasal 8

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
 - (a) Hak setiap orang untuk dapat membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, hanya tunduk/taat pada peraturan organisasi yang bersangkutan, untuk peningkatan dan perlindungan kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan dalam pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional maupun ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan orang lain;
 - (b) Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;
 - (c) Hak serikat pekerja untuk bertindak/berfungsi secara bebas, tanpa adanya pembatasan kecuali yang telah ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau demi untuk perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;
 - (d) Hak untuk melakukan pemogokan dapat dipergunakan/dilaksanakan namun harus sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan;
2. Pasal ini tidak menghalangi penerapan pembatasan yang sah. Para petugas Angkatan Bersenjata atau Kepolisian maupun Para Pejabat Pemerintah untuk melakukan pembatasan secara hukum atas pelaksanaan bagi anggota angkatan bersenjata atau polisi atau pejabat pemerintah.
3. Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara-Negara Pihak dalam "Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat" guna mengambil langkah legislatif apapun yang mengurangi jaminan-jaminan yang diatur sedemikian rupa pada Pasal 9 Konvensi itu.

Pasal 9

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

Pasal 10

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.
2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.
3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Pasal 11

1. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.
2. Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk:
 - (a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebaran pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien;

- (b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengeksport pangan.

Pasal 12

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:
 - (a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat ketahanan-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
 - (b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
 - (c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
 - (d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Pasal 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:
 - (a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
 - (b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

- (c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - (d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
 - (e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
4. Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Pasal 14

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.

Pasal 15

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:
- (a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
 - (b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
 - (c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.
4. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

BAGIAN IV

Pasal 16

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pematuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
2. (a) Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Kovenan ini;
(b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-negara Pihak kovenan ini yang juga adalah anggota dari Badan Khusus, kepada Badan-Badan Khusus tersebut sepanjang laporan-laporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan dari Badan Khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya.

Pasal 17

1. Negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam jangka waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak dan Badan Khusus yang bersangkutan.
2. Laporan demikian dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Kovenan ini.
3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pada suatu Badan Khusus oleh Negara Pihak pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak lagi perlu diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi yang pernah diberikannya tersebut.

Pasal 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama-sama dengan Badan-badan Khusus dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup hal-hal khusus dari keputusan dan rekomendasi terhadap penerapan tersebut yang telah disetujui oleh organ-organ yang berwenang.

Pasal 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan Pasal 16 dan 17, dan laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Badan-Badan Khusus sesuai dengan Pasal 18, untuk dipelajari dan diberikan rekomendasi umum, atau sekedar untuk informasi belaka.

Pasal 20

Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-badan Khusus yang terkait, dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi sesuai dengan Pasal 19, atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum tersebut, dalam setiap laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

Pasal 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa, dan ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-Badan Khusus, tentang langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang dibuat yang telah dicapai dalam mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Pasal 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan perlengkapan dan Badan-badan Khusus yang bersangkutan untuk memberikan bantuan teknis, tentang hal-hal yang timbul dari laporan-laporan yang diatur dalam bagian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan kelayakan langkah-langkah internasional yang dapat mendukung penerapan Kovenan ini secara bertahap dan efektif, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 23

Negara Pihak pada Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pemenuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi, penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta penyelenggaraan perkenalan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang dilakukan bersama dengan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 24

Tidak ada satu hal pun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan-badan Khusus yang menetapkan atas tanggung jawab masing-masing badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Khususnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 25

Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh.

BAGIAN V

Pasal 26

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diaksesi oleh Negara dengan merujuk pada ayat 1 Pasal ini.
4. Aksesasi akan berlaku dengan diteruskannya instrumen aksesasi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah melakukan aksesasi, mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau aksesasi.

Pasal 27

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang ketiga puluh lima untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi atas Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi tersebut.

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

Pasal 29

1. Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua negara Pihak, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan Konferensi Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.
2. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila disetujui oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 30

Tanpa mengindahkan pemberitahuan yang dibuat menurut Pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal tersebut hal-hal sebagai berikut;

- (a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan Pasal 26;

- (b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan Pasal 27, dan tanggal mulai berlakunya perubahan-perubahan sesuai dengan Pasal 29.

Pasal 31

1. Teks Kovenan ini yang dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

>>>>.....<<<<<